

# JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 12 Nomor 2, Juli 2007



**A. ZUBAIDI INDRA**

Analisis Peran Faktor-Faktor Fundamental terhadap Risiko Sistematis  
pada Perusahaan di Bursa Efek Jakarta

**RINDU RIKA GAMAYUNI**

Peranan Keuangan *Historical Cost* pada Kondisi Tingkat Inflasi  
Ringan, Sedang dan Berat; Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta

**RETNO YUNI NUR SUSILOWATI**

**YULIANSYAH**

*Technology Acceptance Model*: Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh  
terhadap Intensi Penggunaan Teknologi *World Wide Web*

**DEWI SUKMASARI**

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa  
pada LPBM Teknokrat Bandar Lampung

**RENI OKTAVIA**

*Expert System*; Sistem Informasi Akuntansi Berbasis *Knowledge*

**RATNA SEPTIYANTI**

Positivisme dalam Akuntansi

**AGRIANTI K. S. A.**

*The Positives and Negatives the Audit Committee in USA*

**EINDE EVANA**

Peran Komite Audit dalam Mendeteksi Adanya *Fraud* Pasca  
Sarbanes Oxley Act 2002

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG

# JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

**The Journal of Accounting and Finance**

Volume 12 Nomor 2, Juli 2007

Redaksi .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>A. ZUBAIDI INDRA</b> Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Risiko Sistematis pada Perusahaan di Bursa Efek Jakarta.....	147-164
<b>RINDU RIKA GAMAYUNI</b> Relevansi Laporan Keuangan <i>Historical Cost</i> pada Kondisi Tingkat Inflasi Ringan, Sedang dan Berat; Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta.....	165-188
<b>RETNO YUNI NUR SUSILOWATI</b> <b>YULIANSYAH</b> <i>Technology Acceptance Model</i> : Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Intensi Penggunaan Teknologi <i>World Wide Web</i> .....	189-204
<b>DEWI SUKMASARI</b> Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa pada LPBM Teknokrat Bandar Lampung .....	205-220
<b>RENI OKTAVIA</b> <i>Expert System</i> ; Sistem Informasi Akuntansi Berbasis <i>Knowledge</i> .....	221-230
<b>RATNA SEPTIYANTI</b> Positivisme dalam Akuntansi.....	231-246
<b>AGRIANTI K. S. A.</b> <i>The Positives and Negatives the Audit Committee in USA</i> .....	247-260
<b>EINDE EVANA</b> Peran Komite Audit dalam Mendeteksi Adanya <i>Fraud</i> Pasca	

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL  
TERHADAP RISIKO SISTEMATIS PADA PERUSAHAAN  
DI BURSA EFEK JAKARTA**

**A.Zubaidi Indra<sup>1</sup>**

***ABSTRACT***

*The object of observation that was take the emitten that registered in the Jakarta stock hold in the period from period 1st January 1998 until 31st December 2002. This research was use with multiple linear regression to see the impacts of fundamental factors, for combining years 1998, 1999, 2000, 2001, and 2002, then to see the most significant variables, for the Analysis is to examine the most dominant variables by using F-test and t-test at significant level 5%.*

*Result of this research shows that financial fundamental factors debt to equity ratio, return on equity, earnings per share, price earnings ratio, and operating profit margin have impacts on beta follows by using F-test, variables debt to equity ratio, return on equity, earnings per share, price earnings ratio, and operating profit margin together have not impact, on systematic risk (beta). Almost all variables have nothing impact the most to the beta, except operating profit margin variable in 1999. This research also has weakness because variable that was used and the emitten that was the research object is limited and the method period is in crisis time, for the further research is suggested to subscribe other accounting variable and economic macro variables to know the impact of the fundamental factor that is more accurate to the systematic risk (beta).*

*Key words: fundamental factors, debt to equity ratio, return on equity, earnings per share, price earnings ratio, and operating profit margin*

**A. PENDAHULUAN**

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

Bagi investor, menginvestasikan dananya di pasar modal juga memberikan keuntungan yang tidak bisa diberikan oleh bank, yaitu pembayaran dividen yang bukan tidak mungkin bisa melampaui jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank atas nilai investasi yang sama. Keuntungan ini juga diiringi risiko yang tidak kecil bila perusahaan sedang merugi sehingga investor tidak mendapatkan hak dividennya. Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia akan semakin penting mengingat kebutuhan dana yang diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, dengan kata lain pasar modal dibentuk untuk alasan ekonomi dan keuangan, dimana alasan ekonominya adalah untuk mempertemukan antara orang yang mempunyai uang dengan perusahaan yang memerlukan dana untuk melakukan proses produksi. Sementara alasan keuangan adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana akan membuat pihak yang mempunyai dana bebas memilih tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Kebebasan investor untuk melakukan investasi dimana saja dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko akan mengakibatkan terjadinya alokasi dana yang efisien yang selanjutnya akan membentuk pasar yang efisien.

Kemampuan pasar modal dalam melakukan intermediasi dana meningkat dengan pesat. Peranan pasar modal diharapkan akan semakin meningkat dimasa mendatang. Meski demikian pasar modal juga akan menghadapi ancaman kompetisi yang semakin ketat dalam rangka AFAS, APEC, dan WTO. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara sejak semester ke dua 1997 dapat dijadikan pelajaran yang berharga dalam menyiapkan pasar yang semakin terbuka.

**Tabel 1 Data Statistik Bursa Efek Jakarta**

	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	398.038	676.91	416.3	392.03	424.9	693.0
Jumlah Emiten	288	9	21	6	45	33
Emiten Baru	6	277	287	316	331	333
Emiten yang Dikeluarkan	-	9	21	31	22	6
Kapitalisasi Pasar	175.7	20	11	2	7	4
Volume Perdagangan ( Miliar saham)	90.6	178.5	134.5	148.4	171.2	231.8
Nilai Perdagangan (triliun Rupiah)	99.7	147.9	122.8	97.5	120.8	124.5
Jumlah Perdagangan (ribu)	3.506	4.549	4.593	3.622	3.092	2.936
Rata-rata perdagangan harian :						
Volume (juta saham)	366.9	722.6	562.9	603.2	698.8	961.7
Nilai (miliar rupiah)	403.6	598.7	513.7	396.4	492.9	516.7
Jumlah Transaksi	14.195	18.418	19.21	14.722	12.62	12.18
Penghimpun Dana dari :			7		1	4

Penawaran Perdana saham (triliun Rupiah)	1.02 5.43	0.32 132.85	2.13 16.55	1.28 4.121	1.12 7.31	6.22 4.60
Rights (triliun rupiah)	0.117	0346	0.858	0.024	0.106	0.042
Waran (triliun rupiah)	-	-	-	-	-	-
CB (triliun Rupiah)	6.57	133.51	19.54	5.42	8.54	10.86
Total Penghimpun dana (triliun rupiah)						

Sumber : Kompas, 5 Januari 2004

Kinerja pasar modal dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas Bursa Efek yang berasal dari kinerja mikro ekonomi, yaitu kinerja yang dihasilkan oleh semua perusahaan yang listing di bursa efek yang bersangkutan. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas bursa efek yang berasal dari kinerja ekonomi secara makro atau *aggregate* maupun faktor lain di luar permasalahan ekonomi seperti kondisi politik, keamanan, kepastian hukum, dan sebagainya. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dikemukakan di atas berhubungan dengan risiko yang mungkin dihadapi investor, bila menanamkan modalnya di bursa efek. Faktor-faktor risiko akan selalu dikaitkan dengan imbal hasil (*return*) yang akan diterima investor. Para investor perlu memberi perhatian terhadap risiko investasi saham dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ini dinilai oleh pihak luar sebagai negara yang mengandung risiko (*country risk*) yang signifikan bagi para investor. Berdasarkan teori Portfolio Modern, maka risiko investasi dalam saham terdiri dari dua jenis yaitu risiko sistematis (*systematic risk*) dan risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*).

Pada masa krisis faktor-faktor fundamental seperti DER, ROE, EPS, PER dan OPM diduga berpengaruh terhadap risiko sistematis Beta. Hal ini terjadi karena pada masa krisis diduga banyak perusahaan yang memiliki tingkat DER yang tinggi sementara tingkat ROE nya rendah. Pada masa krisis juga diduga banyak perusahaan yang memiliki tingkat earning per share yang rendah karena kemampuan menghasilkan laba yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini diadakan dengan menggunakan variabel-variabel yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental yang diperkirakan dapat menjelaskan risiko sistematis.

Pemodal dalam melakukan investasi akan selalu memperkirakan berapa tingkat penghasilan yang diharapkan (*expected return*) atas investasinya untuk suatu periode tertentu di masa datang. Tingkat penghasilan yang direalisasikan dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat penghasilan yang diharapkan. Ketidak pastian akan tingkat penghasilan merupakan inti dari investasi, yaitu bahwa selalu harus mempertimbangkan unsur ketidakpastian yang merupakan risiko investasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah :

- A. Seberapa besar risiko sistematis saham diwakili oleh indeks risiko saham ( $\beta_1$ ).
- B. Faktor fundamental manakah yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap risiko saham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya risiko sistematis dalam investasi saham yang diwakili oleh indeks risiko beta saham. Menganalisis pengaruh variabel-variabel *Debt to equity ratio (DER)*, *return on equity (ROE)*, *earning per share (EPS)*, *price earning ratio (PER)*, dan *operating profit margin (OPM)* terhadap risiko sistematis di Bursa Efek Jakarta. Menentukan variabel yang mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap risiko saham.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai faktor-faktor fundamental yang perlu diperhatikan investor dalam kaitannya dengan risiko sistematis. Sebagai penambah literatur, bahan kajian dan rujukan bagi pihak akademis untuk penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian yang berkaitan dengan risiko dalam investasi saham di pasar modal.

## **B. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Faktor fundamental perusahaan lebih banyak diartikan sebagai faktor-faktor internal perusahaan yang ditunjukkan dari kinerja keuangan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan ini dibutuhkan alat yaitu analisis rasio untuk mengukur kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio ini bisa dianalisa dengan membandingkan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungannya (*trend*) yang sedang terjadi atau bisa juga dengan membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak dalam bidang industri yang relatif sama pada periode tertentu.

Beaver, Kettler and Scholes (1970), telah melakukan penelitian untuk melihat sifat hubungan faktor-faktor fundamental dengan resiko sistematis ( $\beta_1$ ). Faktor-faktor fundamental yang mereka definisikan sebagai variabel akuntansi terdiri dari *asset growth*, *liquidity (Current ratio)*, *Dividend payout ratio*, *leverage (debt ratio)*, dan *earning variability*. Penelitian ini juga menggunakan sebagian variabel yang digunakan Beaver, Kettler, dan Scholes seperti *debt equity ratio*. Beberapa variabel akuntansi yang lain merujuk kepada rasio keuangan menurut Brealey dan Myers yaitu ROE, EPS, PER, dan OPM. Alasan utama dalam pemilihan rasio yang akan dianalisis ini adalah rasio yang berhubungan dan berpengaruh langsung dengan pasar maupun harga saham. Alasan lebih spesifik dari masing-masing variabel ini akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

Beta fundamental yang dihitung berdasarkan variabel-variabel fundamental seharusnya juga dapat memprediksi secara akurat Bet pasar. Beberapa studi seperti misalnya Beaver, Kettler dan Scholes (1970), Bildersee (1975), Eskew (1979), Rosenberg dan Marathe (1975), Breen

dan Lerner (1973), Gonedes (1973), Melicher (1974), Lamsana Sirait (2001), Haryanto PO (2004) meneliti Beta fundamental ini. Hasil dari studi-studi ini bervariasi. Beberapa mendukung bahwa Beta fundamental dapat digunakan untuk memprediksi Beta pasar di masa depan dan beberapa yang tidak mendukung.

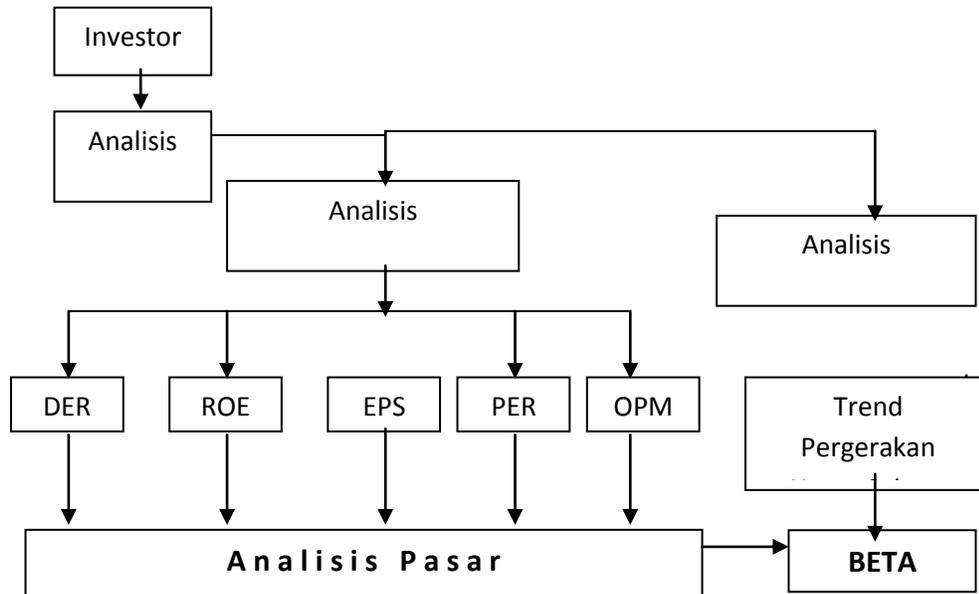
*Debt Equity ratio* (DER) merupakan perbandingan hutang jangka panjang, semakin besar DER akan mengakibatkan resiko perusahaan menjadi panjang dengan ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan semakin tinggi. Jadi penggunaan hutang yang semakin tinggi akan mengakibatkan semakin tingginya resiko untuk tidak terbayar dan juga mengakibatkan resiko pendapatan yang semakin tinggi, sehingga semakin tingginya DER akan mengakibatkan semakin tingginya resiko yang akan dihadapi perusahaan. Mengingat investor biasanya selalu menghindari risiko maka semakin tinggi DER akan mengakibatkan semakin dihindari saham tersebut, sehingga harga saham akan semakin rendah.

Penggunaan variabel ROE untuk melihat pengaruhnya terhadap risiko sistematis tidak berkaitan langsung dengan return saham dalam perhitungan beta. ROE dalam hal ini data akuntansi yang diperoleh dari neraca dan daftar laba/rugi perusahaan. Sedangkan return saham dalam perhitungan beta yang menggunakan *single index model* adalah benar-benar data pasar yaitu perbandingan *daily closing price* dengan *daily crossing price* hari sebelumnya dari masing-masing saham dibagi dengan *daily closing price* hari sebelumnya. ROE menerangkan laba bersih yang dihasilkan untuk setiap *equity*, semakin besar ROE menunjukkan perusahaan semakin baik dalam mensejahterakan para pemegang saham. Para investor dalam menentukan pilihannya biasanya akan mempertimbangkan perusahaan yang bisa memberikan kontribusi ROE yang lebih besar, karena semakin besarnya ROE juga berarti semakin baik kinerja fundamental perusahaan tersebut dan akhirnya akan memberikan *return* yang lebih besar pada pemegang saham. Bagi investor semakin tinggi ROE menunjukkan bahwa risiko investasi kecil. Biasanya calon investor akan mempertimbangkan tingkat ROE yang dihasilkan perusahaan, jadi ROE yang rendah menunjukkan tingkat risiko investasi yang tinggi.

EPS menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih per lembar saham. EPS ini merupakan turunan dari ROE, dengan semakin besarnya EPS perusahaan juga akan menunjukkan bahwa kinerja fundamental perusahaan yang positif, semakin tinggi EPS akan mengakibatkan tingkat risiko yang kecil yang akhirnya saham perusahaan tersebut semakin diminati investor. PER menjelaskan perbandingan harga per lembar saham dengan EPS, semakin tinggi PER menunjukkan harga saham yang semakin baik, atau sebaliknya menunjukkan EPS yang menurun, namun, semakin tingginya PER ini tetap menunjukkan bahwa harga saham tersebut lebih baik, karena walaupun EPS semakin kecil sehingga PER naik, hal ini menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap

perusahaan, sehingga perusahaan tetap diminati. Dengan kata lain PER yang tinggi bisa menunjukkan risiko yang rendah.

**Gambar 1 Diagram Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah :

- H<sub>1</sub> = Variabel-variabel fundamental keuangan perusahaan seperti DER, ROE, EPS, PER, dan OPM secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap risiko sistematis ( $\beta$ ).
- H<sub>2</sub> = Variabel DER secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap risiko sistematis ( $\beta$ ).
- H<sub>3</sub> = Variabel ROE secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap risiko sistematis ( $\beta$ ).
- H<sub>4</sub> = Variabel EPS secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap risiko sistematis ( $\beta$ ).
- H<sub>5</sub> = Variabel PER secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap risiko sistematis.
- H<sub>6</sub> = Variabel OPM secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap risiko sistematis ( $\beta$ ).

## C. DESAIN PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan analisis deskriptif yaitu dengan menginterpretasikan data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam kurun waktu penelitian sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, akan dilihat pengaruh variabel-variabel fundamental perusahaan yang terdiri dari DER, ROE, EPS, PER, dan OPM terhadap resiko pasar atau beta saham untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, diharapkan investor dapat memperoleh pengetahuan atau masalah yang banyak dihadapi dalam menentukan tingkat risiko, *return* maupun harga saham sehingga investor bisa lebih selektif dalam memilih saham yang akan dibeli.

### 2. Penentuan Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan metode *probability sampling*. Metode ini merupakan tipe pemilihan sampel secara acak dengan menggunakan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan yang telah *go public* dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
- b. Perusahaan-perusahaan tersebut telah listing sebelum tahun 1998 sehingga perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan selama 1998—2002 dan tidak *delisting*.
- c. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang mempunyai *trading day* yang lebih dari 145 hari.
- d. Data mengenai laporan keuangan, harga saham, dan hari perdagangan, tersedia di Bursa Efek Jakarta.

### 3. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berikut ini merupakan bentuk operasionalisasi dari variabel penelitian

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian**

Variabel	Konsep variabel	Indikator
<i>Debt to Equity Ratio (DER)</i>	Menggambarkan proporsi modal sendiri yang bisa menutup pinjaman pihak ketiga	Total hutang jangka panjang dibagi equity
<i>Return On Equity (ROE)</i>	Menggambarkan kemampuan modal sendiri menghasilkan keuntungan yang tersedia	Laba bersih dibagi <i>equity</i>

	bagi pemegang saham	
<i>Earnings per Share (EPS)</i>	Menunjukkan jumlah pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar	Laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar
<i>Price earnings ratio (PER)</i>	Merupakan perbandingan harga pasar dari setiap lembar saham terhadap earnings	Harga pasar perlembar saham dibagi dengan EPS
<i>Operating Profit Margin (OPM)</i>	Mengukur Profitabilitas perusahaan	Laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan
<i>Resiko Pasar (<math>\beta</math>)</i>	Risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi	Kovarian return saham dengan market return dibagi varians <i>saham market return</i> atau koefisien regresi dari single model

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang akan diteliti diambil dari populasi perusahaan yang telah go publik dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan sahamnya aktif diperdagangkan di BEJ pada tahun 1998, 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002.

#### 5. Metode Analisis

Variabel dependen diambil dari Indonesian *Capital Market Directory (ICMD, 2000, 2003)* yang dipublikasikan. Variabel independen yang berasal dari Indonesian Securities Market Data Base (ISMD 2.0) Universitas Gajah Mada. Analisis risiko sistematis dilakukan usaha untuk mengolah data harga saham untuk dijadikan sebagai return saham yang bersangkutan. Risiko sistematis dihitung menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan *return* saham dan *market return* masa lalu. Langkah pertama adalah menghitung tingkat *return* setiap saham ( $R_{it}$ ) dan tingkat *market return* ( $R_{mt}$ ) pada periode t. Untuk memperoleh *return* dari saham dihitung menggunakan formula (Harnanto, 1998) :

$$Return = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Keterangan:

$P_t$  = Harga saham sekarang (periode t)

$P_{t-1}$  = Harga saham periode lalu (periode t-1)

Dengan cara yang sama, tingkat pengembalian pasar (rate of market return). Jika digunakan IHSG adalah :

$$R_{mt} = \frac{IHSG_t - IHSG_{t-1}}{IHSG_{t-1}}$$

$R_{mt}$  = Return pasar untuk periode t

$IHSG_t$  = merupakan indeks pasar periode t

$IHSG_{t-1}$  = merupakan indeks pasar periode t-1

Langkah selanjutnya adalah menghitung resiko sistematis dari setiap saham. Estimasi dari resiko sistematis atau beta dapat dihitung dengan menggunakan model indeks tunggal, dinyatakan dengan :

$$R_i = \alpha_i + \beta_i R_m + e_i$$

Beta ( $\beta_i$ ) merupakan koefisien regresi dari  $R_m$  dari persamaan *single indeks model*, sehingga dengan menggunakan analisis regresi maka persamaan regresi tersebut dapat dihitung digunakan untuk menghitung koefisien regresi yang tidak lain merupakan indeks resiko sistematis yaitu (Elton & Grubber: 1995,139).

$$\beta_i = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} = \frac{\sum_{t=1}^N [(R_{it} - \bar{R}_{it})(R_{mt} - \bar{R}_{mt})]}{\sum_{t=1}^N [(R_{mt} - \bar{R}_{mt})^2]}$$

Keterangan:

$\sigma_{im}$  : kovarian antara selisih return saham i dan rata-rata return saham i dengan selisih market return dengan rata-rata market return.

$\sigma_{im}^2$  : varian antara selisih market return dengan rata-rata market return.

## 6. Model yang akan digunakan

Menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Seperti sudah dijelaskan dimuka bahwa variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah beta

saham sebagai variabel dependen akan dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari *Debt equity ratio, return on equity, earning per share, price earning ratio dan operating profit margin.*

Model yang bisa dibentuk dari variabel diatas adalah model multiple regresi yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\beta_t = b_0 + b_1 \text{DER} + b_2 \text{ROE} + b_3 \text{EPS} + b_4 \text{PER} + b_5 \text{OPM} + e_t$$

Keterangan :

$\beta_t$  = Indeks dari risiko sistematis atau beta saham ( $\beta$ ) yang diperoleh secara signifikan pada tahun t

$b_0$  = Konstanta

$b_1$ — $b_5$  = Koefisien regresi

DER = Debt to equity ratio

ROE = Return on equity

EPS = Earnings per share

PER = Price earnings ratio

OPM = Operating profit margin

$E_t$  = Error term

## 7. Pengujian Asumsi Model Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda yang dihasilkan merupakan model regresi yang menghasilkan estimator yang baik jika dipenuhi asumsi regresi yang sangat berpengaruh terhadap pola perubahan variabel dependen. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikoloniaritas dan uji autokorelasi.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Data dan Hasil Penelitian

Objek penelitian diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 2002. Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh variabel DER, ROE, EPS, PER, dan OPM terhadap variabel beta, maka selain melihat hubungan semua variabel secara bersama-sama, juga akan dilihat dan dibandingkan dengan analisa pengaruh dari semua variabel secara parsial. Sehingga dapat

terlihat variabel independen dimana yang paling dominan memiliki hubungan dengan resiko pasar.

## 2. Hasil Perhitungan dan Analisis Deskriptif

Hasil perhitungan untuk nilai variabel-variabel independen dan variabel dependen untuk tahun 1998, tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002 dan gabungan tahun 1998-2002 tampak dalam Tabel 3 sampai dengan Tabel 8.

**Tabel 3. Data Beta Saham, DER, ROE, EPS, PER, DAN OPM, Tahun 1998**

PERIODE	VARIABEL	TERENDAH		TERTINGGI		RATA-RATA	DEVIASI
		RASIO	PERUSH	RASIO	PERUSH		
1998	$\beta$	1.85	SSIA	3.28	SIPD	2,6404	0.2582
	DER	-2,475	BNBR	157,68	KLBF	5,1756	20.2123
	ROE	-200,43	ASII	1,49	GDWU	-5,3879	26.3175
	EPS	-11,475	BDMN	4,348	SMGR	-604.41	2272.37
	PER	-381,74	BUDI	52,79	INTA	-3.76	50.27
	OPM	-0,95	CMNP	0,65	LSIP	0.1081	0.3009

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory 2000, 2003*

Dalam Tabel 3. diketahui bahwa rata-rata nilai beta tahun 1998, adalah 2,6404, dengan deviasi 0,2582. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa pada tahun 1998 nilai dari beta yang tertinggi dimiliki oleh Sierad Produce Tbk, yaitu sebesar 3,28 nilai terendah oleh Surya Semesta Internusa Tbk sebesar 1,85. Rata-rata nilai DER, tahun 1998, sebesar 5,1756 kali dengan deviasi sebesar 20,2123 kali. Nilai DER tertinggi dimiliki oleh Kalbe Farma, yaitu sebesar 157,68 kali dan terendah dimiliki oleh Bakrie & Brothers sebesar -24,57 kali.

Rata-rata nilai ROE, pada tahun 1998, adalah sebesar -5,3879 kali dengan deviasi sebesar 26,3175 kali. Nilai ROE yang tertinggi dimiliki oleh Kasogi International, yaitu sebesar 1,49 kali dan yang terendah dimiliki oleh Astra International sebesar -200,43 kali. Rata-rata nilai EPS, tahun 1998, Rp. -604,41,-/saham dengan deviasi Rp. 2272,37/saham. Nilai EPS tertinggi dimiliki Semen Gresik yaitu Rp. 4.348,-/saham dan terendah dimiliki oleh Bank Danamon Rp, - 11.475,-/saham.

Rata-rata nilai PER, dari perusahaan yang menjadi objek perusahaan pada tahun 1998, adalah sebesar 3.7556 kali dengan deviasi sebesar 50.2715 kali. Nilai PER yang tertinggi dimiliki oleh Intraco Penta yaitu sebesar 52.79 kali dan terendah dimiliki oleh Budi Acid Jaya sebesar -381.74 kali. Rata-rata nilai OPM, pada tahun 1998, adalah sebesar 0.1081 kali dengan deviasi sebesar 0.3009 kali. Nilai OPM yang tertinggi dimiliki oleh PP London Sumatera, yaitu sebesar 0,65 kali dan yang terendah dimiliki oleh Citra Marga Nusaphala Persada sebesar -0,95 kali.

**Tabel 4. Data Beta Saham, DER, ROE, EPS, PER, DAN OPM, Tahun 1999**

PERIODE	VARIABEL	TERENDAH		TERTINGGI		RATA-RATA	DEVIASI
		RASIO	PERUSH	RASIO	PERUSH		
1999	B	2,26	DILD	3,84	MDRN	2,9729	0,3474
	DER	-996,24	BBNI	110,14	MLIA	2,2506	22.2458
	ROE	-78	BNGA	9,08	CPIN	-1,2450	9,9655
	EPS	-3,031	BBNI	4.618	SMGR	195,9344	905,1250
	PER	-3,665	UNSP	200,357	MLPL	65,0090	284,1250
	OPM	-1,82	JIHD	0,50	LSIP	0,0903	1.3077

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory 2000*

Dalam Tabel 4. diketahui bahwa rata-rata nilai beta dari saham perusahaan yang menjadi objek penelitian pada tahun 1999, adalah 2,9729, dengan deviasi sebesar 0,3474. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa pada tahun 1999 nilai dari beta (risiko) yang tertinggi dimiliki oleh Modern Photo Tbk, yaitu sebesar 3,84. dan nilai terendah dimiliki oleh Dharmala Intiland Tbk yaitu sebesar 2.26. Rata-rata nilai DER, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 1999, adalah sebesar 2,2506 kali dengan deviasi sebesar 22,2458 kali. Nilai DER yang tertinggi dimiliki oleh Mulia Industrindo, yaitu sebesar 110,14 kali dan yang terendah dimiliki oleh Bank Negara Indonesia sebesar -996,24 kali.

Rata-rata nilai ROE, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 1999, adalah sebesar -1,2450 kali dengan deviasi sebesar 9,9655 kali. Nilai ROE yang tertinggi dimiliki oleh Charoen Phokphand Indonesia, yaitu sebesar 9,08 kali dan yang terendah dimiliki oleh Bank Niaga sebesar -78 kali. Rata-rata nilai EPS, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 1999, adalah sebesar Rp. 195,9344,-/saham dengan deviasi sebesar Rp. 905,1250,-/saham.

Nilai EPS yang tertinggi dimiliki oleh Semen Gresik, yaitu sebesar Rp. 4618,-/saham dan yang terendah dimiliki oleh BNI sebesar Rp, - 3.031,-/saham. .

Rata-rata nilai PER, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 1999, adalah sebesar 65,0090 kali dengan deviasi sebesar 284,1250 kali. Nilai PER tertinggi dimiliki oleh Multipolar, yaitu sebesar 200.357 kali dan terendah dimiliki oleh Bakrie Sumatera Plantations sebesar -3.665 kali. Rata-rata nilai OPM, dari perusahaan yang menjadi objek tahun 1999, adalah sebesar 0,0903 kali dengan deviasi 1,3077 kali. Nilai OPM tertinggi dimiliki PP London Sumatera, sebesar 0,50 kali dan terendah dimiliki oleh Jakarta Int. Hotel & Dev. sebesar -1,82 kali.

**Tabel 5. Data Beta Saham, DER, ROE, EPS, PER, DAN OPM,  
Yang Sudah diolah dan Siap Dianalisis Lebih Lanjut untuk Tahun 2000**

PERIODE	VARIABEL	TERENDAH		TERTINGGI		RATA-RATA	DEVIASI
		RASIO	PERUSH	RASIO	PERUSH		
2000	B	1,92	SIPD	3,40	POLY	2,6907	0,2973
	DER	-145,55	DILD	64,86	UNSP	1,5023	21.4047
	ROE	-19,11	DILD	0,49	CPIN	-0,8018	2,9990
	EPS	-13,156	KIJA	1.586	ISAT	-	1709,8699
	PER	-44,39	KLBF	122,79	ESTI	8,6902	27,5906
	OPM	-1,36	JHHD	0,66	ELTY	0,1398	0,2453

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory 2000, 2003*

Dalam Tabel 5. Rata-rata nilai beta dari saham perusahaan yang menjadi objek penelitian tahun 2000, adalah 2,6907, dengan deviasi 0,2973. Hasil perhitungan tahun 2000 nilai dari beta tertinggi dimiliki Polysindo Eka Perkasa Tbk, yaitu sebesar 3,40. dan nilai terendah dimiliki oleh Sierad Produce Tbk yaitu 1,92. Rata-rata nilai DER dari objek penelitian tahun 2000, sebesar 1,5023 kali dengan deviasi 21,4047 kali. Nilai DER tertinggi dimiliki Bakrie Sumatera Plantations, 64,86 kali dan terendah dimiliki oleh Dharmala Intiland sebesar -145,55 kali.

Rata-rata nilai EPS, tahun 2000, sebesar Rp. -263,8308,-/saham dengan deviasi sebesar Rp. 1.709,8699,-/saham. Nilai EPS tertinggi dimiliki oleh Indosat, yaitu Rp. 1.586,-/saham dan terendah dimiliki oleh Kawasan Industri Jababeka sebesar Rp. -13.156,-/saham. Nilai PER tahun 2000, adalah 8,6902 kali dengan deviasi 27,5906 kali. Nilai PER tertinggi dimiliki oleh Ever Shine Textile Industry, yaitu sebesar 122.79 kali dan terendah dimiliki oleh Kalbe Farma sebesar -44.39 kali. Rata-rata nilai OPM, tahun 2000, sebesar 0,1398 kali dengan deviasi sebesar 0,2453 kali. Nilai OPM tertinggi dimiliki Bakrieland Development, sebesar 0,66 kali yang terendah dimiliki Jakarta Int. Hotel & Dev. sebesar -1,36 kali.

**Tabel 6. Data Beta Saham, DER, ROE, EPS, PER, DAN OPM  
(Data Diolah Tahun 2001)**

PERIODE	VARIABEL	TERENDAH		TERTINGGI		RATA-RATA	DEVIASI
		RASIO	PERUSH	RASIO	PERUSH		
2001	B	1,0011031	GDWU	2,06	SONA	1,4405	0,2421

DER	-26,76	GJTL	32,91	SIPD	1,4713	7,9675
ROE	-7,76	BRPT	4,05	SOBI	-0,1083	1,1850
EPS	1.078	BRPT	5.019	SOBI	-157,8030	712,6520
PER	-13,290	DVLA	13,798	BDMN	6,8602	30,9837
OPM	-0,88	JIHD	0,66	BMTR	0,1267	0,2065

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory* 2000, 2003

Dalam Tabel 6. rata-rata nilai beta dari saham perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2001, adalah 1,4405, deviasi 0,2421. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2001 nilai dari beta (risiko tertinggi dimiliki oleh Sona Topas Tourism Industry, yaitu sebesar 2,06. dan nilai terendah dimiliki oleh Kasogi International Tbk yaitu sebesar 1,00. Rata-rata nilai DER, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2001, adalah sebesar 1,4713 kali dengan deviasi sebesar 7,9675 kali. Nilai DER tertinggi dimiliki oleh Sierad Produce, yaitu sebesar 32,91 kali dan terendah dimiliki oleh Gajah Tunggal sebesar -26,76 kali. Rata-rata nilai ROE, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2001, adalah sebesar -0,1083 kali dengan deviasi sebesar 1,1850 kali. Nilai ROE yang tertinggi dimiliki oleh Sorini Corporation Tbk, yaitu sebesar 4,05 kali dan yang terendah dimiliki oleh Sierad Produce sebesar -7,76 kali.

Rata-rata nilai EPS, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2001, adalah Rp. - 157,8030,-/saham dengan deviasi Rp. 712,6520,-/saham. Nilai EPS tertinggi dimiliki oleh Sorini Corporation, yaitu sebesar Rp. 5.019,-/saham dan terendah dimiliki oleh Barito Pasific Timber sebesar Rp. - 1.078,-/saham. Rata-rata nilai PER, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2001, adalah sebesar 6,8602 kali dengan deviasi sebesar 30,9837 kali. Nilai PER tertinggi dimiliki oleh Bank Danamon, yaitu sebesar 13.798 kali dan terendah dimiliki oleh Darya Varia Laboratoria sebesar -13.290 kali.

Rata-rata nilai OPM, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2001, adalah sebesar 0,1267 kali dengan deviasi sebesar 0,2065 kali. Nilai OPM tertinggi dimiliki oleh Bimantara Citra, yaitu sebesar 0,66 kali dan terendah dimiliki oleh Jakarta Int. Hotel & Dev. sebesar - 0,88 kali. Rata-rata nilai beta dari saham perusahaan tahun 2002, adalah 2,7257, dengan deviasi sebesar 0,3852. Hasil perhitungan Tabel 6 menunjukkan tahun 2002 nilai dari beta tertinggi dimiliki oleh Bank International Indonesia sebesar 4,63. dan nilai terendah dimiliki Bakrie & Brothers Tbk sebesar 1,31. Rata-rata nilai DER, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2002, adalah sebesar 1,3245 kali dengan deviasi sebesar 26,5998 kali. Nilai DER tertinggi dimiliki oleh Ciputra Development sebesar 58,88 kali dan terendah dimiliki oleh Dharmala Intiland sebesar -193,04 kali.

Rata-rata nilai ROE, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2002 sebesar 0,3154 kali dengan deviasi sebesar 2,4409 kali. Nilai ROE tertinggi dimiliki oleh Dharmala Intiland, yaitu sebesar 12,02 kali dan terendah dimiliki oleh Gajah Tunggal sebesar -8,31 kali. Rata-

rata nilai EPS, dari perusahaan yang menjadi objek tahun 2002, sebesar Rp. 209,4573/saham dengan deviasi Rp. 310,3974,-/saham. Nilai EPS tertinggi dimiliki oleh Astra International, yaitu sebesar Rp. 1.394,-/saham dan terendah dimiliki oleh Tjiwi Kimia sebesar Rp, - 88,-/saham. Rata-rata nilai PER, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2002, adalah sebesar 17,8677 kali dengan deviasi sebesar 61,5612 kali. Nilai PER tertinggi dimiliki oleh Ever Shine Textile Industry, yaitu 405,26 kali dan terendah dimiliki oleh Lippo Bank sebesar -16,66 kali. Rata-rata nilai OPM, dari perusahaan yang menjadi objek pada tahun 2002, adalah sebesar 0,0991 kali dengan deviasi sebesar 0,2383 kali. Nilai OPM tertinggi dimiliki Telekomunikasi Indonesia, sebesar 0,44 kali dan terendah dimiliki oleh Jakarta Int. Hotel & Dev. sebesar -1,55 kali.

**Tabel 7. Data Beta Saham, DER, ROE, EPS, PER, DAN OPM,  
Data Diolah Tahun 1998 -- 2002**

PERIODE	VARIABEL	TERENDAH		TERTINGGI		RATA-RATA	DEVIASI
		RASIO	PERUSH	RASIO	PERUSH		
98—2002	$\beta$	2,10	BNBR	2,99	BNII	2,49	0,15
	DER	-67,90	DILD	36,87	KLBF	2,34	11,36
	ROE	-39,79	ASII	1,71	CPIN	-1,4455	6,0166
	EPS	-2.609,20	BBNI	2.106,40	SMGR	-61,01	699,13
	PER	-73,34	BUDI	405,33	MLPL	18,93	59,40
	OPM	-1,17	JIHD	0,44	MEDC	0,11	0,21

Sumber : *Indonesian Capital Market Directory 2000, 2003.*

Dalam Tabel 7. rata-rata nilai beta saham dari objek penelitian tahun 1998-2002, adalah 2,49, dengan deviasi sebesar 0,15. Hasil perhitungan menunjukkan nilai dari beta (risiko) yang tertinggi dimiliki Bank International Indonesia 2,99. dan nilai terendah dimiliki oleh Bakrie & Brothers Tbk sebesar 2,10. Rata-rata nilai DER, perusahaan yang menjadi objek pada tahun 1998-2002, sebesar 2,34 kali deviasi sebesar 11,36 kali. Nilai DER tertinggi dimiliki oleh Kalbe Farma, yaitu sebesar 36,87 kali dan terendah dimiliki oleh Dharmala Intiland sebesar -67,90 kali. Rata-rata nilai ROE pada tahun 1998-2002, adalah sebesar -1,4455 kali dengan deviasi sebesar 6,0166 kali. Nilai ROE yang tertinggi dimiliki oleh Charoen Phokphand Indonesia, yaitu sebesar 1,71 kali dan yang terendah dimiliki oleh Astra International sebesar -39,79 kali.

Rata-rata nilai EPS, pada tahun 1998-2002, sebesar Rp. -61,01,-/saham Nilai EPS yang tertinggi dimiliki oleh Semen Gresik, yaitu sebesar Rp. 2.106,40,-/saham dan yang terendah dimiliki oleh Bank Negara Indonesia Rp, - 2.609,20,-/saham. Rata-rata nilai PER pada tahun 1998-2002, adalah 18,93 kali dengan deviasi sebesar 59,40 kali. Nilai PER tertinggi dimiliki Multipolar, sebesar 405.35 kali dan terendah dimiliki Budi Acid Jaya sebesar -73,34 kali. Rata-rata nilai OPM, tahun 1998-2002, sebesar 0,11 kali dengan deviasi sebesar 0,21 kali.

### **3. Hasil Perhitungan dan Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dugaan adanya pengaruh linier dari variabel independen yang terdiri dari *DER, ROE, Earning Per Share, PER, dan OPM*, dengan variabel dependen yaitu risiko sistematis (beta).

**Tabel 8. Persamaan Regresi Berganda**

$\beta$	a	b <sub>1</sub> (DER)	b <sub>2</sub> (ROE)	b <sub>3</sub> (EPS)	b <sub>4</sub> (PER)	b <sub>5</sub> (OPM)
B <sub>98</sub>	2,641	0,001	0,001	0,00001	0,001	0,044
B <sub>99</sub>	3,019	0,00	-0,001	-0,00001	0,0011031	-0,407
B <sub>00</sub>	2,643	0,001	-0,025	-0,000012	0,001	0,104
B <sub>01</sub>	1,418	0,005	-0,002	0,000026	0,002	0,002
B <sub>02</sub>	2,741	0,00007	-0,006	0,000022	0,0011031	-0,109
<b>B<sub>98-02</sub></b>	<b>2,501</b>	<b>0,000025</b>	<b>-0,00003</b>	<b>-0,00003</b>	<b>-0,000003</b>	<b>-0,001</b>

#### 4. Hasil Uji Pendahuluan

Hasil uji pendahuluan menggunakan alat uji normalitas, memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan mengamati sebaran titik-titik yang tersebar pada Scatter Plot regresi seperti tercantum dalam lampiran Menunjukkan sebaran titik-titik berada diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji pendahuluan dengan menggunakan alat uji multikolinieritas, menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan VIF yang lebih kecil dari 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. (Singgih, 1999). Hasil uji pendahuluan dengan menggunakan alat uji autokorelasi, menunjukkan bahwa model ini tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.

#### 5. Hasil Uji Regresi

Pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F statistik, menunjukkan bahwa seluruh periode F hitung nya lebih kecil dari F tabel, sehingga Ho diterima, Ha ditolak, yang berarti variabel-variabel fundamental keuangan perusahaan seperti DER, ROE, EPS, PER, OPM , secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap risiko sistematis (beta).

Kesimpulan uji parsial menunjukkan variabel DER, ROE, EPS, PER dan OPM, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel risiko sistematis (beta) kecuali variabel OPM pada tahun 1999 yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap risiko sistematis ( $\beta$ ). Hasil ini mendukung penelitian Haryanto (2004) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari faktor-faktor fundamental terhadap risiko sistematis. Hal ini bisa terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut :

1. Periode penelitian yang dilakukan masih dalam masa krisis stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan yang tidak menentu, sehingga kinerja perusahaan tidak dalam kondisi normal atau wajar.
2. Banyaknya perusahaan yang melakukan *window dressing* dengan mengadakan perataan laba sehingga rasio keuangan perusahaan tidak menggambarkan yang sesungguhnya.
3. Adanya variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap variabel risiko sistematis.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh faktor-faktor fundamental (DER, ROE, EPS, PER, OPM) terhadap risiko sistematis (beta) pada 64 perusahaan yang terdaftar di BEJ selama periode 1998—2002, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor fundamental, (DER, ROE, EPS, PER, OPM) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko sistematis (beta).
2. Faktor-faktor fundamental, (DER, ROE, EPS, PER, OPM) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap risiko sistematis (beta), kecuali pada tahun 1999, OPM berpengaruh secara signifikan terhadap risiko sistematis.
3. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi faktor-faktor fundamental terhadap risiko sistematis (beta), baik secara bersama atau secara parsial sangatlah kecil.
4. Hampir seluruh perusahaan yang diteliti mempunyai nilai risiko sistematis (beta) lebih besar dari 1 yang berarti, tergolong saham yang agresif dan lebih peka sehingga mempunyai risiko yang sangat tinggi.

### 2. Saran

1. Investor yang melakukan investasi dalam bentuk saham hendaknya, selain memperhatikan *return* yang diharapkan perlu juga tetap memperhatikan risiko sistematis (beta) yang tidak dapat didiversifikasikan, walaupun dalam penelitian ini ternyata faktor-faktor fundamental tidak berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta).
2. Periode penelitian sebaiknya dilakukan pada kondisi yang normal, sehingga dapat diperbandingkan hasilnya yang lebih baik dan dalam jangka waktu yang lebih lama sehingga dapat diperbandingkan.
3. Dalam analisis faktor-faktor fundamental keuangan perusahaan disarankan untuk menyertakan variabel lain seperti pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan, tingkat bunga, tingkat inflasi dan variabel makro ekonomi lainnya, karena hasil penelitian ini hanya menjelaskan proporsi yang kecil, yang berpengaruh terhadap risiko sistematis (beta).

## DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 1995. *Pengantar Pasar Modal*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

- Beaver, P.Kettler, dan M. Scholes. The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures. *Accounting Review* 45. (October 1970). Hal 654-682.
- Bildersee, J.S. The Association Between Market Determined Measure of Risk and Alternative Measure of risk. *Accounting Review* 50 (January 1975).
- Brealey, Richard.A, - Steward C. Myers. 1998. *Fundamental of Corporate Finance*. Fifth Edition. Mc Graw Hill. New York.
- Elton, Edwin J. and Gruber, Martin J. 1995. *Modern Portfolio Theory and Investment Analysis*. 5<sup>th</sup> Edition. New York. Jhon Wiley & Sons. Inc.
- Gitman, Lawrence J. 2000. *Principles of Managerial Finance*. 9<sup>th</sup> Edition. USA.
- Hargitay, Stephen E, and Ming Yu Shi. 1993. *Investment Decision – A Quantitative Approach*. London. E&FN Spon.
- Hartono, Jogiyanto. 2000. *Teori Portfoliodan Analisis Investasi*. Edisi ke-2. BPFE. Yogyakarta.
- Helfert, A Erich. 1997. *Teknik Analisis Keuangan*. Edisi Kedelapan. Alih Bahasa. Herman Wibowo. Penerbit Airlangga. Jakarta. Indonesia.
- Husnan, Suad. 1994. *Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisa Sekuritas*. Edisi kedua. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Institute for Economic and Financial Research. 2003. *Indonesia Capital Market Directory 2000*. Prasetio Utomo.
- Kasali, Rhenald. 2001. *Membidik Pasar Indonesia, Segmentasi, Targeting, Positioning*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Keown, Arthur J. Scott, David F, JR, Martin, John D,, Petty, J. William. 1996. *Basic Financial Management*. 7<sup>th</sup> New York. Prentice Hall. Inc.
- Megginson, L.William. 1997. *Corporate Finance Theory*. 1<sup>st</sup> edition. Addison-Wesley Educational Publisher Inc.
- Munawir, S. 1997. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- P. O., Haryanto. 2004. *Pengaruh Operating And Financial Leverage Terhadap Risiko Sistematis pada Beberapa Perusahaan Unggulan di Bursa Efek Jakarta Periode 1998—2001*.
- Santoso, Singgih. *SPSS/Statistical Product and Service Solution*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sembel, Roy. 2001. *Berfikir Ekonomis di Masa Krisis*. Edisi Pertama. Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Trihendradi, Cornelius. 2004. *Langkah Mudah Memecahkan Kasus Statistik. Deskriptif, Parametrik dan non Parametrik dengan SPSS 12*. Edisi Pertama. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Van Horne, James. 1986. *A Financial Management and Policy*. 7<sup>th</sup> edition. New York. Prentice Hall International.
- Tandellilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.

### Lampiran 1. Emiten Yang Menjadi Objek Penelitian

<b>NO</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>KODE</b>	<b>BIDANG USAHA</b>
1	Asahimas Flat Glass	AMFG	<i>Plastics and Glass Products</i>
2	Astra Internasional Tbk	ASII	<i>Automotive and Allied Products</i>
3	Bakrie & Brothers	BNBR	<i> Holding and Other Investment Company</i>
4	Bakrie Sumatra Plantations Tbk	UNSP	<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>
5	Bakrieland Development Tbk	ELTY	<i>Real Estate and Property</i>
6	Bank Danamon	BDMN	<i>Banking,</i>
7	Bank Internasional Indonesia	BNII	<i>Banking,</i>
8	Bank Negara Indonesia Tbk	BBNI	<i>Banking,</i>
9	Bank Niaga Tbk	BNGA	<i>Banking,</i>
10	Barito Pasific Timber	BRPT	<i>Lumber and Wood Products</i>
11	Berlian Laju Tanker	BLTA	<i>Transportation Services</i>
12	Bhuwanatala Indah Permai	BIPP	<i>Real Estate and Property</i>
13	Bimantara Citra	BMTR	<i> Holding and Other Investment company</i>
14	Budi Acid Jaya	BUDI	<i>Chemical and Allied Products</i>
15	Charoen Pokphand Indonesia	CPIN	<i>Animal Feed and Husbandry</i>
16	Ciputra Development Tbk	CTRA	<i>Real Estate and Property</i>
17	Citra Marga Nusaphala Persada	CMNP	<i>Others</i>
18	Darya Varia Laboratoria Tbk	DVLA	<i>Pharmaceuticals</i>
19	Dharmala Intiland Tbk	DILD	<i>Real Estate and Property</i>
20	Duta Pertiwi	DPNS	<i>Real Estate and Property</i>
21	Dynaplast Tbk	DYNA	<i>Plastics and Glass Products</i>

22	Enseval Putra Megatrading Tbk	EPMT	<i>Whole Sale and Retail Trade</i>
23	Ever Shine textile industry	ESTI	<i>Apparel and Other textile Products</i>
24	Gajah Tunggal Tbk	GJTL	<i>Automotive and Allied Products</i>
25	GT Kabel Indonesia Tbk	KBLI	<i>Cable</i>
26	Gudang Garam	GGRM	<i>Tobacco manufacturers</i>
27	HM Sampoerna	HMSP	Tobacco Manufacturers
28	Hero Supermarket	HERO	Whole Sale and Retail Trade
29	Indocement Tunggal Perkasa	INTP	Cement
30	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	Manufacturing
31	Indorama Syntetics	INDR	<i>Apparel and Other textile Products</i>
32	Indosat Tbk	ISAT	<i>Communication</i>
33	Intan Wijaya Chemical Industry	INCI	<i>Adhesive</i>
34	Intraco Penta	INTA	<i>Automotive and Allied Products</i>
35	Jakarta Int. Hotel &Dev.	JIHD	<i>Real Estate and Property</i>
36	Kalbe Farma	KLBF	<i>Pharmaceuticals</i>
37	Kasogi Internasional Tbk	GDWU	<i>Apparel and Other textile Products</i>
38	Kawasan Industri Jababeka	KIJA	<i>Real Estate and Property</i>
39	Kedawung Setia Industrial Tbk	KDSI	<i>Fabricated Metal Products</i>
40	Komatsu Indonesia	KOMI	<i>Machinery</i>
41	Lippo Bank	LPBN	<i>Banking</i>
42	Matahari Putra Prima Tbk	MPPA	<i>Whole Sale and Retail Trade</i>
43	Mayora Indah	MYOR	<i>Manufacturing</i>
44	Medco Energi Corporation	MEDC	<i>Mining ang mining services</i>
45	Mitra Rajasa	MIRA	<i>Transportation Services</i>

46	Modern Photo Tbk	MDRN	<i>Photographic Equipment</i>
47	Mulia Industrindo	MLIA	<i>Stone, Clay, Glass and Concrete Products</i>
48	Multipolar	MLPL	<i>Electronic and Office Equipment</i>
49	Petrosea	PTRO	<i>Construction</i>
50	Polysindo Eka Perkasa Tbk	POLY	<i>Chemical and Allied Products</i>
51	PP London Sumatera Tbk	LSIP	<i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>
52	Ramayana Lestari Sentosa Tbk	RALS	<i>Whole Sale and Retail Trade</i>
53	Semen Gresik	SMGR	<i>Cement</i>
54	Sierad Produce Tbk	SIPD	<i>Manufacturing</i>
55	Sona Topas Tourism Industry	SONA	<i>Hotel and Travel Services</i>
56	Sorini Corporation	SOBI	<i>Chemical and Allied Products</i>
57	Suparma Tbk	SPMA	<i>Paper and Allied Products</i>
58	Surya Semesta Internusa Tbk	SSIA	<i>Real Estate and Property</i>
59	Tambang Timah (Persero)	TINS	<i>Mining and mining services</i>
60	Tempo Scan Pasific	TSPC	<i>Pharmaceuticals</i>
61	Telekomunikasi Indonesia	TLKM	<i>Communication</i>
62	Tjiwi Kimia	TKIM	<i>Paper and Allied Products</i>
63	Trias Sentosa	TRST	<i>Plastics and Glass Products</i>
64	United Tractors	UNTR	<i>Automotive and Allied Products</i>

**RELEVANSI LAPORAN KEUANGAN *HISTORICAL COST* PADA  
KONDISI TINGKAT INFLASI RINGAN, SEDANG, DAN BERAT:  
STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK JAKARTA**

**Rindu Rika Gamayuni<sup>2</sup>**

***ABSTRACT***

*The objective of this research is to predict the inflation effect toward relevance of information that is reported in a historical cost financial statement. The focus in this study is whether the financial statement using historical cost can give the relevant financial information in the condition of low, medium, and high inflation rate. The variables used in this research for financial information are total assets, net sales, operating profit, net income, return on investment, and earning per share. Samples used are the companies listed in Jakarta Stock Exchange in the year of 1997, 1998, and 1999. Testing to prove the hypothesis used the paired t-test by using SPSS software.*

*Testing results show that out of six variables for financial information, three variables (net sales, operating profit, and ROI) shows that there is significant difference between historical cost financial statement with the reports that has been adjusted with the general price rates, in the condition of low, medium, and high inflation. Two variables (net income and earning per share) also have the significant difference between historical cost financial statement with the reports that has been adjusted with the general price rates, in the condition of a medium, and high inflation, in the condition of low inflation, no significant difference founded. In the variable total asset, there is a significant difference in the condition of low and high inflation, and in the condition of medium inflation, no significant difference founded. From the research results, generally can be concluded that inflation can affect financial statement information quality. The higher inflation rate is, the higher the effect toward historical cost financial statement. Historical cost report is distorted with the presence*

---

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

*of inflation, so adjusted to general price rate financial statement is needed as an addition to the historical cost report.*

*Keywords: inflation effect, historical cost, financial statement, inflation rate*

## A. PENDAHULUAN

Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa termasuk faktor-faktor produksi, diukur dengan satuan mata uang yang semakin naik secara umum dan terus menerus. Penyebab inflasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu inflasi disebabkan naiknya biaya produksi atau faktor-faktor *produksi (cost push inflation)*, dan inflasi disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan permintaan yang berakibat kenaikan harga secara umum pada barang dan jasa (*demand pull inflation*). Inflasi baik di negara berkembang maupun negara maju merupakan variabel yang penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Semua negara memerlukan inflasi, walaupun dalam tingkat yang berbeda-beda. Menurut hasil penelitian Suyono Salamun (1995), tingkat inflasi di bawah 7% akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, sedangkan di negara maju inflasi di bawah 5% berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Di negara Indonesia sendiri tingkat inflasi yang dialami beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat inflasi di Indonesia Tahun 1996 – 2000**

Tahun	Inflasi	Penggolongan
1996	6,40%	Ringan (0-10%)
1997	11,05%	Sedang (10-30%)
1998	77,63%	Berat (30-100%)
1999	2,01%	Ringan
2000	9,35%	Ringan

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2002.

Akuntansi konvensional menggunakan asumsi bahwa nilai uang stabil atau perubahan satuan moneter tidak material, dimana hal ini mengabaikan adanya inflasi yang nyata-nyata ada dalam suatu negara. Akuntansi konvensional menggunakan prinsip *historical cost* dimana penilaian aktiva berdasarkan harga perolehannya, intinya tidak mengijinkan suatu aktiva dinilai berdasarkan nilai kininya (*current cost*) karena daya beli uang dianggap stabil. Dalam masa inflasi seperti di Indonesia dimana tingkat inflasi cukup tinggi atau di atas tingkat wajar bagi pertumbuhan ekonomi (7%), akuntansi dengan prinsip *historical cost* banyak kehilangan kemampuannya untuk menyampaikan informasi yang dapat menolong para investor dalam

mengambil keputusan, sebab inflasi akan menyebabkan angka-angka dalam laporan *historical cost* tidak menampakkan nilai yang sebenarnya. Dalam perhitungan rugi laba, laba bersih akan menunjukkan angka *overstated* (lebih saji).

Para pemakai informasi yaitu pihak pengambil keputusan sangat membutuhkan informasi yang relevan dari laporan keuangan. Namun laporan keuangan saat ini yang menggunakan prinsip *historical cost* menjadi dipertanyakan apakah masih memberikan informasi yang relevan pada kondisi inflasi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

*International Accounting Standards Committee* menerbitkan *International Accounting Standards* (IAS) No.15, "*Information Reflecting the Effects of Changing Prices*" yang dipublikasikan pada bulan November 1981, menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap mutu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin nyata pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip biaya historis. Menurut IAS No. 15 ditetapkan dua metode akuntansi sebagai dampak terjadinya perubahan harga yaitu *General Price Level Adjusted Accounting* (GPLA) atau akuntansi yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum dan *Current Cost Accounting*. Penelitian ini menggunakan metode akuntansi GPLA untuk dibandingkan dengan laporan keuangan *historical cost* alasannya karena metode tersebut paling mungkin diterapkan di Indonesia, karena tidak memerlukan indeks harga khusus setiap barang yang belum tersedia lengkap di Biro Pusat Statistik, tetapi cukup dengan indeks harga umum (tingkat inflasi).

### 1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang dan jasa, termasuk faktor-faktor produksi, diukur dengan satuan mata uang, yang semakin menaik secara umum dan terus menerus. Kebalikan inflasi adalah deflasi (Ainun Naim, 1988).

Ada 3 macam penggolongan terhadap inflasi.

1. Penggolongan inflasi berdasarkan parah tidaknya inflasi: a. inflasi ringan (di bawah 10% per tahun), b. inflasi sedang (10-30% per tahun), c. inflasi berat (30-100% per tahun), d. hiperinflasi (>100% per tahun).
2. Penggolongan inflasi berdasarkan sebabnya: (1) inflasi yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi atau faktor-faktor produksi, disebut juga *cost push inflation*, (2) inflasi yang disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan naiknya tingkat permintaan selanjutnya berakibat kenaikan harga barang dan jasa secara umum, jenis inflasi ini disebut juga *demand pull inflation*.
3. Penggolongan inflasi berdasarkan asal inflasi: a. inflasi dari dalam negeri (*domestic inflation*), timbul karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru atau karena panen yang gagal. b. inflasi berasal dari luar negeri (*imported inflation*), timbul karena kenaikan harga barang-barang impor.

Inflasi tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi yang disebabkan kenaikan harga faktor produksi atau meningkatnya permintaan, tetapi inflasi dapat pula disebabkan masalah politik dan sosial.

## **2. Konsep Akuntansi Biaya Historis (*Historical Cost*) dan Perubahan Harga**

Laporan keuangan yang disajikan oleh proses akuntansi keuangan yang konvensional menurut Prinsip Akuntansi Indonesia adalah laporan keuangan yang didasarkan pada prinsip harga perolehan (*cost*) historis, dan menganggap bahwa harga-harga adalah tetap. Padahal dalam kenyataannya harga-harga cenderung naik yang disebut juga dengan inflasi. Rp 100 di tahun 1990 tidak sama nilainya dengan Rp 100 di tahun 2000, demikian pula nilai aktiva Rp 1.000.000 di tahun 1990 tidak sama nilainya dengan aktiva Rp 1.000.000 di tahun 2000. Maka sebenarnya penentuan nilai aktiva dengan mengakumulasi harga perolehan aktiva pada waktu-waktu yang berbeda kurang tepat, karena harga perolehan aktiva tersebut tidak dapat diperbandingkan. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian untuk menyatakan nilai perolehan aktiva tersebut menurut nilai uang yang konstan, agar dapat diperbandingkan. Kelemahan akuntansi konvensional ini diungkapkan oleh Paton dan Littleton dalam bukunya *An Introduction to Corporate Accounting Standard* (1967) yang menyatakan bahwa asumsi yang mengakui adanya suatu pengukuran dengan satuan uang yang stabil adalah tidak benar, karena dalam kenyataannya harga-harga selalu berubah.

Namun akuntansi konvensional yang berdasarkan biaya historis masih tetap dipakai sampai sekarang dengan alasan yang mendukung antara lain: (1) Biaya historis relevan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya dalam pengambilan keputusan oleh manajemen untuk masa yang akan datang pasti dilakukan dengan melihat keadaan masa lalu (*historis*), (2) Biaya historis didasarkan pada keadaan yang nyata, bukan yang diperkirakan. Akuntansi biaya historis didasarkan pada catatan dan proses data historis, (3) Sepanjang sejarah akuntansi biaya historis terbukti telah berguna bagi investor dan kreditor, kalau tidak pasti proses akuntansi keuangan telah berubah sejak lama, (4) Penggunaan biaya historis dapat menghindari terjadinya manipulasi internal, (5) Perubahan harga pasar dapat dinyatakan sebagai data pelengkap di laporan keuangan. Namun kritik yang paling mendasar terhadap akuntansi biaya historis adalah bahwa informasi keuangan yang disajikan bagi para pengambil keputusan tidak hanya memerlukan informasi biaya historis, tapi juga memerlukan informasi kenaikan dan penurunan nilai asset karena adanya perubahan harga, aliran kas, dan informasi lain yang relevan. Kenaikan nilai aktiva dapat disebabkan kenaikan harga atau berasal dari operasi perusahaan. Konsep akuntansi biaya historis tidak memisahkan kedua kenaikan nilai ini. Konsep biaya historis mengakibatkan pendapatan dinyatakan terlalu tinggi pada saat harga-harga cenderung naik dan selanjutnya mengakibatkan pengurangan modal secara tidak sengaja karena pembayaran deviden yang melebihi laba yang dihitung berdasarkan konsep biaya berlaku.

## **3. Akuntansi Inflasi**

Akuntansi inflasi merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan tingkat perubahan harga, sehingga informasi yang dihasilkan menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga yang berlaku.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut antara lain (1) Pendekatan harga umum (*general price level*), (2) Pendekatan biaya berlaku (*current cost*), dan (3) gabungan kedua pendekatan tersebut.

## **4. Konsep Akuntansi Tingkat Harga Umum (*General Price Level Adjusted*) Penyesuaian Terhadap Tingkat Harga Umum)**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk akuntansi bagi perubahan harga adalah pendekatan harga umum atau nilai uang konstan atau General Price Level Adjusted (GPLA). Alasan yang mendasari karena (1) cara ini relatif mudah karena yang diperlukan adalah menetapkan kembali pos-pos laporan keuangan dengan memakai indeks bulan yang berbeda. (2) metode ini meningkatkan daya banding laporan keuangan suatu perusahaan antar periode. Penggunaan metode ini membuat unit moneter dalam laporan keuangan tahun lalu sebanding dengan daya beli rupiah laporan keuangan tahun berjalan, sehingga dapat lebih dibandingkan. (3) metode ini dilaporkan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan biaya historis, dapat meniadakan pengaruh perubahan harga tanpa struktur akuntansi yang baru, karena penyajian pengaruh perubahan harga sebagai lampiran tidak merubah prinsip biaya historis yang berlaku sekarang (Zaki Baridwan, 1994).

**a. Perbedaan antara pos-pos moneter dan non-moneter**

Pembedaan antara aktiva moneter dan non-moneter adalah penting, karena keduanya mempunyai sifat dan perlakuan yang berbeda dalam proses penyesuaian nilai pos-pos di laporan keuangan atas dasar harga konstan. Item-item non-moneter harus ditranslasikan menjadi nilai mata uang dengan daya beli yang sama pada akhir periode berjalan, sebaliknya item-item moneter telah dinyatakan dalam nilai mata uang pada akhir periode berjalan dan *gain* atau *lose* daya beli sebagai hasil perubahan dalam tingkat harga umum (Riahi, Belkaoui: 2000).

Pos-pos moneter adalah pos-pos yang jumlahnya ditentukan oleh kontrak, atau yang mempunyai nilai tetap dalam satuan mata uang, sehingga nilainya tidak terpengaruh oleh adanya perubahan tingkat harga umum. Contohnya harta, hutang, dan kekayaan yang saldonya tetap menurut jumlah dollarnya tanpa menghiraukan perubahan dalam tingkat harga umum. Sedangkan pos-pos non-moneter adalah semua pos yang tidak menunjukkan suatu hak untuk diterima atau suatu kewajiban untuk membayar suatu jumlah yang tetap (Smith Skousen, 1984). Untuk menentukan apakah suatu item termasuk pos-pos moneter atau pos-pos non-moneter tergantung pada besar kecilnya derajat sifat moneter atau non-moneter yang ditentukan oleh pertimbangan akuntan.

#### **b. Pemilihan Indeks Tingkat Harga Umum**

Akuntansi tingkat harga umum menggunakan suatu faktor konversi yang didasarkan pada perubahan tingkat harga umum untuk mengubah nilai mata uang pada suatu tanggal menjadi jumlah mata uang yang mempunyai daya beli sama pada tanggal yang lain. Maka konsep yang sesuai mengenai daya beli dan indeks tingkat harga umum harus dipilih. APB *statement* No. 3 menyatakan bahwa tujuan prosedur pernyataan kembali tingkat harga umum adalah untuk menyatakan kembali laporan keuangan biaya historis akibat perubahan pada daya beli umum mata uang, dan tujuan ini hanya dapat dicapai dengan penggunaan indeks tingkat harga umum (Riahi, Belkaoui: 2000).

### **5. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Banyak pendapat dari hasil riset menyatakan bahwa akuntansi *historical cost* tidak *interpretable* dan relevan lagi digunakan, yaitu penelitian Robert S. Sterling (1975), Ronen dan Sorter (1972), Yuji Ijiri (1978). Laporan keuangan *historical cost* harus disesuaikan dengan tingkat harga umum agar dapat memberikan informasi yang lebih relevan dalam kondisi inflasi.

Namun beberapa hasil penelitian mengungkapkan hal yang sebaliknya yaitu bahwa laporan keuangan historis masih relevan dan tidak terdistorsi oleh inflasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Suwandi (1999) dan Tri Laksono (2000). Penelitian yang dilakukan Tri Laksono terhadap enam variabel laporan keuangan yaitu *total asset*, *net sales*, *operating profit*, *net income*, *return on investment*, dan *earning per share*, dengan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1996-1997, menyatakan bahwa dari enam variabel tersebut, empat variabel yaitu *net sales*, *net income*, ROI dan EPS menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara laporan *historical cost* dengan laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu *total asset* dan *operating profit* menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara laporan *historical cost* dengan laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Karena dari enam variabel yang diuji, empat variabel tidak terdapat perbedaan yang signifikan maka dari hasil penelitian Tri Laksono ini disimpulkan bahwa laporan *historical cost* masih relevan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil penelitian Suwandi tahun 1999 dengan sampel laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 1994,1995,1996 (dirata-rata selama 3 tahun) terhadap variabel laporan keuangan *total asset*, ROI, EPS, *net income*, dan tarif efektif pajak, menunjukkan hasil bahwa informasi laporan keuangan yang diprosikan oleh *total asset*, ROI, EPS, *net income* yang disajikan oleh laporan *historical cost* tidak terdistorsi secara signifikan dengan adanya inflasi, namun tarif efektif pajak terdistorsi signifikan oleh inflasi. Dari hasil

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum laporan biaya historis masih relevan untuk digunakan.

Namun hasil penelitian-penelitian tersebut belum dapat digeneralisasi atau digunakan sebagai kesimpulan umum karena penelitian Tri Laksono hanya 2 tahun (pada saat tingkat inflasi tergolong ringan dan sedang), sedangkan penelitian Suwandi dirata-rata selama 3 tahun. Oleh karena itu untuk mengatasi keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi, maka peneliti ingin menguji relevansi laporan keuangan *historical cost* pada berbagai kondisi inflasi (ringan, sedang, dan berat), apakah laporan keuangan *historical cost* masih menyajikan informasi yang relevan dan tidak terdistorsi oleh inflasi khususnya pada tingkat inflasi ringan, sedang, dan berat.

Hipotesis utama:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keuangan pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keuangan pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio keuangan pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Hipotesis utama dijabarkan dalam beberapa subhipotesis:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan
5. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ROI pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan
6. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara EPS pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan
7. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang

8. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang
9. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang
10. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang
11. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROI pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang
12. Terdapat perbedaan yang signifikan antara EPS pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang
13. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat
14. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat
15. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat
16. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat
17. Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROI pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat
18. Terdapat perbedaan yang signifikan antara EPS pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana dampak inflasi terhadap relevansi informasi yang disajikan laporan keuangan *historical cost*.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan antara informasi akuntansi yang dihasilkan oleh laporan keuangan *historical cost* dengan laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum, pada berbagai kondisi inflasi: ringan, sedang, berat. Informasi akuntansi dalam hal ini diproksikan oleh rasio-rasio keuangan: *total asset*, *net sales*, *operating profit*, *net income*, *Return on investment (ROI)*, dan *Earning per share (EPS)*.

## **2. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan masih relevan atau tidaknya informasi yang disajikan laporan keuangan *historical cost* pada berbagai kondisi tingkat inflasi.
2. Hasil penelitian ini juga berguna bagi para pemakai informasi laporan keuangan seperti para pengambil keputusan agar mempertimbangkan informasi dari laporan keuangan yang telah dipengaruhi oleh inflasi.
3. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan pembaca mengenai akuntansi inflasi.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis, sumber data, dan metode pengumpulan data**

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia di BEJ, bukan dari sumber langsung, yaitu data laporan keuangan *historical cost* perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Laporan keuangan tahun 1997 (mewakili tingkat inflasi sedang), 1998 (inflasi berat), 1999 (inflasi ringan). Selain itu juga data tingkat inflasi dari Biro Pusat Statistik. Kriteria pemilihan sampel:

1. Perusahaan tergolong dalam sektor industri manufaktur: (1) Makanan dan minuman, (2) Rokok, (3) Tekstil, garmen, dan produk sejenis, (4) Kertas dan produk sejenis, (5) Kimia dan produk sejenis, (6) Plastik dan gelas, (7) Semen, (8) Metal dan produk sejenis, (9) Otomotif dan produk sejenis, (10) Farmasi, (11) Barang-barang kebutuhan konsumen. Penetapan kriteria sampel harus termasuk dalam sektor industri ini karena tidak semua sektor berpengaruh kuat akibat adanya inflasi, seperti sektor lembaga keuangan.
2. Laporan keuangan tersedia lengkap untuk tahun 1997, 1998, 1999.

## 2. Sampel Penelitian

**Tabel 2. Daftar perusahaan yang terpilih sebagai sampel:**

Sektor Industri	No	Nama Perusahaan
<b>I. Food &amp; Beverages</b>	1	PT Ades Alfindo
	2	PT Aqua golden Mississippi
	3	PT Delta Djakarta Tbk
	4	PT Multi Bintang Indonesia
	5	PT Ultrajaya Milk & Trading Comp
<b>II. Tobacco Manufactures</b>	1	PT Bat Indonesia
	2	PT Gudang garam tbk
<b>III. Extile</b>	1	PT Century Textile Industry
	2	PT Eratex Djaya Co Ltd
	3	PT Panasia Filament Inti
	4	PT Roda Vivatex Tbk
	5	PT Sunson Textile manufacturer
<b>IV. Paper &amp; Allied products</b>	1	PT Indah Kiat Pulp & Paper
	2	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
<b>V. Chemical &amp; Allied Product</b>	1	PT Budi Acid jaya
	2	PT Lautan Luas Tbk
	3	PT Unggul Indah Cahaya
<b>VI. Plastic &amp; Glass Product</b>	1	PT Asahimas Flat glass

	2	PT Berlina Co Ltd Tbk
	3	PT Dynaplast Tbk
	4	PT Igar jaya Tbk
<b>VII. Cement</b>	1	PT Semen Gresik
<b>VIII. Metal Product</b>	1	PT Citra Tubindo
	2	PT Tembaga Mulia Semanan
<b>IX. Automotive &amp; Allied Products</b>	1	PT Goodyear Indonesia
	2	PT Selamat Sampurna Tbk
	3	PT Tunas Ridean Tbk
<b>X. Pharmaceutical</b>	1	PT Merck Indonesia Tbk
<b>XI. Consumer Good</b>	1	PT Mustika Ratu
	2	PT Procter & Gamble
	3	PT Unilever Indonesia

### 3. Variabel Penelitian

1. *Total asset*: jumlah asset yang dilaporkan dalam neraca perusahaan.
2. *Net sales*: jumlah penjualan bersih yang dilakukan sepanjang tahun.
3. *Operating profit*: laba kotor dikurangi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi.
4. *Net income*: laba perusahaan setelah dikurang pajak penghasilan
5. *Return on investment*: *net income* dibagi dengan *total asset*.
6. *Earning per share*: perbandingan antara *net income* dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

### 4. Teknik Pengujian / Analisis

Pengujian dilakukan dengan membandingkan dua sampel yang berpasangan, dimana sampel tersebut mengalami pengukuran dan perlakuan yang berbeda. Variabel yang diperbandingkan

dalam penelitian ini adalah *total asset, net sales, operating profit, net income, ROI, dan EPS* dari laporan keuangan *historical cost* dengan *total asset, net sales, operating profit, net income, ROI, dan EPS* dari laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Sampel diperkirakan lebih dari 30, sebagai syarat normalitas data yang diuji dengan uji parametris. Untuk memecahkan masalah dan menjawab hipotesis maka alat penelitian yang tepat digunakan adalah statistik parametris yaitu *t-test for paired samples* yang diperoleh melalui SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

Ho diterima apabila  $t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

Ho ditolak apabila  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ , atau  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Untuk mendapatkan laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum atau laporan keuangan dengan metode GPLA, maka laporan keuangan *historical cost* masing-masing perusahaan harus dikalikan dengan faktor konversi atau dikonversi sesuai dengan indeks harga tahun yang terkait. Proses pengkonversian ini berpedoman pada FASB (Financial Accounting Standard Board) Statement No. 33 dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Penjualan dilakukan merata sepanjang tahun
2. Biaya-biaya terjadi merata sepanjang tahun
3. Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap pada tanggal 1 Januari 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1986.

**Tabel 3. Faktor Konversi untuk masing-masing variabel:**

Variabel	Faktor Konversi		
	97	98	99
<i>Total asset</i>	111.83/276.2 4	198.64/276.2 4	202.45/276.2 4
<i>Net sales</i>	111.83/104.5 3	198.64/165.3 6	202.45/202.7 9
<i>Operating profit</i>	111.83/104.5 3	198.64/165.3 6	202.45/202.7 9
<i>Net income</i>	111.83/104.5 3	198.64/165.3 6	202.45/202.7 9
ROI			

EPS	111.83/104.5 3	198.64/165.3 6	202.45/202.7 9
-----	-------------------	-------------------	-------------------

## 5. Pengujian hipotesis

### a. Pengujian Variabel *Total asset*

Ho1: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ho2: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ho3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df=n-1=30$ , maka diperoleh nilai  $t$  tabel 2,0423.

**Ho diterima** apabila  $-2,0423 \leq t \leq 2,0423$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Ho ditolak** apabila  $t > 2,0423$  atau  $t < -2,0423$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan uji beda paired samples  $t$ -test, diperoleh nilai  $t$  hitung untuk *Total asset* pada tingkat inflasi ringan  $-1,985$ , tingkat inflasi sedang  $-2,262$ , tingkat inflasi berat  $-1,990$  (lihat lampiran).

1. Untuk TA pada tingkat inflasi ringan (tahun 1999) ,  $t$  hitung =  $-1,985$  berada diantara  $t$  tabel  $-2,0423$  dan  $2,0423$ . Nilai signifikansi =  $0,056$ . Maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi ringan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara TA pada laporan *historical cost* dengan TA pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

2. Untuk TA pada tingkat inflasi sedang (tahun 1997),  $t$  hitung = -2,262 lebih kecil daripada  $t$  tabel -2,0423. Nilai signifikansi = 0,031. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi sedang, ada perbedaan yang signifikan antara TA pada laporan *historical cost* dengan TA pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
3. Untuk TA pada tingkat inflasi berat (tahun 1998),  $t$  hitung = -1,990 berada diantara  $t$  tabel -2,0423 dan 2,0423. Nilai signifikansi = 0,056. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi berat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara TA pada laporan *historical cost* dengan TA pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

## b. Pengujian Variabel *Net sales*

Ho1: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ho2: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ho3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net sales* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df = n - 1 = 30$ , maka diperoleh nilai  $t$  tabel 2,0423.

**Ho diterima** apabila  $-2,0423 \leq t \leq 2,0423$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Ho ditolak** apabila  $t > 2,0423$  atau  $t < -2,0423$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari hasil pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji beda paired samples t-test, diperoleh nilai  $t$  hitung untuk *Net sales* pada tingkat inflasi ringan  $-2,893$  tingkat inflasi sedang  $2,790$ . tingkat inflasi berat  $2,985$  (lihat lampiran).

1. Untuk *Net sales* pada tingkat inflasi ringan (tahun 1999) ,  $t$  hitung =  $-2,893$  lebih kecil daripada  $t$  tabel  $-2,0423$ . Nilai signifikansi =  $0,007$ . Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi ringan, ada perbedaan yang signifikan antara NS pada laporan *historical cost* dengan NS pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
2. Untuk *Net sales* pada tingkat inflasi sedang (tahun 1997),  $t$  hitung =  $2,790$  lebih besar daripada  $t$  tabel  $2,0423$ . Nilai signifikansi =  $0,009$ . Maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi sedang, ada perbedaan yang signifikan antara NS pada laporan *historical cost* dengan NS pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

3. Untuk *Net sales* pada tingkat inflasi berat (tahun 1998),  $t$  hitung = 2,985 lebih besar dari pada  $t$  tabel 2,0423. Nilai signifikansi = 0,006. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi berat, ada perbedaan yang signifikan antara NS pada laporan *historical cost* dengan NS pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

### c. Pengujian Variabel *Operating profit*

Ho1: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ho2: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ho3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Operating profit* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df=n-1=30$ , maka diperoleh nilai  $t$  tabel 2,0423.

**Ho diterima** apabila  $-2,0423 \leq t \leq 2,0423$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Ho ditolak** apabila  $t > 2,0423$  atau  $t < -2,0423$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari hasil pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji beda paired samples t-test, diperoleh nilai  $t$  hitung untuk *Operating Profit* pada tingkat inflasi ringan

-2,403 tingkat inflasi sedang 2,607. tingkat inflasi berat 2,462 (lihat lampiran).

1. Untuk *Operating profit* pada tingkat inflasi ringan (tahun 1999) ,  $t$  hitung = -2,403 lebih kecil daripada  $t$  tabel -2,0423. Nilai signifikansi = 0,023. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi ringan, ada perbedaan yang signifikan antara OP pada laporan *historical cost* dengan OP pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
2. Untuk *Operating profit* pada tingkat inflasi sedang (tahun 1997),  $t$  hitung = 2,607 lebih besar daripada  $t$  tabel 2,0423. Nilai signifikansi = 0,014. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi sedang, ada perbedaan yang signifikan antara OP pada laporan *historical cost* dengan OP pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
3. Untuk *Operating profit* pada tingkat inflasi berat (tahun 1998),  $t$  hitung = 2,462 lebih besar dari pada  $t$  tabel 2,0423. Nilai signifikansi = 0,020. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi berat, ada perbedaan yang signifikan antara OP pada laporan *historical cost* dengan OP pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

#### **d. Pengujian Variabel *Net income***

$H_{01}$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

$H_{a1}$ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

$H_{02}$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

$H_{a2}$ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

$H_{03}$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Net income* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df=n-1=30$ , maka diperoleh nilai  $t$  tabel 2,0423.

**Ho diterima** apabila  $-2,0423 \leq t \leq 2,0423$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Ho ditolak** apabila  $t > 2,0423$  atau  $t < -2,0423$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari hasil pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji beda paired samples t-test, diperoleh nilai  $t$  hitung untuk *Net income* pada tingkat inflasi ringan

-1,912 tingkat inflasi sedang 2,195, tingkat inflasi berat 2,145 (lihat lampiran).

1. Untuk *Net income* pada tingkat inflasi ringan (tahun 1999),  $t$  hitung = -1,912 berada di antara  $t$  tabel -2,0423 dan 2,0423. Nilai signifikansi = 0,065. Maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi ringan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara NI pada laporan *historical cost* dengan NI pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
2. Untuk *Net income* pada tingkat inflasi sedang (tahun 1997),  $t$  hitung = 2,195 lebih besar daripada  $t$  tabel 2,0423. Nilai signifikansi = 0,036. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi sedang, ada perbedaan yang signifikan antara NI pada laporan *historical cost* dengan NI pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
3. Untuk *Net income* pada tingkat inflasi berat (tahun 1998),  $t$  hitung = 2,145 lebih besar dari pada  $t$  tabel 2,0423. Nilai signifikansi = 0,040. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi berat, ada perbedaan yang signifikan antara NI pada laporan *historical cost* dengan NI pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

#### e. Pengujian Variabel *Return on investment*

Ho1: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.

Ho2: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.

Ho3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df=n-1=30$ , maka diperoleh nilai  $t$  tabel 2,0423.

**Ho diterima** apabila  $-2,0423 \leq t \leq 2,0423$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Ho ditolak** apabila  $t > 2,0423$  atau  $t < -2,0423$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari hasil pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji beda paired samples t-test, diperoleh nilai  $t$  hitung untuk *ROI* pada tingkat inflasi ringan  $-4,832$  tingkat inflasi sedang  $-3,594$ , tingkat inflasi berat  $-3,961$  (lihat lampiran).

1. Untuk *ROI* pada tingkat inflasi ringan (tahun 1999),  $t$  hitung =  $-4,832$  lebih kecil daripada  $t$  tabel  $-2,0423$ . Nilai signifikansi = 0,000. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi ringan, ada perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan *ROI* pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
2. Untuk *ROI* pada tingkat inflasi sedang (tahun 1997),  $t$  hitung =  $-3,594$  lebih kecil daripada  $t$  tabel  $-2,0423$ . Nilai signifikansi = 0,001. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi sedang, ada perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan *ROI* pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
3. Untuk *ROI* pada tingkat inflasi berat (tahun 1998),  $t$  hitung =  $-3,961$  lebih kecil dari pada  $t$  tabel  $-2,0423$ . Nilai signifikansi = 0,000. Maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi berat, ada perbedaan yang signifikan antara *ROI* pada laporan *historical cost* dengan *ROI* pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

#### f. Pengujian Variabel *Earning per share*

- Ho1: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.
- Ha1: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi ringan.
- Ho2: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.
- Ha2: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi sedang.
- Ho3: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.
- Ha3: Terdapat perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat.

Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df=n-1=30$ , maka diperoleh nilai  $t$  tabel 2,0423.

**Ho diterima** apabila  $-2,0423 \leq t \leq 2,0423$ , dan nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Ho ditolak** apabila  $t > 2,0423$  atau  $t < -2,0423$ , dan nilai signifikansi  $< 0,05$ .

Dari hasil pengolahan data SPSS dengan menggunakan uji beda paired samples t-test, diperoleh nilai  $t$  hitung untuk *EPS* pada tingkat inflasi ringan  $-0,850$  tingkat inflasi sedang  $2,675$  tingkat inflasi berat  $2,926$  (lihat lampiran).

1. Untuk *EPS* pada tingkat inflasi ringan (tahun 1999),  $t$  hitung =  $-0,850$  berada di antara  $t$  tabel  $-2,0423$  dan  $2,0423$ . Nilai signifikansi =  $0,402$ . Maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi ringan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara *EPS* pada laporan *historical cost* dengan *EPS* pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.
2. Untuk *EPS* pada tingkat inflasi sedang (tahun 1997),  $t$  hitung =  $2,675$  lebih besar daripada  $t$  tabel  $2,0423$ . Nilai signifikansi =  $0,012$ . Maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi sedang, ada perbedaan yang signifikan antara EPS pada laporan *historical cost* dengan EPS pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

- Untuk *EPS* pada tingkat inflasi berat (tahun 1998),  $t$  hitung = 2,926 lebih besar dari pada  $t$  tabel 2,0423. Nilai signifikansi = 0,006. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kondisi tingkat inflasi berat, ada perbedaan yang signifikan antara EPS pada laporan *historical cost* dengan EPS pada laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum.

**Tabel 4. Ikhtisar Hasil Pengujian Data**

Variabel Penelitian	Inflasi ringan (1999)	Inflasi Sedang (1997)	Inflasi Berat (1998)
<i>Total asset</i>	$H_0$ diterima, $H_a$ ditolak, signifikan	$H_a$ diterima signifikan	$H_0$ diterima, $H_a$ ditolak, signifikan
<i>Net sales</i>	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan
<i>Operating profit</i>	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan
<i>Net income</i>	$H_0$ diterima, $H_a$ ditolak, signifikan	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan
<i>Return on investment</i> (ROI)	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan
EPS	$H_0$ diterima, $H_a$ ditolak, signifikan	$H_a$ diterima signifikan	$H_a$ diterima signifikan

## E. SIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah simpulan terhadap hasil pengujian terhadap enam variabel yang mewakili informasi keuangan yaitu *total asset*, *net sales*, *net income*, *operating profit*, EPS dan ROI, dengan sampel perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 1997, 1998, 1999 untuk mengetahui relevansi laporan keuangan *historical cost* pada kondisi tingkat inflasi ringan, sedang, dan berat.

- Dari enam variabel, tiga variabel yaitu *Net sales*, *Operating profit*, dan *Return on investment* terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum baik pada kondisi tingkat inflasi ringan, sedang, maupun berat.

2. Dua variabel lainnya yaitu *Earning per share* dan *Net income* juga terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum khususnya pada kondisi tingkat inflasi sedang dan berat, sedangkan pada kondisi tingkat inflasi ringan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan *International Accounting Standards (IAS) No.15, "Information Reflecting the Effects of Changing Prices"* yang dipublikasikan pada bulan November 1981, menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap mutu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat inflasi maka akan semakin nyata pengaruhnya terhadap laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip biaya historis.
3. Pada variabel *Total asset* terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan *historical cost* dengan laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum khususnya pada kondisi inflasi sedang, sedangkan pada kondisi tingkat inflasi ringan dan berat tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan dalam penyesuaian untuk variabel *total asset* dilakukan berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) akhir tahun yang bersangkutan dan IHK tahun perolehan asset. IHK akhir tahun 1997 (inflasi sedang) memiliki perbedaan yang signifikan dengan IHK saat perolehan asset atau saat revaluasi aktiva tetap (tahun 1987), hal ini menyebabkan terdapat perbedaan yang signifikan pada *total asset* berdasarkan laporan *historical cost* dengan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum pada saat tingkat inflasi sedang. Sedangkan pada tahun 1998 (inflasi berat) dan tahun 1999 (inflasi ringan) memiliki IHK akhir tahun yang tidak berbeda jauh dengan IHK saat perolehan asset atau saat revaluasi aktiva tetap (1987), sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *total asset* berdasarkan laporan *historical cost* dengan *total asset* berdasarkan laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum pada kondisi tingkat inflasi berat (1998) dan inflasi ringan (1999).
4. Karena dari enam variabel yang mewakili informasi laporan keuangan, tiga variabel memiliki perbedaan yang signifikan baik pada kondisi tingkat inflasi ringan, sedang, dan berat, dua variabel memiliki perbedaan yang signifikan pada kondisi tingkat inflasi sedang dan berat, maka disimpulkan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap mutu informasi laporan keuangan, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin besar pengaruhnya terhadap laporan keuangan *historical cost*. Laporan keuangan *historical cost* terdistorsi oleh adanya inflasi khususnya pada kondisi tingkat inflasi sedang dan berat. Untuk itu sangat diperlukan laporan keuangan yang disesuaikan dengan tingkat harga umum sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan biaya historis. Tidak perlu merubah struktur akuntansi karena meskipun informasi Laporan biaya historis terpengaruh atau terdistorsi oleh inflasi namun laporan biaya historis tetap dibutuhkan, hanya saja diperlukan informasi tambahan berupa laporan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum sebagai dasar pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 1992. *Akuntansi Keuangan Menengah*. FE UGM. Yogyakarta.
- Dajan, Anto, 1996. *Pengantar Metode Statistik*. Edisi kesebelas. LP3ES. Jakarta.
- Hongren, Horison, Robinson, Secokusumo. 1996. *Akuntansi di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- IAI. 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Laksono, Tri. 2000. Relevansi laporan Biaya Historis pada Kondisi Inflasi dengan Indikator Total asset, Net sales, Operating profit, Net income, ROI, dan EPS pada 23 Perusahaan Go Public di Bursa Efek Surabaya. *SNA IV*.
- Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Na'im, Ainun. 1998. *Akuntansi Inflasi*. Edisi kesatu. BPFE. Yogyakarta.
- Niswonger, Fess, Warren. 1993. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Riahi, Belkaoui, Ahmed. 1998. *Accounting Theory*. Penerjemah Marwata. dkk.. Salemba Empat. Jakarta.
- Smith, Jay M & Skousen. 1996. *Akuntansi Intermediate*. Volume Komprehensif. Edisi 9. Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Sterling, Robert S.. 1975. Relevant Financial Reporting in Age of Price Changes. *Journal of Accountancy*. February. pp: 42-51.
- Supriyati. 1998. Dampak Perubahan Harga terhadap Laporan Keuangan (Historical vs Current Cost Approach). *Ventura*. Vol.2. No.1. pp: 41-43.
- Sutanto, Singgih.1999. *SPSS: Mengolah Data Statistik secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Suwarjono. 1985. *Teori Akuntansi*. BPFE. Yogyakarta.
- Suwandi. 1999. Historical Cost Accounting, Adakah terjadi distorsi informasi?. *Media Akuntansi*. No. 33/ Th. VI Maret-April. pp: 20-28.

an 1

adalah data variabel penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan dengan metode *historical cost*:

Nama Perusahaan	Total asset		Net sales		Operating profit		Net income		ROI		EPS							
	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98						
<b>Leverages</b>																		
Alfindo	266393	298836	250455	77513	69643	76420	2175	-21104	-19139	119	-81553	276	0,04	-27,29	0,11	2	-1137	3
golden Mississippi	153082	176127	216845	220834	360546	410793	11482	26189	28544	7773	18907	17846	5,08	10,73	8,23	591	1445	1356
Djakarta Tbk	246977	318963	305625	82182	156188	211618	10709	19993	43362	-10251	16303	57030	-4,15	5,11	18,66	-732	1164	3561
Bintang Indonesia	408422	461567	410704	246037	299772	407248	75625	42812	83218	37586	18070	62304	9,20	3,91	15,17	1784	832	2958
Jaya Milik&Trading Comp	473860	476978	698624	185047	188891	255032	35084	32780	37587	1578	1800	12086	0,33	0,38	1,73	7	32	6
<b>Manufactures</b>																		
Indonesia	386030	807107	874736	332068	858342	1015354	53921	46173	131032	18652	17485	27642	4,83	2,17	3,16	848	250	1257
garam tbk	5299850	6532916	8076916	7517909	9973172	12694605		1364257	1968653	3012395	906812	1110792	2276883	17,11	17,00	28,19	471	1183
Textile Industry	122487	170185	171523	131212	276478	215324	35662	72951	26537	22558	50372	19142	18,42	29,60	11,16	2256	5037	1915





## Lampiran 2

Berikut adalah variabel penelitian dari laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum:

Perusahaan	Total asset			Net sales			Operating profit			Net Income			ROI			EPS		
	97	98	99	97	98	99	97	98	99	97	98	99	97	98	99	97	98	99
<b>I Food &amp; Beverages</b>																		
1 PT Ades Alfindo	107843,6	214888,4	183552,76	82926,2	83659,2	76291,87	2326,89	-25351	-19107	127,31053	-97966,18	275,039	0,001	-0,4559	0,0015	2,13967	-1365,8	2,99
2 PT Aqua golden Mississippi	61972,05	126650,3	158920,76	236256	433108,7	410104,3	12283,9	31459,7	28496,1	8315,8384	22712,18	17816,4	0,134	0,17933	0,11211	632,273	1735,82	1353,73
3 PT Delta Djakarta Tbk	99983,49	229361,5	223985,6	87921,3	187622,1	211263,2	11456,9	24016,7	43289,3	-10966,89	19584,10	56934	-0,109	0,08539	0,25419	-783,12	1398,26	3555,03
4 PT Multi Bintang Indonesia	165341,1	331905,8	300995,6	263219	360103,5	406565,2	80906,4	51428,3	83078,5	40210,871	21706,73	62199,3	0,243	0,0654	0,20665	1908,59	999,447	2953,04
5 PT Ultrajaya Milk&Trading Comp 38,4403	191832,3	191832,3	342987,7	512005,61	197970	226906,8	254604,4	37534,1	39377,2	37524	1688,2019	2162,26	12065,9	0,009	0,0063	0,02357	7,48885	
<b>II Tobacco Manufactures</b>																		
1 PT Bat Indonesia	156276,2	580378,4	641074,08	355258	1031090	1013652	57686,6	55465,7	130812	19954,589	21003,99	27595,3	0,128	0,03619	0,04305	907,221	300,314	1254,89
2 PT Gudang garam tbk	2145534	4697721	5919387,6	8042933	11980351	12673321	1459532	2364860	3007344	970140,5	1334347,6	2273065	0,452	0,28404	0,384	503,893	677,509	1181,02
<b>III Textile</b>																		
1 PT Century Textile Industry	49586,31	122377,5	125705,3	140375	332121,4	214963	38152,5	87633	26492,5	24133,37	60509,76	19109,9	0,487	0,49445	0,15202	2413,55	6050,74	1911,79
2 PT Eratex Djava Co Ltd	98494,93	256796	254054,08	203889	575946,7	347407,6	42047,8	159192	24139,5	-26431,38	15361,69	14223,6	-0,268	0,05982	0,05599	-538,13	267,881	144,757
3 PT Panasia Filament Inti	299106,8	654444,9	659921,48	273766	769124,6	613819,1	38666	160641	21660,6	27930,219	19329,44	-28227	0,093	0,02954	-0,0428	111,263	42,044	-412,31



## Lampiran 2

2	PT Lautan Lugas Tbk 129,45	185835,6 130,937	411044,7 32,9447	436810,94	337115	721244,8	635910	31392,2	200240	60238,8	19434,648	111810,7	25943	0,105	0,27202	0,05939
3	PT Unggul Indah Cahaya 23,5364	451516,5 239,05	1244962 50,9145	1232059,7	486402	1498857	1135309	104102	418271	238340	6697,1759	64190,42	63440,1	0,015	0,05156	0,05149
<b>VI Plastic&amp;Glass Product</b>																
1	PT Asahimas Flat glass 55,631	530463,8 26,4277	1318779 62,8944	1230757,3	406025	849276,1	785159,4	42138,7	210839	63854,8	-24182,58	17018,22	27327,5	-0,045	0,0129	0,0222
2	PT Berlina Co Ltd Tbk 117,682	44042,98 102,107	78478,76 304,489	86411,353	80953,5	108259,8	116181,9	14892,1	30937,2	36903	2709,8956	7256,8	20975,8	0,062	0,09247	0,24274
3	PT Dynaplast Tbk 111,263	112575,3 45,6478	210255,4 96,8374	222596,79	133599	180085,4	196483	18003,2	31668,8	34831,5	16685,169	26504,55	28927,3	0,148	0,12606	0,12995
4	PT Igar Jaya Tbk 58,841	52446,83 159,767	107997,9 274,539	125350,58	118700	188959,1	228809,7	12437,9	40273,4	46840,3	3082,1987	16745,53	28805,9	0,058	0,15505	0,2298
<b>VII Cement</b>																
1	PT Semen Gresik 419,376	2139967 449,27	5098051 405,319	5279163,7	1754576	2780674	3086476	411676	757647	741714	248792,6	320769,5	240188	0,116	0,06292	0,0455
<b>VIII Metal Product</b>																
2	PT Citra Tubindo 1098,72	79082,56 409,629	368204,5 76,8709	412494,07	122651	378844,3	160113,1	44736,3	121883	3436,23	49432,861	207028,4	23487,4	0,625	0,56226	0,05694
3	PT Tembaga Mulia Semanan 1588,2	157446,1 404,874	353947,9 258,566	302712,73	359432	498299,8	518266,6	162358	115851	23,827	-29055,69	11671,4	4742,08	-0,185	0,03297	0,01567



### Lampiran 3

#### Deskriptif data

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	EPSG97	456,7511	31	950,7340	170,7569
	EPSH97	426,9355	31	888,6723	159,6103
Pair 2	EPSG98	805,2690	31	1532,1634	275,1847
	EPSH98	670,3548	31	1275,4659	229,0804
Pair 3	EPSG99	411,4381	31	2695,5723	484,1391
	EPSH99	412,1290	31	2700,0993	484,9522
Pair 4	NIG97	78005,19	31	197854,4	35535,69
	NIH97	72913,19	31	184938,9	33216,01
Pair 5	NIG98	203745,7	31	528896,7	94992,65
	NIH98	169610,3	31	440285,7	79077,65
Pair 6	NIG99	146062,7	31	425372,8	76399,22
	NIH99	146308,0	31	426087,3	76527,54
Pair 7	NSG97	770678,7	31	1537837	276203,6
	NSH97	720370,6	31	1437450	258173,7
Pair 8	NSG98	1491104	31	2780949	499473,2
	NSH98	1241286	31	2315031	415791,9
Pair 9	NSG99	1495334	31	2877443	516803,9
	NSH99	1497845	31	2882275	517671,9
Pair 10	OPG97	155254,8	31	331584,2	59554,28
	OPH97	145120,1	31	309939,2	55666,72
Pair 11	OPG98	374011,9	31	845941,9	151935,6
	OPH98	311350,2	31	704213,4	126480,5
Pair 12	OPG99	332941,9	31	771563,2	138576,8
	OPH99	333501,1	31	772859,0	138809,6
Pair 13	ROIG97	,1318	31	,2043	3,669E-02
	ROIH97	4,9890	31	7,7294	1,3882
Pair 14	ROIG98	,1257	31	,1768	3,175E-02
	ROIH98	7,5272	31	10,5817	1,9005
Pair 15	ROIG99	,1174	31	,1353	2,431E-02
	ROIH99	8,6216	31	9,9354	1,7845
Pair 16	TAG97	678616,4	31	1670627	300053,4
	TAH97	1676303	31	4126746	741185,4
Pair 17	TAG98	1943577	31	5437233	976555,9
	TAH98	2702847	31	7561324	1358054
Pair 18	TAG99	2108361	31	5912726	1061957
	TAH99	2876828	31	8067826	1449024

Keterangan:

EPSH = EPS berdasarkan Laporan *Historical cost*

EPSG = EPS berdasarkan Laporan yang telah disesuaikan dengan metode GPL

## Lampiran 4

### DAFTAR INDEKS HARGA KONSUMEN

Bulan	1997	1998	1999
Januari	101.03	117.51	204.54
Februari	102.10	132.40	207.12
Maret	101.97	139.38	206.75
April	102.54	145.93	205.34
Mei	102.73	153.58	204.76
Juni	102.56	160.70	204.07
Juli	103.16	174.45	201.93
Agustus	104.16	185.44	200.05
September	105.50	192.40	198.68
Oktober	107.37	191.89	198.79
Nopember	109.37	192.04	199.00
Desember	111.83	198.64	202.45
Rata-rata	104.53	165.36	202.79

Sumber: Biro Pusat Statistik, 2002





***TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL:***  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP**  
**INTENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI WORLD WIDE WEB**

**Retno Yuni Nur Susilowati<sup>3</sup>**

**Yuliansyah<sup>4</sup>**

***ABSTRACT***

*This study investigates the influence of factors to the behavioral intention of information technology. The factors used in this study are perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment and perceived informativeness. The result shows that the factor influencing the investor behavioral intention directly is the perceived usefulness of information technology. The perceived usefulness itself is influenced by perceived informativeness and perceived enjoyment. The perceived ease of use doesn't influence the investor behavioral intention either directly or indirectly through the perceived usefulness of information technology.*

*Keywords: behavioral intention, information technology, perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment, perceived informativeness.*

**A. PENDAHULUAN**

Lingkungan bisnis global pada awal *millenium* ini semakin didominasi oleh lalu lintas transaksi secara elektronik (*cyber business transaction*). Upaya organisasi untuk bertahan dalam lingkungan bisnis global sangat tergantung pada kompetensi perusahaan dalam memanfaatkan segala potensi yang terkandung dalam teknologi informasi untuk menerobos berbagai hambatan

---

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

dan mengubah potensi tersebut menjadi peningkatan kecepatan, fleksibilitas, integrasi dan inovasi berkelanjutan (Mulyadi, 2001).

Teknologi informasi merupakan pemampu (*enabler*) organisasi dalam merespon dan memenuhi tuntutan lingkungan bisnis serta mewujudkan inovasi. Teknologi informasi akan bernilai pada saat digunakan organisasi untuk mencapai tujuan strategis dan operasional organisasi. Menurut Wilkinson *et al.* (2000), teknologi informasi bisa memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan sehingga organisasi dapat mengambil keuntungan dan kesempatan dengan menggunakan informasi tersebut.

Oleh karena pentingnya teknologi informasi bagi tujuan strategik dan operasional organisasi, maka banyak organisasi mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membangun teknologi informasi yang memadai. Teknologi informasi sebagai pemampu (*enabler*) organisasi dalam merespon dan memenuhi tuntutan lingkungan bisnis serta mewujudkan inovasi memerlukan pengembangan yang terencana dan terarah sesuai dengan misi organisasi.

Menurut pendapat Ross *et al.* (1996) dalam Adnyana dan Indriantoro (2000), teknologi informasi yang berkualitas adalah teknologi informasi yang dapat diterapkan di dalam suatu organisasi untuk memberikan pemecahan untuk berbagai permasalahan yang mendesak. Kesuksesan penerapan teknologi informasi sangat tergantung pada teknologi itu sendiri dan keahlian individu yang mengoperasikannya. Teknologi informasi akan dikembangkan sesuai dengan kondisi individu pengguna teknologi informasi. Hal ini menyebabkan reaksi individu terhadap teknologi informasi menjadi penting bagi perkembangan teknologi informasi.

Reaksi individu terhadap teknologi informasi berhubungan dengan perilaku individu untuk menggunakan teknologi informasi. Menurut Agarwal dan Karahanna (2000), beberapa penelitian terdahulu memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam menerima teknologi informasi. Contohnya adalah *Innovation Diffusion Theory* (Brancheau dan Wetherbe 1989; Rogers 1995), *Technology Acceptance Model* atau TAM (Davis 1989; Davis *et al.* 1989), *Theory of Reasoned Action* atau TRA (Ajzen dan Fishbein 1980; Fishbein dan Ajzen 1975).

Davis (1993) dalam Agarwal dan Karahanna (2000) mengatakan terdapat faktor *individual beliefs* yang berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan perilaku individu untuk menggunakan teknologi informasi. *Individual beliefs* terbagi menjadi dua, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap suatu teknologi informasi.

Penelitian-penelitian selanjutnya lebih memfokuskan pada *individual beliefs*. Contohnya, Davis *et al.* (1989) memasukkan variabel lain yaitu *perceived enjoyment*, Compeau *et al.* (1999) memasukkan variabel *self efficacy* sebagai faktor yang berpengaruh terhadap perilaku individu

untuk menggunakan teknologi informasi. Penelitian Ducoffe (1996) dan Novi (2003) dalam Suhartono (2005) mengatakan terdapat persepsi nilai informasi yang harus dipertimbangkan dalam intensi penggunaan teknologi informasi. Dua penelitian tersebut menunjukkan persepsi nilai informasi berpengaruh terhadap persepsi kegunaan dalam intensi penggunaan teknologi informasi.

Pada sisi lain, arah dari penelitian adalah mencoba menguraikan perilaku individu untuk menggunakan teknologi informasi, dengan dasar teori psikologi individual. Teori psikologi individual mengatakan perilaku individu untuk menggunakan teknologi informasi cenderung dipengaruhi oleh pengalaman luar biasa (*holistic experience*) individu terhadap teknologi informasi. Menurut Trevino dan Webster (1992) dalam Agarwal dan Karahanna (2000), *holistic experience* individu sesuai dengan teori *cognitive absorption* yang mengatakan kenyamanan (*enjoyment*) subjektif dari tiap individu dalam berinteraksi dengan teknologi secara empiris, merupakan alat prediksi yang signifikan untuk menjelaskan perilaku dan kecenderungan individu untuk menggunakan teknologi informasi.

Menurut Agarwal dan Karahanna (2000), konsep *cognitive absorption* merupakan faktor yang seharusnya mendahului faktor *individual beliefs* terhadap penerimaan teknologi baru. Berdasarkan teori psikologi individu, *cognitive absorption* akan berpengaruh terhadap *individual beliefs*. Alasannya adalah *cognitive absorption* merupakan motivasi internal yang berasal dari pengalaman luar biasa (*holistic experience*) yang terdapat di setiap individu dan mampu membangkitkan *individual beliefs*. *Cognitive absorption* terdiri dari *temporal dissociation*, *focussed immersion*, *control*, *enjoyment* dan *curiosity*.

Sementara itu menurut Zhang, Li, dan Sun (2006), *cognitive absorption* dipengaruhi oleh persepsi kualitas afektif (*perceived affective quality*—PAQ). Sebuah model teori dikembangkan dengan berbasiskan teori psikologi yang menggambarkan hubungan kausalitas antara PAQ, *cognitive absorption*, *cognitive beliefs*, dan intensi penggunaan teknologi informasi. Hasilnya mengindikasikan bahwa PAQ merupakan anteseden atau faktor yang mendahului *cognitive absorption* dan berpengaruh langsung terhadap *cognitive beliefs*.

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intensi penggunaan teknologi informasi. Faktor-faktor yang dipergunakan ada empat macam, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi nilai informasi (*perceived informativeness*) dan persepsi kenyamanan (*perceived enjoyment*). Kedua faktor pertama diadopsi dari *technology acceptance model* (TAM) yang telah banyak dipergunakan dalam penelitian teknologi informasi. Faktor ketiga, yaitu persepsi nilai informasi, diadopsi dari penelitian Ducoffe (1996) dan Novi (2003). Faktor keempat, yaitu persepsi *enjoyment* diadopsi dari penelitian Agarwal dan Karahanna (2000).

## B. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Penelitian mengenai reaksi pengguna atas teknologi informasi (TI) telah banyak diteliti sebelumnya. Menurut Novi (2003) dalam Suhartono (2005), penelitian-penelitian tersebut biasanya didasarkan atas *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) serta *technology acceptance model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis *et al.* (1989). Kedua model tersebut disimpulkan dapat memprediksi intensi serta kepuasan penggunaan teknologi. Meskipun demikian, Novi (2003) mengatakan TAM adalah sederhana dan mudah untuk digunakan namun merupakan model yang kuat dalam membedakan penerimaan pengguna atas teknologi.

Selanjutnya, Novi (2003) mengatakan TAM dapat memberikan dasar yang kuat untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh pada penerimaan pengguna atas teknologi, namun model tersebut hanya berfokus pada perbedaan penggunaan, dan tidak pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perbedaan tersebut, yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Kedua variabel ini ditambahkan oleh Igarria (1997) dalam penelitiannya tentang *personal computing* di perusahaan-perusahaan kecil.

Teknologi internet merupakan salah satu bentuk dari teknologi informasi. Penerimaan pengguna atas teknologi ini juga telah diteliti oleh Agarwal dan Karahanna (2000) yang menggabungkan model perkembangan TAM Igarria (1997) dengan model *cognitive absorption*. *Cognitive absorption* didefinisikan dengan sebagai situasi dan pengalaman yang menghasilkan suatu keadaan perhatian dan memikat yang begitu dalam, bagi individu yang mengalami situasi atau pengalaman tersebut. Tellegen dan Atkinson (1974) dalam Agarwal dan Karahanna (2000) mengatakan *cognitive absorption* adalah sifat atau watak dari individu. Watak individu tersebut berupa dimensi intrinsik individu yang membuat individu mencurahkan seluruh perhatiannya kepada objek yang menarik individu tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba untuk meneliti *cognitive absorption*. Csikszentmihalyi (1990) dalam Agarwal dan Karahanna (2000) mendefinisikan *cognitive absorption* sebagai suatu keadaan perasaan yang mengendalikan, kehilangan kesadaran diri sendiri dan perpindahan waktu yang berhubungan simbol-simbol, seperti matematika dan bahasa komputer. Berdasarkan hasil penelitian dari Csikszentmihalyi (1990), Trevino dan Webster (1992) dalam Agarwal dan Karahanna (2000) mengatakan *cognitive absorption* adalah sebuah elemen yang sangat penting untuk mengerti hubungan manusia dengan teknologi. *Cognitive absorption* merupakan perantara dari perilaku yang berhubungan teknologi.

Selanjutnya, dimensi dari *cognitive absorption* diproksikan menjadi 5 dimensi sehubungan dengan teknologi informasi. Dimensi tersebut adalah:

1) *Temporal dissociation*

*Temporal dissociation* adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengetahui perjalanan waktu pada saat melakukan interaksi dengan teknologi informasi.

2) *Focussed immersion*

*Focussed immersion* adalah kedalaman perhatian seseorang pada saat melakukan interaksi dengan teknologi informasi.

3) *Control*

*Control* adalah persepsi menguasai tugas atau situasi pada saat berinteraksi dengan teknologi informasi.

4) *Curiosity*.

*Curiosity* adalah tingkat keingintahuan seseorang yang timbul pada seseorang ketika melakukan interaksi dengan teknologi informasi.

5) *Enjoyment*,

*Enjoyment* adalah aspek kenyamanan yang tinggi pada seseorang ketika melakukan interaksi dengan teknologi informasi.

Webster *et al.* (1993) dalam Agarwal dan Karahanna (2000) selanjutnya mengembangkan skala multi item untuk mengukur 4 dimensi dari *cognitive absorption*. Mereka berpendapat bahwa *cognitive absorption* berhubungan dengan karakteristik khusus dari *software* dan dengan perilaku penggunaan teknologi. Alat statistik yang digunakan adalah analisis korelasi dan data berasal dari mahasiswa MBA. Hasilnya adalah dimensi *cognitive absorption* berhubungan dengan penerimaan teknologi. Pada penelitian selanjutnya, Agarwal dan Karahanna (2000) menambahkan variabel *enjoyment* untuk menjelaskan mengapa pengguna yang berperilaku dengan cara tertentu terhadap teknologi informasi. Peneliti menggunakan subjek siswa dalam suatu praktikum statistik. Hasilnya *cognitive absorption* berhubungan dengan penerimaan teknologi.

Suatu proses pengambilan keputusan selalu membutuhkan berbagai macam informasi sebagai pertimbangan. Suatu informasi akan berguna dalam proses pengambilan keputusan jika informasi tersebut bernilai bagi pengambil keputusan. Nilai informasi pada internet telah diteliti oleh Ducoffe (1996), yang meneliti tentang persepsi nilai periklanan di *Web*. Salah satu faktor motivasional yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah persepsi nilai informasi (*perceived informativeness*), yang kemudian dikembangkan oleh Novi (2003) dalam kaitannya dengan persepsi kegunaan.

Penelitian ini mencoba mengadopsi ketiga penelitian tersebut, yaitu penelitian Igbaria (1997), penelitian Agarwal dan Karahanna (2000), dan Ducoffe (1996) yang dikembangkan Novi (2003). Variabel penelitian diambil dari ketiga penelitian tersebut, yaitu variabel persepsi

kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi nilai informasi dan persepsi kenyamanan. Variabel-variabel tersebut diadopsi dengan beberapa penyesuaian untuk tujuan penelitian. Model penelitian dapat digambarkan pada gambar I

## 1. Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan

Novi (2003) dalam Suhartono (2005) mengatakan persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai penilaian seseorang mengenai suatu teknologi bahwa tidak perlu kemampuan yang tinggi untuk menggunakannya. Davis (1989) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu variabel kausal yang mempengaruhi persepsi kegunaan. Selanjutnya, Davis (1989) mengatakan persepsi kemudahan penggunaan merupakan aspek penting dalam interaksi manusia dengan komputer. Persepsi kegunaan sendiri didefinisikan sebagai derajat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja kerjanya. Persepsi kegunaan merupakan variabel yang penting dalam model TRA maupun TAM. Anandarajan *et al.* (2002) dalam penelitiannya juga menggunakan hubungan sebab akibat antara kedua variabel ini, dengan variabel moderat berupa faktor budaya di negara berkembang. Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berhubungan positif dengan persepsi kegunaan.

Model penelitian sebelumnya menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berhubungan positif dengan persepsi kegunaan. Adams *et al.* (1992) mengatakan seseorang akan lebih tertarik pada teknologi yang tidak perlu banyak usaha (*effort*) untuk menggunakan teknologi tersebut. Dyness dan Hogarth (1987) dalam Adnyana dan Indriantoro (2000) mengatakan teknologi informasi akan berguna jika individu mudah untuk menggunakan teknologi informasi atau *user-friendly*. Davis *et al.* (1989) mengatakan jika seseorang merasa mudah untuk menggunakan suatu teknologi, dia berharap teknologi tersebut akan bermanfaat bagi dirinya. Penelitian Davis *et al.* (1989) berkaitan dengan penerimaan teknologi *word-processing software*.

Dengan demikian, diharapkan bahwa dalam penelitian ini, semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi, maka persepsi kegunaan teknologi informasi semakin tinggi juga. Model ini dapat dinyatakan dalam hipotesis penelitian sebagai berikut:

*H1 : Persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi berhubungan positif dengan persepsi kegunaan teknologi informasi.*

## 2. Persepsi Nilai Informasi

Variabel persepsi nilai informasi merupakan variabel yang dikembangkan oleh Ducoffe (1996). Penelitian Ducoffe (1996) mengatakan variabel persepsi nilai informasi berhubungan secara langsung dengan variabel nilai periklanan, yang salah satu indikatornya adalah persepsi kegunaan. Indikator-indikator yang lain tidak dimasukkan dalam penelitian

ini karena tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi nilai informasi berhubungan secara positif dengan persepsi kegunaan.

Penelitian Novi (2003) dalam Suhartono (2005) mendukung pernyataan di atas. Penelitian ini meneliti pengaruh persepsi nilai informasi suatu *web site* investasi terhadap persepsi kegunaan *web site* investasi. Hal ini merupakan pengembangan dari *technology acceptance model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis *et al.* (1989) dan penelitian Ducoffe (1996). Hasilnya adalah persepsi nilai informasi suatu *web site* investasi berhubungan secara positif terhadap persepsi kegunaan *web site* investasi

Selanjutnya, Novi (2003) mengatakan bahwa semakin pengguna merasa suatu informasi dalam suatu teknologi informasi mempunyai nilai lebih dibandingkan informasi lain, maka pengguna juga akan semakin merasa bahwa teknologi informasi tersebut berguna dalam mengambil keputusannya. Sebaliknya, jika informasi tersebut tidak memberikan nilai lebih bagi pengguna atau bahkan tidak bernilai sama sekali dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh sumber lain, maka pengguna akan merasa bahwa teknologi informasi tidak berguna dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

*H2 : Persepsi nilai informasi dalam teknologi informasi akan berhubungan secara positif dengan persepsi kegunaan teknologi informasi.*

### **3. Persepsi Kenyamanan**

Menurut Bem (1972) dalam Agarwal dan Karahanna (2000), kaitan antara persepsi kenyamanan dengan persepsi kegunaan dapat dijelaskan dengan teori *self perception*. Teori ini mengatakan bahwa setiap individu akan merasionalisasikan tindakannya. Setiap individu yang mengalami suatu situasi yang nyaman akan berusaha untuk berada dalam keadaan tersebut untuk waktu yang lama. Bahkan individu tersebut akan berusaha untuk mengulangnya. Selanjutnya, persepsi kenyamanan yang merupakan salah satu dimensi *cognitive absorption*, diharapkan akan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Festinger (1976) dalam Agarwal dan Karahanna (2000) mengatakan rasionalisasinya adalah jika individu menghabiskan waktu dan menikmati untuk sesuatu, berarti sesuatu tersebut pasti berguna. Penelitian Agarwal dan Karahanna (2000) mendukung persepsi kenyamanan berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan. Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut :

*H3 : Persepsi kenyamanan dalam teknologi informasi akan berhubungan secara positif dengan persepsi kegunaan teknologi informasi.*

### **4. Intensi Penggunaan Teknologi Informasi**

Intensi penggunaan teknologi merupakan bagian dari model asli TRA. Intensi penggunaan teknologi adalah kecenderungan individu untuk menggunakan suatu teknologi tertentu. Davis *et al.* (1989) menyatakan bahwa intensi penggunaan teknologi dapat diprediksi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Ada beberapa penelitian empiris yang memperkuat signifikansi persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan dalam memprediksi intensi. Berdasarkan penelitian Davis (1989) mengenai *technology acceptance model*, ketertarikan penggunaan teknologi dapat diprediksi dengan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Persepsi kegunaan adalah tingkat kepercayaan seseorang jika menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Perasaan kegunaan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan untuk menggunakan suatu teknologi. Hal ini disebabkan, jika individu merasa suatu teknologi berguna bagi dirinya, maka individu tersebut akan cenderung untuk menggunakan teknologi tersebut.

Hal ini didukung penelitian Davis *et al.* (1989) yang mengatakan jika seseorang merasa suatu teknologi *word-processing software* yang baru bermanfaat bagi dirinya, orang akan cenderung untuk menggunakan teknologi *word-processing software* baru tersebut. Hasil ini didukung oleh penelitian Mathieson (1991) dalam Agarwal dan Karahanna (2000), yang meneliti penerimaan terhadap teknologi *spreadsheet software* dan penelitian Adams *et al.* (1992) mengenai *productivity software*.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Adnyana dan Indriantoro (2000) mengungkapkan adanya *Theory of Reaction Action*. Teori tersebut mengatakan bahwa seseorang akan menggunakan komputer jika seseorang tersebut melihat adanya manfaat atau hasil positif dari penggunaan komputer tersebut. Prediksi intensi penggunaan teknologi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan juga dilakukan dalam model penelitian Agarwal dan Karahanna (2000). Penelitian tersebut juga berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara persepsi kegunaan atau persepsi kemudahan penggunaan dan intensi penggunaan teknologi untuk menggunakan teknologi internet oleh siswa.

Penelitian ini juga akan mengadopsi model hubungan antara persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, serta intensi keperilakuan untuk menggunakan teknologi informasi. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, persepsi kegunaan teknologi informasi bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan diharapkan mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan intensi untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan. Jika pengguna merasa bahwa teknologi informasi berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka pengguna tersebut cenderung akan menggunakan teknologi informasi kembali saat akan mengambil keputusan. Pernyataan tersebut diwujudkan dalam hipotesis berikut :

H4 : *Persepsi kegunaan teknologi informasi berhubungan secara positif dengan intensi pengguna untuk menggunakan teknologi informasi.*

*Perceived ease of use* atau persepsi mudah menggunakan adalah penilaian seseorang mengenai suatu teknologi bahwa tidak perlu kemampuan yang tinggi untuk menggunakannya. Adams *et al.* (1992) mengatakan seseorang akan lebih tertarik pada teknologi, yang tidak perlu banyak usaha (*effort*) untuk menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, Davis (1989) mengatakan persepsi mudah menggunakan merupakan aspek penting dalam interaksi manusia dengan komputer. Dyness dan Hogarth (1987) dalam Adnyana dan Indriantoro (2000) mengatakan teknologi informasi akan berguna jika individu mudah untuk menggunakan teknologi informasi atau *user-friendly*. Davis *et al.* (1989) mengatakan jika seseorang merasa mudah untuk menggunakan suatu teknologi, dia berharap teknologi tersebut akan bermanfaat bagi dirinya. Penelitian Davis *et al.* (1989) berkaitan dengan penerimaan teknologi *word-processing software*.

Pengguna yang merasa mudah dalam menggunakan teknologi informasi akan cenderung menggunakan teknologi informasi saat akan mengambil keputusan. Dengan demikian, semakin besar persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi oleh pengguna, maka akan semakin tinggi intensi pengguna untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut :

H5 : *Persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi oleh pengguna berhubungan secara positif dengan intensi pengguna untuk menggunakan teknologi informasi.*

## C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Penelitian

Kuesioner disebarkan secara langsung oleh peneliti adalah sejumlah 400. Kuesioner yang dikembalikan adalah sebanyak 364 kuesioner, sehingga tingkat respon penelitian ini adalah sebesar 91 %. Kuesioner yang tidak dapat digunakan sejumlah 6 kuesioner disebabkan pengisian yang tidak lengkap oleh responden. Dengan demikian, terdapat 358 kuesioner yang dapat digunakan sebagai data penelitian.

Jumlah sampel tersebut telah memenuhi syarat minimal pengolahan data dengan menggunakan SEM. Sampel minimal yang harus ada pada model penelitian ini adalah sebanyak 325 sampel, yaitu *estimated parameters* (65) dikalikan dengan 5.

### 2. Pengujian Data dan Model Penelitian

Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas indikator-indikator pengukur konstruk. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor untuk mengetahui apakah indikator-indikator penelitian dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk atau variabel dalam penelitian. Analisis faktor ini dilakukan untuk masing-masing variabel yang ada. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1. Kriteria penyaringan indikator untuk suatu konstruk adalah sebesar minimal 0,50. Kriteria ini mengikuti kriteria Hair et al.(1998) untuk sampel antara 120–150. Seperti tampak pada tabel 1, indikator – indikator semua variabel laten penelitian ini mempunyai *factor loading* lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut dapat diterima sebagai pengukur variabel laten penelitian.

Uji kekonsistenan indikator-indikator dalam satu variabel dilakukan dengan uji reliabilitas *Cronbach Alpha*. Nilai *alpha* untuk persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi nilai informasi, persepsi kenyamanan dan persepsi intensi berperilaku untuk menggunakan, berturut-turut adalah 0,770; 0,8492; 0,8658; 0,7914 dan 0,8037. Nilai tersebut telah melampaui *rule of thumb alpha* sebesar minimal 0.60. Jadi data penelitian ini juga telah lolos uji reliabilitas.

Model tersebut juga diuji lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian model penelitian teoritis dan model aktual yang ada pada populasi. Indikator pengujian ini menggunakan kriteria yang disarankan dalam Hox dan Bechger (1999) yang mencakup pengujian *degrees of freedom* (df), *goodness of fit index* (GFI), *adjusted GFI* (AGFI), *normed-fit index* (NFI), *Tucker-Lewis index* (TLI), dan *root mean square error of approximation* (RMSEA).

Nilai-nilai indikator kesesuaian model penelitian beserta kriteria penerimaan model tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Model penelitian tidak berbeda dengan model yang ada dalam populasi, dengan df sebesar 1 (positif). Kesesuaian model dapat dikatakan baik jika nilai GFI, AGFI, NFI, dan TLI lebih besar dari 0,95. Nilai aktual indikator-indikator tersebut adalah 0,998; 0,982; 0,991; 1,104 yang menunjukkan bahwa model penelitian sesuai dengan kriteria. Hal ini didukung oleh nilai RMSEA yang juga telah memenuhi kriteria, yaitu sebesar 0.

### **3. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan melihat hasil *regression weights* pada *output* AMOS 4.0. Agar suatu hipotesis penelitian diterima, maka nilai mutlak *critical ratio* (CR) suatu hubungan regresi harus lebih besar dari 1,96 untuk tingkat signifikansi 0,05 (Hox dan Bechger 1999). Besarnya *regression weights* penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3. Sesuai dengan model penelitian, maka ada 5 hubungan regresi yang tampak pada pengujian regresi tersebut.

Hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan pada hipotesis 1 mempunyai nilai mutlak CR sebesar 0,590, yang berarti lebih kecil dari 1,96. Dengan demikian, tidak ada cukup bukti untuk menerima H1. Dengan kata lain, persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan teknologi informasi (internet) tidak berhubungan dengan persepsi kegunaan pada teknologi informasi (internet).

Hipotesis 2 yang menguji hubungan antara persepsi nilai informasi dan persepsi kegunaan menunjukkan nilai mutlak CR sebesar 3,891 (lebih besar dari 1,96). Dengan demikian, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pengguna atas nilai informasi pada teknologi informasi (internet) mempunyai hubungan positif dengan persepsi pengguna atas kegunaan teknologi informasi (internet).

Nilai mutlak CR untuk hipotesis ketiga, yaitu untuk hubungan antara persepsi kenyamanan dan persepsi kegunaan, adalah sebesar 4,807. Karena nilai tersebut lebih besar dari 1,96, maka H3 diterima. Dengan kata lain, ada hubungan positif antara persepsi pengguna atas kenyamanan teknologi informasi (internet) dengan persepsi pengguna atas kegunaan teknologi informasi (internet).

Nilai mutlak CR untuk hipotesis keempat, yaitu untuk hubungan antara persepsi kegunaan dan intensi berperilaku, adalah sebesar 2,029. Karena nilai tersebut lebih besar dari 1,96, maka H4 diterima. Dengan kata lain, ada hubungan positif antara persepsi pengguna atas kegunaan teknologi informasi (internet) dengan intensi berperilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi (internet) di masa yang akan datang.

Hipotesis terakhir (H5) yang menguji hubungan langsung antara persepsi kemudahan penggunaan dan intensi berperilaku menunjukkan nilai CR yang tidak signifikan (1,316). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persepsi pengguna atas kemudahan penggunaan teknologi informasi (internet) tidak berhubungan langsung dengan intensi berperilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi (internet) di masa yang akan datang.

## D. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

### 1. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor motivasional terhadap intensi berperilaku (*behavioral intention*) penggunaan teknologi informasi (internet) di masa yang akan datang oleh pengguna. Faktor-faktor motivasional yang dipergunakan ada 4 macam, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi nilai informasi (*perceived informativeness*) dan persepsi kenyamanan (*perceived enjoyment*).

Ada lima hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian, dan tiga diantaranya signifikan. Dari hasil pengujian model struktural, terlihat bahwa faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi pengguna dalam menggunakan teknologi informasi (internet) di masa yang akan datang adalah faktor persepsi kegunaan, persepsi nilai informasi, dan persepsi kenyamanan dalam teknologi informasi. Hal ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Agarwal dan Karahanna 2000; Ducoffee 1996; Novi 2003).

Faktor motivasional yang lain, yaitu persepsi kemudahan penggunaan teknologi informasi (internet), tidak terbukti signifikan dalam mempengaruhi persepsi kegunaan teknologi informasi (internet) dalam proses pengambilan keputusan. Hasil tersebut juga konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya (Agarwal dan Karahanna, 2000; Novi, 2003), meskipun juga tidak konsisten dengan beberapa penelitian yang lain (Igbaria et al. 1997; Anandarajan, 2002). Persepsi kemudahan penggunaan internet oleh pengguna juga tidak berpengaruh langsung terhadap intensi berperilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi (internet) dalam proses pengambilan keputusan pengguna. Kesimpulan ini konsisten dengan hasil penelitian Novi (2003) namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Agarwal dan Karahanna (2000).

Ketiadaan pengaruh dari faktor kemudahan penggunaan internet tersebut mungkin disebabkan oleh kondisi responden. Responden adalah mahasiswa S1 Akuntansi yang dikondisikan untuk mencari informasi yang berguna bagi penyelesaian tugas-tugas perkuliahan. Salah satu sumber informasi yang memadai adalah internet. Hal ini menyebabkan responden akan tetap berusaha mencari informasi di internet meskipun mengalami kesulitan. Selain itu, sebagian besar responden adalah orang yang telah relatif berpengalaman dengan internet. Hal ini mungkin juga menyebabkan bias responden karena orang yang mempunyai pengalaman yang lama dengan internet cenderung akan mudah dalam menggunakan internet, sehingga akan sulit untuk mendapatkan data yang objektif tentang variabel ini.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengguna teknologi informasi mempunyai persepsi bahwa teknologi informasi khususnya internet berguna dalam proses pengambilan keputusan

pengguna. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan faktor kenyamanan berperan dalam penerimaan teknologi informasi. Hal ini berimplikasi pada pembuatan teknologi informasi yang harus didesain agar pengguna merasa nyaman untuk menggunakannya.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama, responden penelitian ini adalah mahasiswa S1. Kemungkinan, jika respondennya adalah berbeda, hasilnya berbeda. Selain itu, pengguna teknologi informasi adalah tidak hanya mahasiswa, seperti investor (Novi, 2003), karyawan perusahaan (Adams *et al.* 1992). Kedua, model yang diajukan dalam penelitian ini masih berupa model yang sederhana dalam penelitian tentang penerimaan teknologi oleh pengguna. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, telah banyak diungkapkan berbagai variabel yang juga turut mempengaruhi intensi berperilaku user serta tingkat penggunaan teknologi tersebut, seperti misalnya *cognitive cognitive absorption* (Agarwal dan Karahanna, 2000). Penelitian ini hanya menguji salah satu dari lima proksi *cognitive cognitive absorption*, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk keempat proksi lainnya. Selain itu, menurut Novi (2003) dalam Suhartono (2005) terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Contohnya adalah faktor budaya (Anandarajan *et al.* 2002), pengalaman (Liaw, 2002), jenis kelamin (Venkatesh dan Morris, 2000). Variabel-variabel tersebut dapat diuji pula dalam penelitian di masa datang.

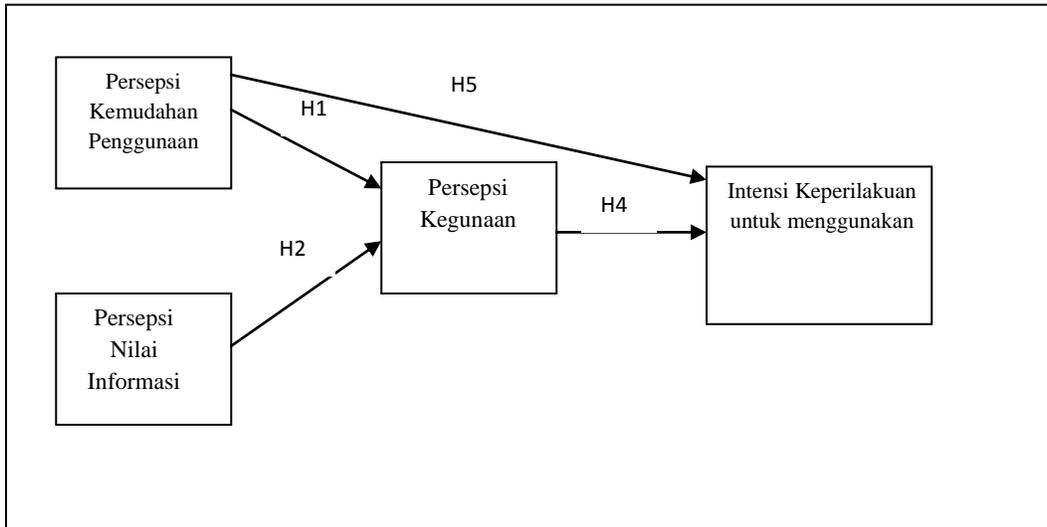
#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D.A., R.R. Nelson., dan P.A. Todd. 1992. Perceived Usefulness, Ease of Use, and Usage of Information Technology, A Replication. *MIS Quarterly*. Vol. 16. Juni. 227–247.
- Agarwal, Ritu dan Elena Karahanna. 2000. Time Flies When You're Having Fun: Cognitive Absorption and Beliefs about Information Technology Usage. *MIS Quarterly*. Vol.24. No.4. 665-694.
- Anandarajan, Murugan, dan Magrid Igbaria dan Uzoamaka P.Anakwe. 2002. IT Acceptance in A Less-developed Country: A Motivational Factor Perspective. *International Journal of Information Management*. Vol. 22.
- Adnyana, I.S.G., dan N. Indriantoro. 2000. Dampak Pengetahuan Teknologi yang dikuasai Akuntan dan Persepsi Manfaat Sistem Informasi Berkaitan dengan Kecocokan Tugas Teknologi terhadap Kinerja Akuntan. *KOMPAK* . Vol. 22. Januari. 459 – 488.
- Compeau, D., C.A. Higgins, S.Huff. 1999. Social Cognitive Theory and Individual Reaction to Computing Technology, A Longitudinal Study. *MIS Quarterly* . Vol. 23. June. 145 – 158.
- Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*. September.

- Davis, F.D., R. Bagozi., and P.R. Warshaw. 1989. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*. Vol. 35. August. 982-1003.
- Ducoffee, Robert H. 1996. Advertising Value and Advertising on the Web. *Journal of Advertising Research*. September/Oktober. 21-35.
- Hair, Joseph F. Anderson, Rolph E. Anderson, R.L Tatham and W.C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*. 5<sup>th</sup> edition. New Jersey. Prentice Hall International Inc.
- Hawkins, Donald T. 1994. Electronic Advertising. On Online Information Systems. *ONLINE*. March.
- Hox, J.J., dan T.M. Bechger. 1999. An Introduction of Structural Equation Modeling. *Family Science Review* . Vol. 11. 354-373.
- Igbaria, Magid. 1997. Personal Computing Acceptance Factors in Small Firms: A Structural Equation Model. *MIS Quarterly*. September.
- Liaw, Shu-Sheng. 2002. An Internet Survey for Perceptions of Computers and the World Wide Web: Relationship, Prediction, and Difference. *Computers in Human Behavior*. Vol. 18. 17-35.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat.
- Novi, Dwi. 2003. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Intensi Penggunaan Web Site Perusahaan Go-Public dalam Proses Pengambilan Keputusan Investasi oleh Investor Potensial. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Venkatesh, Viswanath, dan Michael G. Morris. 2000. Why Don't Men Ever Stop to Ask for Directions? Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior. *MIS Quarterly*.
- Wilkinson, J.W., M.J. Cerullo, V.Raval, and B.W.O.Wing. 2000. *Accounting Information System: Essential Concepts and Applications*. 4th ed.. John Wiley & Sons. Inc.

## Lampiran 1

Gambar I. Model Penelitian





Lampiran 2

**Tabel 1**  
**Uji Validitas dan Reliabilitas Pengukuran**

Kode Items	Factor	Alpha
<i><b>Persepsi kemudahan</b></i>		0,7770
PEOU1	0,802	
PEOU 2	0,713	
PEOU 3	0,745	
PEOU 4	0,836	
<i><b>Persepsi kegunaan</b></i>		0,8492
PU1	0,808	
PU 2	0,816	
PU 3	0,869	
PU 4	0,828	
PU 5	0,782	
PU 6	0,836	
<i><b>Persepsi nilai informasi</b></i>		0,8658
IF1	0,702	
IF2	0,715	
IF3	0,740	
IF4	0,734	

IF5	0,783
IF6	0,721
IF7	0,742
<b><i>Persepsi kenyamanan</i></b>	0,7914
HE1	0,779
HE2	0,899
HE3	0,843
<b><i>Intensi penggunaan</i></b>	0,8037
BI1	0,878
BI2	0,916
BI3	0,741

(Sumber : *Output SPSS*)

**Tabel 2**  
**Goodness of Fit Model Penelitian**

Indikator	Kriteria	Nilai Aktual
Degrees of freedom	Positif	1
GFI	$\geq 0,95$	0,998
AGFI	$\geq 0,95$	0,982
NFI	$\geq 0,95$	0,991
TLI	$\geq 0,95$	1,104
RMSEA	$\leq 0,05$	0,000

(Sumber: Hox dan Bechger (1999) dan *Output* AMOS 4.0)

**Tabel 3**  
**Regression Weights**

	C,R,
Kemudahan → Kegunaan	0,590
Informasi → Kegunaan	3,891
Kenyamanan → Kegunaan	4,807
Kegunaan → Intensi Penggunaan	2,029
Kemudahan → Intensi penggunaan	1,316

(Sumber: *Output* AMOS 4.0)

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN JASA  
PADA LPBM TEKNOKRAT BANDAR LAMPUNG**

Dewi Sukmasari<sup>5</sup>

### ***ABSTRACT***

*Accounting information system is one important aspect in making a accurate, consistent, and reliable financial information. This financial information shows the company's strength to compete in the market. The more financial transaction in a company, the higher need for an accounting information system, which will include information technology in processing data into information, so the procedures that usually done manually can be done by using technology.*

*This research is done to know the effectiveness of LPBM Teknokrat's accounting information system and to discover the factors that affect the accounting information system. The factors observed are the use of technology, data and information accuracy and speed, employees' skills, and performance control. The method used is descriptive, with the employees of LPBM Teknokrat as the research sample. Data analysis using multiple regression for the quantitative analysis and procedure analysis for the qualitative analysis.*

*Research outcome shows that the independent variable, the use of technology, data and information accuracy and speed, employees' skills, and performance control, significantly affects the accounting information system effectiveness of LPBM Teknokrat. The hypothesis was proved that the service sales accounting information system of LPBM Teknokrat is not effective can be accepted.*

*Keyword: accounting information system, service, sales.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

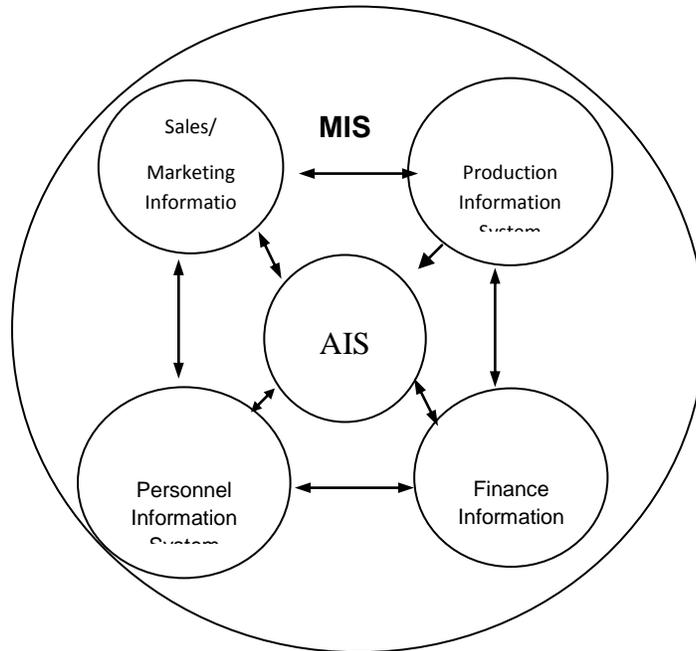
Perusahaan pada era ini harus memiliki teknologi informasi yang canggih dan tepat guna untuk dapat bersaing. Perusahaan dapat dikatakan unggul dalam bersaing jika sistem informasi manajemen yang mencakup sistem informasi akuntansi (SIA) dapat mendukung segala kegiatan dalam perusahaan, terutama dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi akuntansi menjadi pusat dari subsistem-subsistem lain karena sistem informasi akuntansi ini menyediakan informasi bagi setiap subsistem-subsistem lain di dalam sistem informasi manajemen. Subsistem-subsistem lain dalam sistem informasi

---

<sup>5</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

manajemen adalah sistem informasi pemasaran (*sales/marketing information system*), sistem informasi produksi (*production information system*), sistem informasi keuangan (*finance information system*), dan sistem informasi personal (*personnel information system*). Hubungan ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Sistem Informasi Akuntansi sebagai Satu Subsistem Sistem Informasi Manajemen. (Gelinas, Sutton, dan Oram. 1999:1.7)

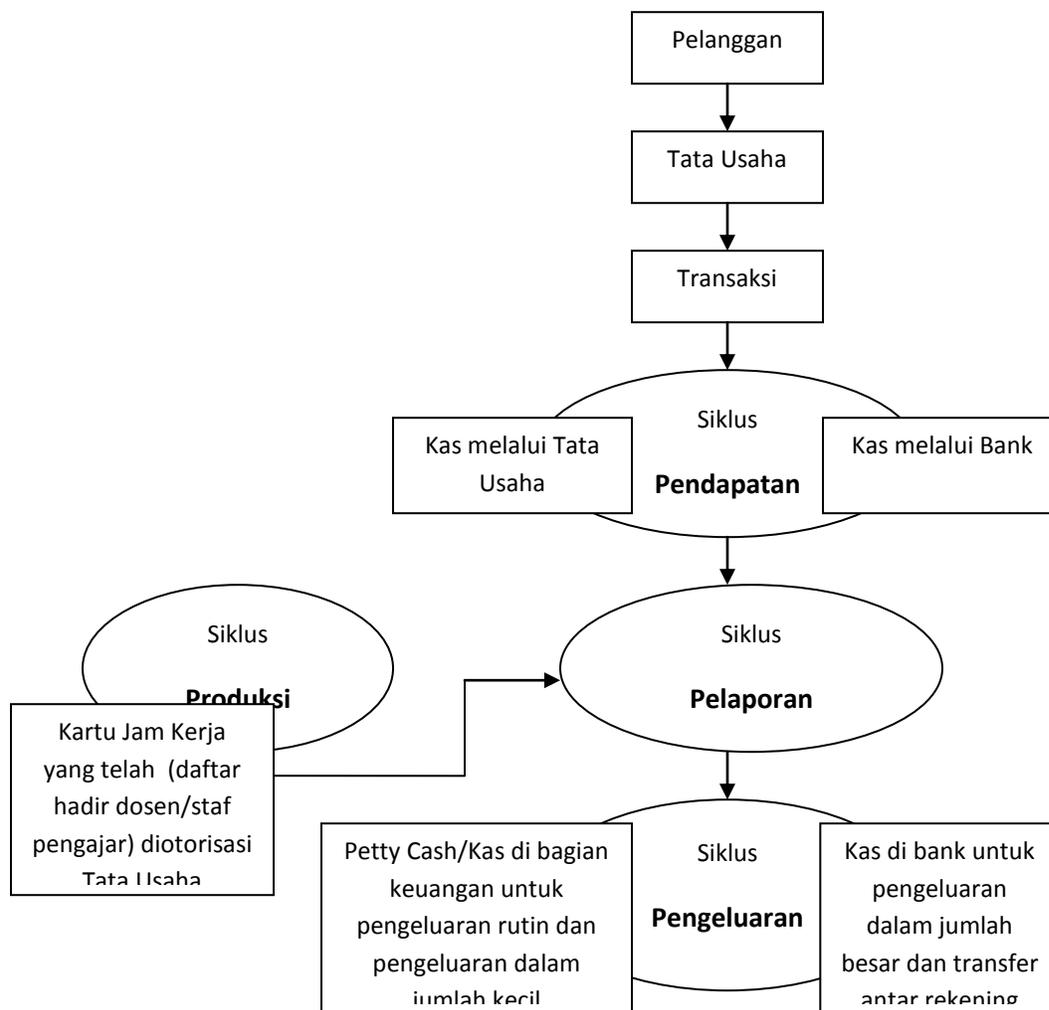
Perusahaan mengupayakan membuat suatu sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini adalah sistem informasi akuntansi yang disusun harus mampu memberikan informasi penting tepat pada waktunya. Efisien adalah sistem informasi akuntansi yang disusun dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, yang paling penting adalah, sistem informasi akuntansi perusahaan harus dapat melindungi harta perusahaan dari penggelapan/penyimpangan (*fraud*). Sistem informasi yang baik ini juga diperlukan oleh perusahaan-perusahaan jasa, tak terkecuali perusahaan jasa pendidikan.

LPBM (Lembaga Pendidikan Bisnis dan Manajemen) Teknokrat adalah lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan kursus satu tahun, antara lain program pendidikan kursus satu tahun Komputer Akuntansi, Bahasa Inggris, Komputer Sekretaris, Komputer Programming, Bahasa Jepang, dan Bahasa Mandarin, dan kursus-kursus singkat. LPBM Teknokrat dalam hal ini menjual jasa, yaitu jasa pendidikan.

Dikaitkan dengan model siklus transaksi, LPBM Teknokrat memiliki setiap siklus transaksi dalam model siklus SIA menurut Bodnar dan Hopwood (1996)

1. Siklus pendapatan dimulai dari penerimaan kas di kasir (Tata Usaha) pada saat pendaftaran, dilanjutkan dengan pembayaran SPP oleh mahasiswa melalui bank. Kas yang diterima di Tata Usaha sebagian disetor di bank, dan sebagian masuk di kas kecil (*petty cash*). Uang yang di bank juga dapat diambil untuk dimasukkan ke dalam kas kecil sewaktu-waktu diperlukan (dengan persetujuan manajer keuangan).
2. Siklus pengeluaran terjadi jika terjadi pengeluaran kas untuk pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan atau pembelian persediaan yang sering terjadi sehari-hari (merupakan rutinitas).
3. Siklus Produksi terjadi ketika mahasiswa datang, masuk kelas, dan belajar. Dosen mengajar di kelas, memberi kuis, ujian mid semester dan semester, serta memberikan nilai mahasiswa yang nantinya diserahkan kepada Tata Usaha. Tata usaha merekap nilai-nilai tersebut dan merangkumnya dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan mempersiapkan sertifikat.
4. Siklus Keuangan sangat berhubungan dengan ketiga siklus lain dari model siklus transaksi sistem informasi akuntansi. Dari mulai siklus penerimaan, yaitu pembayaran uang pendaftaran, program orientasi pendidikan tinggi (propti), uang modul, uang jas almamater, dan uang SPP; ke siklus pengeluaran, yaitu pembelian persediaan alat tulis dan kantor, pembelian peralatan pemeliharaan gedung, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya; ke siklus produksi, setiap dosen merekap kegiatan belajar mengajar di kelas mereka dan rekapitulasi tersebut dihitung dan dibenarkan oleh tata usaha untuk dihitung jumlah gaji dosen yang bersangkutan; semuanya dicatat dan diolah secara akuntansi oleh bagian keuangan untuk kemudian dibuat menjadi laporan keuangan yang akan mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan.

Jika digambarkan, maka model siklus transaksi LPBM Teknokrat menjadi:



Gambar 2. Model siklus transaksi SIA LPBM Teknokrat

Dalam melayani mahasiswa, selain standar pengajaran (baik dosen maupun kurikulum), pelayanan administrasi dan keuangan (penjualan jasa) sangat penting. Waktu menjadi salah satu standar pelayanan yang sangat penting. Kedisiplinan dosen dalam mengajar, tepat waktu dan keefektifan penggunaan waktu mengajar, sudah menjadi suatu ajang bersaing antar lembaga pendidikan sejenis. Namun, kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi dan keuangan kadang menjadi masalah tersendiri dalam penjualan jasa. Di LPBM Teknokrat, standar waktu untuk pelayanan administrasi pun sudah ditentukan.

Jenis Pelayanan	Waktu Normal (menit)
Surat Keterangan Mahasiswa	15
Transkrip	15
Gaji/Jumlah jam mengajar dosen	30
Data mahasiswa	5
Kartu Hasil Studi Mahasiswa	5
Saldo Kas/Bank	5
Data Marketing	10

Sumber: Keputusan Rapat Manajemen 1 Juni 2001

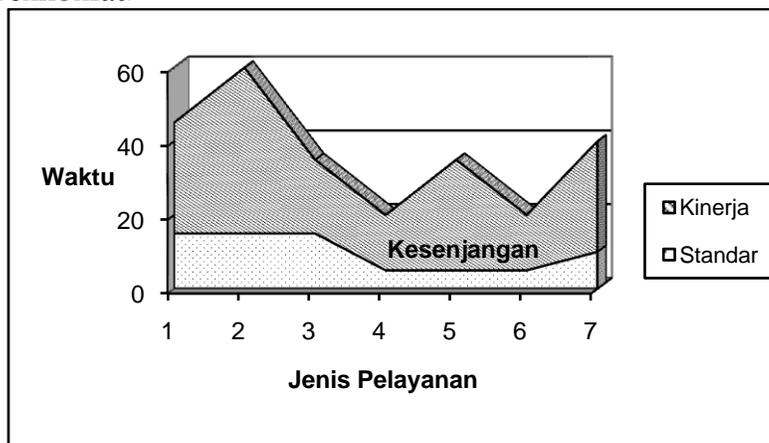
Tabel 2 menjelaskan waktu yang diperlukan dalam melayani mahasiswa, dosen, dan manajemen untuk memperoleh Surat Keterangan Mahasiswa, transkrip, jumlah jam mengajar dosen, data mahasiswa, Kartu Hasil Studi Mahasiswa, saldo kas/bank, data marketing, dan lain-lain.

**Tabel 2. Standar dan Kinerja Pelayanan Administrasi LPBM Teknokrat**

Jenis Kegiatan	Standar (menit)	Kinerja (menit)	Deviasi
Surat Keterangan Mahasiswa	15	30	15
Transkrip	15	45	30
Jumlah jam mengajar dosen	15	20	5
Data mahasiswa	5	15	10
Kartu Hasil Studi Mahasiswa	5	30	25
Saldo Kas/Bank	5	15	10
Data Marketing	10	30	20

Sumber: Hasil *Pra-survey* pada LPBM Teknokrat 2003

Gambar 3 memperlihatkan seberapa jauh perbedaan (deviasi) antara standar waktu pelayanan administrasi dengan kinerja karyawan bagian administrasi dalam melayani mahasiswa di LPBM Teknokrat.



Gambar 3. Standar dan Kinerja Pelayanan Administrasi LPBM Teknokrat

## B. PERMASALAHAN

Dilihat dari Tabel 3 mengenai Standar dan kinerja pelayanan administrasi yang berhubungan dengan transaksi keuangan, terjadi kesenjangan antara standar dengan kinerja. Maka masalah dalam penulisan ini adalah ***Apakah sistem informasi akuntansi penjualan jasa pada LPBM Teknokrat sudah efektif sehingga dapat memenuhi standar waktu pelayanan yang ditetapkan?***

## 1. Batasan Masalah

SIA adalah pilar bagian keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karena luasnya bahasan SIA, maka SIA yang diteliti dalam tulisan ini adalah SIA yang berkaitan dengan pelayanan administrasi, dimana pelayanan administrasi ini adalah kunci utama keunggulan pelayanan. Keunggulan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan akan membuat pelanggan yang ada bertahan dan juga menarik pelanggan baru. Hal ini akan menciptakan *goodwill* perusahaan, yang akan meningkatkan keberlangsungan hidup perusahaan. Pelayanan administrasi ini adalah bagian yang berhubungan langsung dengan bagian keuangan/akuntansi, pada bagian pendapatan. Terminologi yang muncul adalah penjualan jasa, karena metode pembayaran dapat digolongkan sebagai kredit (SPP mahasiswa dapat diangsur).

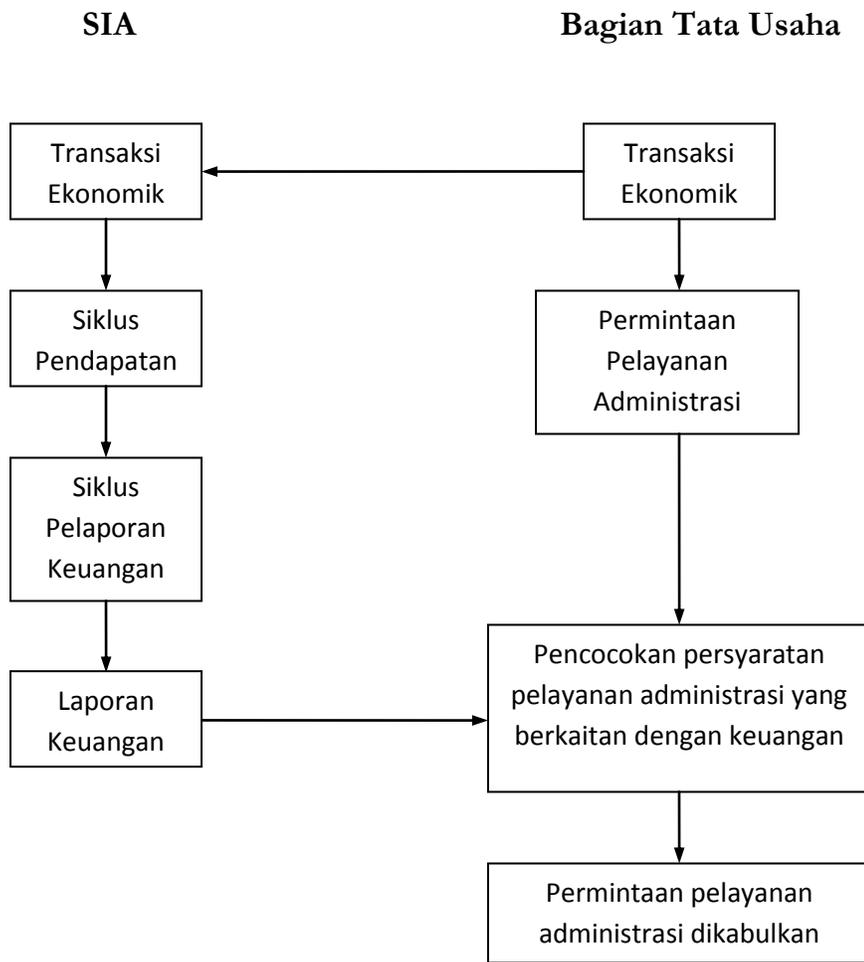
## 2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis SIA Penjualan Jasa secara teoritis dan membandingkannya dengan SIA LPBM Teknokrat, menganalisis penyebab terjadinya perbedaan standar dan kinerja pelayanan administrasi berdasarkan fakta dan/atau kuesioner yang disebarkan, dan mengetahui korelasi  $X_1$  (penggunaan teknologi),  $X_2$  (kecepatan dan akurasi data dan informasi),  $X_3$  (keterampilan karyawan), dan  $X_4$  (pengendalian kinerja), terhadap  $Y$  (efektivitas sistem informasi akuntansi).

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai masukan kepada manajemen LPBM Teknokrat dan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berminat dalam bidang sistem informasi akuntansi sebagai tambahan wawasan keilmuan tentang pentingnya sistem informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan.

## 3. Kerangka Pemikiran

Perusahaan memerlukan informasi. Informasi ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan (informasi merupakan *Decision Support System*). SIA bertujuan menghasilkan informasi untuk berbagai tingkatan manajemen. Di LPBM Teknokrat, selain menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan, SIA ini akan menghasilkan informasi yang dapat mendukung kegiatan administrasi perusahaan. Informasi akuntansi yang dihasilkan berupa laporan keuangan yang selanjutnya akan digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan dan juga oleh karyawan bagian administrasi dalam melayani pelanggan. Untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan, dibutuhkan suatu SIA yang efektif.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

SIA di LPBM Teknokrat diharapkan dapat menunjang pelayanan administrasi. Jika SIA sudah baik, sementara pelayanan dan kecepatan penyediaan informasi tidak lebih baik, maka kemungkinan yang muncul adalah standar perusahaan dalam pelayanan terlalu tinggi, atau karyawan yang belum mampu melaksanakan SIA secara efektif. Juga ada kemungkinan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa yang tidak disertai dengan peningkatan jumlah karyawan memperlambat pelayanan. Dengan SIA yang terkomputerisasi, diharapkan dapat tercipta pelayanan dan kecepatan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

#### 4. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah “sistem informasi akuntansi penjualan jasa di LPBM Teknokrat belum efektif.”

## C. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan
- b. Mempelajari berbagai literatur, majalah, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penulisan ini.
- c. Penelitian Lapangan
- d. Penelitian langsung di perusahaan (LPBM Teknokrat) dengan observasi, wawancara, dan kuesioner.

### 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Lembaga Pendidikan Bisnis dan Manajemen (LPBM) Teknokrat yang berdiri tahun 1986, dengan lokasi di Jl. Kartini 114-120 Tanjungkarang, Bandar Lampung.

### 3. Alat Analisis

- a. Analisis Kualitatif  
Menganalisis sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan, membuat *flowchart* sistem beserta prosedur-prosedur transaksi penjualan jasa.

- b. Analisis Kuantitatif

- 1) Instrumen penelitian

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner yang dibuat terdiri dari daftar pertanyaan yang tertutup, karena alternatif-alternatif jawaban telah ditentukan. Skala penilaian yang digunakan adalah skala interval, yaitu SS (Sangat Setuju) dengan nilai 4, S (Setuju) dengan nilai 3, R (Ragu-ragu) dengan nilai 2, TS (Tidak Setuju) dengan nilai 1, dan STS (Sangat Tidak Setuju) dengan nilai 0.

Validitas kuesioner menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mengukur apa yang diukur (Husein, 2003:73), yang akan diuji dengan memperhatikan hasil jawaban

kuesioner setelah disebar sebanyak dua kali. Dapat dilihat validitasnya dari kesamaan jawaban antara kuesioner yang pertama kali disebar dengan yang kedua.

Sementara reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa nilai yang didapat menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Husein, 2003:80), yang ditunjukkan dengan nilai korelasi ( $r$ ) yang dikuadratkan, yang disebut dengan *coefficient of determination*. Semakin besar angka korelasi, semakin besar koefisien determinasi, semakin rendah kesalahan pengukuran. Cara menguji reliabilitas alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus koefisien *alpha Cronbach*.

Rumusnya adalah:

$$r_{11} = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

dimana:

$r_{11}$  = reliabilitas instrument

$k$  = banyak butir pertanyaan

$\sigma_t^2$  = varian total

$\sum \sigma_b^2$  = jumlah varian butir

Hasil uji reliabilitas alpha Cronbach ini juga didapatkan dengan menggunakan *software SPSS 11.0*

## 2) Sampel

Sampel yang diambil adalah populasi, karena  $n < 30$ .

## 3) Variabel Penelitian

Variabel dependen (tidak bebas) adalah Y, yaitu efektivitas sistem informasi akuntansi. Variable independen (bebas) adalah  $X_1$ , yaitu penggunaan teknologi,

X<sub>2</sub> yaitu kecepatan dan akurasi data dan informasi, X<sub>3</sub> yaitu keterampilan karyawan, dan X<sub>4</sub> yaitu pengendalian kinerja.

#### 4) Teknik Analisis Data

Analisis data akan menggunakan alat bantu komputer dengan menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 11.0.

#### 5) Pengujian Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan diuji dengan regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk dapat mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variable independen, secara individual/parsial ataupun secara bersama-sama/simultan. Untuk menaikkan atau meningkatkan keadaan variable dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variable independen dan sebaliknya (Sugiyono dan Wibowo, 2002:190). Adapun rumus regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + cX_2 + dX_3 + eX_4$$

Adapun Y adalah efektivitas sistem informasi akuntansi

X<sub>1</sub> adalah penggunaan teknologi

X<sub>2</sub> adalah kecepatan dan akurasi data dan informasi

X<sub>3</sub> adalah keterampilan karyawan

X<sub>4</sub> adalah pengendalian kinerja

## 6) Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu multivariable dan univariable. Pengujian multivariate dengan uji regresi logistik, sedangkan uji univariate dengan *compare means* dan *t-test*.

Hipotesis penelitian akan diuji dengan uji t, yaitu uji hipotesis rata-rata. Pada uji hipotesis rata-rata dengan sampel  $\leq 30$ , maka digunakan rumus:

$$t_0 = \frac{X - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$t_0 = \frac{(X - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$$

dimana :

$t_0$  = t hitung

X = skor rata-rata jawaban yang sebenarnya

$\mu_0$  = skor rata-rata jawaban yang diharapkan

$\sigma$  = simpangan baku

n = jumlah responden

Dengan tingkat kepercayaan 95% dan alpha 5%. Hasil uji t ini juga didapatkan dengan menggunakan *software SPSS 11.0*.

Hipotesis:

Ho: sistem informasi akuntansi penjualan jasa di LPBM Teknokrat  
belum efektif

Ha : sistem informasi akuntansi penjualan jasa di LPBM Teknokrat sudah efektif.

Keputusan:

Jika  $-t_{table} \leq t_{hitung} \leq t_{table}$  :  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

Jika  $-t_{table} > t_{hitung} > t_{table}$  :  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

## D. ANALISIS DATA

### 1. Analisis Prosedur-prosedur dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa LPBM Teknokrat

Prosedur-prosedur yang ada dalam Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa pada LPBM Teknokrat terbagi tiga bagian, yaitu:

#### a. Prosedur Pendaftaran Menjadi Mahasiswa LPBM Teknokrat

Prosedur ini meliputi kegiatan yang bermula dari pendaftaran oleh calon mahasiswa, pembayaran uang pendaftaran, pembuatan laporan harian kas oleh tata usaha, penyerahan laporan harian kas beserta uang yang diterima hari tersebut, penerimaan uang oleh bagian akuntansi, penghitungan dan pencocokan uang dengan jumlah setoran pada laporan harian kas, penandatanganan buku harian setoran milik tata usaha sebagai tanda bahwa jumlah yang diterima cocok dengan jumlah yang telah dihitung. Setelah itu, buku setoran harian tata usaha ditinggal untuk dicek nomor urut kwitansi yang tertulis dengan kwitansi yang dilaporkan. Kegiatan ini dilakukan oleh bagian akuntansi. Bagian akuntansi memeriksa laporan harian kas, mencocokkan nomor urut kwitansi dan mengotorisasi laporan harian kas. Selanjutnya jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian, bagian akuntansi akan melakukan koreksi. Bagian akuntansi juga menginput laporan harian kas ke dalam komputer sesuai dengan posnya masing-masing.

#### b. Prosedur Pembayaran Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP), Biaya Program Orientasi Pendidikan Tinggi (Propti), Biaya Jas Almamater, Biaya Modul Ajar, dan Biaya Wisuda.

Prosedur ini meliputi kegiatan pembayaran SPP, Propti, jas almamater, modul, dan wisuda yang dimulai dari mahasiswa meminta slip pembayaran ke bagian administrasi LPBM Teknokrat, yang dilanjutkan dengan pembayaran ke bank, lalu slip tanda bukti pembayaran diserahkan mahasiswa ke bagian piutang yang lalu dicatat ke dalam buku piutang dan diinput ke dalam komputer. Komputer memroses data piutang mahasiswa. *Software* yang digunakan untuk memroses laporan bulanan ini adalah *Microsoft Excel*. Laporan bulanan diprint, satu diserahkan ke bagian akuntansi dan satu untuk arsip. Di bagian akuntansi, laporan bulanan diposting lebih lanjut dan dibuat laporan keuangan. Pada batas akhir pembayaran angsuran, bagian piutang mengecek nama-nama mahasiswa yang belum membayar angsuran SPP, mencatat, dan melakukan penagihan ke kelas-kelas.

#### c. Prosedur Pelayanan Administrasi

Prosedur ini meliputi kegiatan melayani mahasiswa yang dimulai dari permintaan mahasiswa ke tata usaha untuk dibuatkan surat keterangan mahasiswa, transkrip, surat permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa, atau ijazah. Tata usaha mencatat nama dan keperluan mahasiswa sesuai dengan keperluannya. Semua jenis kelengkapan administrasi mahasiswa dicek, baru tata usaha membuat surat yang diminta oleh mahasiswa.

## 2. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa LPBM Teknokrat Berdasarkan Kuesioner

### a. Analisis Kuantitatif

Hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan *software-software Microsoft Excel*, dan *SPSS 11.0*. Digunakan tiga *software* untuk membandingkan cara kerja dan hasil analisis. Ternyata hasil yang didapatkan sama. Namun untuk analisis selanjutnya, penulis mengacu pada hasil perhitungan yang menggunakan *software SPSS 11.0*.

Uji validitas dengan *product-moment Pearson* memperlihatkan angka 0.645 untuk  $X_1$ , 0.562 untuk  $X_2$ , 0.624 untuk  $X_3$  dan 0.754 untuk  $X_4$  yang berarti nilai korelasi antara X dengan Y adalah cukup signifikan, kecuali untuk  $X_2$ , dimana angka korelasinya lebih rendah dibandingkan yang lain. R yang didapatkan dimana  $r^2$  adalah *coefficient of determination* dengan nilai 0.698 yang berarti bahwa 69.8% dari kuesioner dapat memprediksi variabel dependen, yaitu Y, efektifitas sistem informasi akuntansi. Maka kuesioner dapat dinyatakan valid.

Uji reliabilitas dengan rumus alpha Cronbach didapatkan angka 0.8583 (dari lampiran 18 Reliability Analysis – Alpha). Dari table r untuk  $N = 11$ , tingkat signifikansi 5% diperoleh angka 0.602, maka  $0.8583 > 0.602$  sehingga kuesioner dapat dinyatakan reliabel.

Persamaan yang didapat (dari lampiran 17 Hasil Penelitian Menggunakan *Microsoft Excel*, dan lampiran 18 *Regression* dengan menggunakan *SPSS* versi 11.0) adalah :

$$Y = -3.839 + 0.784X_1 - 0.428X_2 + 0.121X_3 + 1.575X_4$$

Persamaan ini berarti setiap penambahan satu nilai pada  $X_1$  akan menambah nilai  $Y$  sebanyak 0.784, yaitu setiap penambahan penggunaan teknologi akan meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi yang ada. Namun sebaliknya, setiap penambahan satu nilai pada  $X_2$  akan menurunkan  $Y$  sebanyak 0.428, maksudnya setiap penambahan kecepatan dan keakuratan data dan informasi akan menurunkan efektivitas sistem informasi akuntansi yang ada. Hal ini dapat dikarenakan teknologi, sistem atau *software* yang ada belum dapat mendukung jika data ditambah baik secara jumlah maupun kecepatannya. Jika terjadi penambahan kecepatan data dan informasi ke dalam sistem informasi yang ada, dapat juga terjadi kelelahan karyawan atau ketidakmampuan staf manajemen dalam mengambil data informasi yang ada untuk pengambilan keputusan karena terlalu banyak data yang keakuratannya tinggi. Setiap penambahan satu nilai pada  $X_3$  akan menambah nilai  $Y$  sebanyak 0.121, yang berarti setiap kali keterampilan karyawan ditambah, maka semakin efektif suatu sistem informasi akuntansi. Jika keterampilan karyawan ditambah, maka kemampuan karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi (dalam hal ini adalah pelayanan administrasi dan keuangan) akan semakin meningkat, yang juga akan meningkatkan kecepatan dan kecekatan dalam bekerja. Setiap penambahan satu nilai pada  $X_4$  akan meningkatkan  $Y$  sebanyak 1.575, yang berarti penambahan pengendalian dalam kinerja akan meningkatkan efektifitas sistem informasi akuntansi.

b. Analisis Kuesioner

Untuk kuesioner bagian A (Penggunaan Teknologi), bagian B (Kecepatan dan Akurasi Data dan Informasi), bagian C (Keterampilan Karyawan) terdiri dari masing-masing enam pertanyaan. Dengan asumsi setiap orang menjawab sangat setuju (SS) dengan nilai empat, maka jumlah nilai kuesioner ketiga bagian ini adalah

$6 \times 4 \times 11 = 264$ . Maka untuk menilai masing-masing bagian dalam kaitannya dengan proses sistem informasi akuntansi yang efektif, maka jumlah nilai kuesioner menjelaskan nilai dengan kriteria nilai:

Sangat Setuju = 212 – 264

Setuju = 160 – 211

Ragu-ragu = 107 – 159

Tidak Setuju = 54 - 106

Sangat Tidak Setuju < 54

c. Penggunaan Teknologi

Jumlah nilai kuesioner bagian ini untuk sebelas orang adalah 207, yang berarti sebagian besar jawaban responden menjawab “Setuju”. Maka responden setuju bahwa penggunaan teknologi di dalam sistem informasi akuntansi LPBM Teknokrat sudah dilaksanakan. Teknologi yang ada cukup mendukung efektivitas sistem informasi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi seperti komputer, printer, *fax*, telepon, interkom, serta *software* yang mendukung kinerja administrasi dan keuangan.

d. Kecepatan dan Akurasi Data dan Informasi

Jumlah nilai kuesioner bagian ini untuk sebelas orang adalah 192, yang berarti sebagian besar responden menjawab “Setuju”. Maka responden setuju bahwa kecepatan dan akurasi data dan informasi di dalam sistem informasi akuntansi LPBM Teknokrat sudah cukup mendukung efektivitas sistem informasi akuntansi. Pernyataan ini didukung dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan bahwa data yang diterima dari Sistem informasi akuntansi yang ada dapat dijadikan alat untuk pengambilan keputusan.

e. Keterampilan Karyawan

Jumlah nilai kuesioner bagian ini untuk sebelas orang adalah 199, yang berarti sebagian besar responden menjawab “Setuju”. Maka responden setuju bahwa keterampilan karyawan di dalam sistem informasi akuntansi LPBM Teknokrat sudah cukup mendukung efektivitas sistem informasi akuntansi. Posisi karyawan sesuai dengan keahliannya. Tidak semua karyawan memahami metode/cara pengambilan data dari *database*. Jawaban terhadap kuesioner mengenai karyawan jarang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas sehari-hari mendapatkan jawaban yang cukup beragam. Responden yang menyatakan tidak setuju ini menjelaskan mengalami kesulitan ketika pekerjaan banyak, sehingga sering bertumpuk dan membuat bingung.

f. Pengendalian Kinerja

Untuk bagian D, Pengendalian Kinerja, ada sedikit perbedaan dalam skor penilaian, karena jumlah pernyataan dalam bagian ini berjumlah 20 butir pernyataan. Jumlah nilai maksimum, dengan asumsi setiap pernyataan dijawab dengan “Sangat Setuju” dengan nilai empat, adalah  $4 \times 20 \times 11 = 880$ . Oleh karena itu kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju = 705 – 880

Setuju	= 530 – 704
Ragu-ragu	= 355 – 529
Tidak Setuju	= 180 – 354
Sangat Tidak Setuju	< 180

Didapat jumlah nilai kuesioner bagian ini untuk sebelas orang adalah 738, yang berarti sebagian besar responden menjawab “Sangat Setuju”. Maka responden menyatakan sangat setuju bahwa pengendalian kinerja di dalam sistem informasi akuntansi LPBM Teknokrat sudah cukup mendukung efektivitas SIA. Dalam pembuatan kelengkapan administrasi seperti surat keterangan mahasiswa, KHS, permohonan magang, ijazah, dll, karyawan selalu konsultasi ke bagian keuangan mengenai masalah pembayaran SPP mahasiswa ternyata tidak selalu dipatuhi oleh karyawan bagian administrasi, yaitu tata usaha. Untuk mengakses data tertentu dari sistem yang ada memerlukan *password*, terutama untuk komputer keuangan. Komputer bagian administrasi juga harus dibuka dengan *password*, namun *password* tidak diganti sesering komputer bagian keuangan.

Perusahaan mengadakan rekrutmen karyawan secara periodik. Pertemuan rutin dengan karyawan dapat dilakukan secara perorangan maupun keseluruhan. Staf manajemen lebih sering mengadakan pertemuan dengan karyawan per jurusan. Staf manajemen juga sering mengadakan evaluasi pengelolaan perusahaan untuk mencocokkan dengan kebijakan yang diterapkan. Evaluasi ini lebih ditekankan pada kesesuaian antara rencana kinerja dan kebijakan yang diambil dengan penerapannya sehari-hari. Dengan demikian dapat diketahui apakah kebijakan yang diambil cocok atau tidak untuk diterapkan di LPBM Teknokrat. Perusahaan memiliki perencanaan pemulihan setelah bencana yang menjelaskan tentang prosedur yang harus diikuti dalam keadaan darurat.

### **3. Analisis Perbandingan *Flowchart* dan Prosedur-prosedur Antara Teori dengan Kenyataan di Perusahaan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap prosedur-prosedur yang ada dan jawaban kuesioner yang disebar, analisis SIA penjualan jasa LPBM Teknokrat adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pada saat pendaftaran, kwitansi masuk ke bagian piutang, sehingga nama pendaftar langsung dicatat dan dimasukkan ke dalam daftar piutang, sehingga jika tidak jadi menjadi mahasiswa di LPBM Teknokrat, akun piutang atas nama calon mahasiswa tersebut dapat dihapus. Namun, yang terjadi di LPBM Teknokrat adalah jika pelanggan baru sampai pada tahap pendaftaran, maka pelanggan baru itu belum menjadi calon mahasiswa, sehingga belum dicatat ke dalam daftar piutang.
2. Baik untuk SPP dan biaya lain-lain, dan biaya wisuda tidak terlalu rumit, karena bagian keuangan hanya mencocokkan rekening koran bank dengan slip yang serahkan mahasiswa ke bagian keuangan (piutang).
3. Pada saat laporan-laporan dari tata usaha (kasir) dan dari bagian piutang masuk ke bagian akuntansi, bagian akuntansi cenderung hanya memposting akun-akun yang ada ke dalam komputer dengan menggunakan *software Microsoft Excel*. Hal ini belum dapat dinyatakan baik, karena dengan menggunakan *Microsoft Excel*, baik akun maupun jumlah semuanya harus dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat laporan keuangan. *Microsoft Excel* hanya mempermudah pada saat penjumlahan saja, namun tidak dapat membantu mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat input data ke komputer. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan yang dibuat dengan *Microsoft Excel* kurang reliabel.

## E. PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji hipotesis dengan uji t didapatkan angka 0.-2.066 (dari lampiran 17 Regression). Dari table t untuk  $N = 11$ , tingkat signifikansi 5% diperoleh angka 2.201, maka  $-2.201 \leq -2.066 \leq 2.201$ , maka  $H_0$ , yaitu sistem informasi akuntansi penjualan jasa LPBM Teknokrat belum efektif, dapat diterima, dan  $H_a$ , yaitu sistem informasi akuntansi penjualan jasa LPBM Teknokrat sudah efektif, ditolak.

## F. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan analisis kuantitatif penelitian ini, dapat terbukti bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, yaitu penggunaan teknologi, kecepatan dan akurasi data dan informasi, keterampilan karyawan, dan pengendalian kinerja, sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi LPBM Teknokrat dengan pengendalian kinerja sebagai satu variabel yang paling berpengaruh dalam efektivitas sistem informasi akuntansi LPBM Teknokrat.

Dilihat baik dari hasil analisis kuantitatif maupun kualitatif, hipotesis penulis bahwa sistem informasi akuntansi penjualan jasa di LPBM Teknokrat belum efektif dapat diterima.

### 2. Saran

LPBM Teknokrat dapat menghubungkan antarkomputer, minimal di bagian pelayanan administrasi, atau Tata Usaha. LPBM Teknokrat disarankan untuk dapat memanggil ahli sistem informasi untuk dapat membuat sebuah sistem database yang berisikan data mahasiswa dari saat dia mendaftar, mendapat nilai, tempat PKL, hingga wisuda. Database ini akan sangat berguna dalam meningkatkan kecepatan mengambil data dari sistem informasi akuntansi yang ada, dan diharapkan data dan informasi yang didapat dari sistem informasi yang ada akurat, lengkap, dan konsisten. LPBM Teknokrat sebaiknya melakukan audit/pemeriksaan terhadap sistem informasi akuntansinya secara menyeluruh dengan memakai jasa dari kantor akuntan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

Bodnar, George H. dan Hopwood, William S. 1996. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Boockholdt, James L. 1999. *Accounting Information System: Transaction Processing and Controls*. Boston: IRWIN/Mc Graw-Hill.

Gelinas, Ulric J.; Sutton, Steve G; Oram, Allan E.. 1999. *Accounting Information Systems*. Ohio: South-Western College Publishing.

Hussey, R. 1995. *Oxford Dictionary of Accounting*. New York: Oxford University Press.

HM, Jogyanto. 1999. *Analisis dan Desain*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi.

Karrenbrock, Wilbert E; Simons, Harry. 1995. *Intermediate Accounting*. Ohio: South-Western College Publishing.

Long, Larry. 1989. *Management Information System*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

- Mason, Robert D.; Lind, Douglas A.; Marchal, William G. 1999. *Statistics Techniques in Business and Economics*. Singapore: Mc Graw Hill.
- Moscove, Stephen A.; Simkin, Mark G.; Bagranoff, Nancy A. 1997. *Core Concepts of Accounting Information System*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Mulyadi. 1997. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Nair, Mohan. 2002. *Sistem Informasi Berbasis Aktivitas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narko. 2000. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Nordbotten, Joan C. 1985. *The Analysis and Design of Computer Based Information System*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Rafick, Ishak. 2001. Jalan Baru Menyehatkan Perusahaan. *Majalah SWA Sembada*. Jakarta: PT Temprint.
- Senn, James A. 1989. *Analysis and Design of Information System*. Singapore: Mc Graw-Hill.
- Sincich, Terry. 1989. *Business Statistics by Example*. New Jersey: Dellen Publishing Company.
- Skousen, K.; Langenderfer, Harold; Albrecht, W. 1991. *Financial Accounting*. Fourth Edition. Ohio: South-Western College Publishing.
- Sujana, Nana, et al. 2003. *Kumpulan Materi Penataran dan Lokakarya Training of Trainers Metodologi Penelitian PTN dan PTS Tahun 2003*. Jakarta: DP3M Ditjen Dikti Depdiknas.
- Umar, Husein. 2001. *Riset Akuntansi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wilkinson, Joseph W. dan Cerullo, Michael J. 1997. *Accounting Information System: Essential Concepts and Application*. New York: John Wiley & Sons. Inc.

# EXPERT SYSTEM; SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KNOWLEDGE

Reni Oktavia<sup>6</sup>

## ABSTRACT

Kebutuhan pengembangan sistem dalam dunia akuntansi menuntut adanya suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat dan akurat. Salah satu sistem yang ditawarkan oleh para pengembang sistem adalah *Expert System* atau sistem pakar. Sistem Pakar ini dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh akuntan dalam menghasilkan laporan, yang pada akhirnya akan dapat digunakan oleh manager dalam mengambil keputusan strategis. Sebagai sebuah sistem buatan manusia, sistem ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam kesempurnaan *knowledge* dan logika yang mendasari dibentuknya sistem pakar ini, selain itu mahalnya perawatan yang dibutuhkan sistem ini masih menjadi kendala implementasi sistem pakar ini. Namun diatas semua keterbatasan ini, sistem pakar merupakan salah satu sistem solutif yang dapat membantu akuntan maupun auditor dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.

## A. PENDAHULUAN

Aplikasi bisnis sistem informasi di dunia telah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun, yang dimulai di negara barat. Sampai dengan tahun 60-an, penggunaan sistem informasi masih sederhana, seperti pengolahan data sederhana, pencatatan manual, dan beberapa aplikasi data processing. Tak lama timbullah konsep sistem informasi manajemen (SIM) yang fokus pada pengembangan aplikasi bisnis yang mengatur *managerial* dan *users* dengan *management report* yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan manajer untuk pengambilan keputusan.

Tahun 70`an mulai dirasakan bahwa SIM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manajer dalam pengambilan keputusan, sehingga lahir konsep *decision suport system* (DSS). Konsep DSS ini lebih lengkap dibandingkan SIM dalam membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 80`an, dunia usaha menuntut adanya perkembangan sistem informasi

---

<sup>6</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

yang lebih baik lagi, bersamaan dengan mulai digunakannya microcomputer, aplikasi *software* dan jaringan telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Pada saat itu dimulai sistem informasi yang berbasis komputer, sebagai pemenuhan tuntutan akan kebutuhan *decision-making* yang cepat.

Ternyata *decision-making* yang cepat saja tidak cukup, tingginya perkembangan teknologi dan tingkat persaingan yang makin ketat mengharuskan manajer harus mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat, sehingga dengannya lahirlah konsep *executif information system (EIS)*. Dengan Sistem ini manajer puncak dapat dengan mudah mendapatkan informasi penting yang mereka inginkan. Dan pada akhir tahun 90`an berkembang konsep tentang sistem informasi yang mengacu pada *artificial intellegent*, yaitu suatu sistem informasi yang didukung oleh sistem expert sebagai konsultan bagi para pengguna dengan cara memberikan pertimbangan atau saran dalam proses pengambilan keputusan penting.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Artificial Intelligence

Pemikiran tentang *artificial intelligence* ini pertamakali dipopulerkan oleh John McCarthy pada tahun 1956. *Artificial intelligence* merupakan sebuah bidang ilmu dan teknologi yang didasari disiplin ilmu komputer, biologi, psikologi bahasa, matematik dan tehnik. Design *artificial intelligence* ini lebih bertujuan untuk menggantikan kemampuan manusia bukan untuk mengganti manusianya. Tujuan dari *artificial intelligence* ini adalah pengembangan komputer yang dapat “berfikir”, melihat, mendengar, berjalan, berbicara dan merasa layaknya manusia. Ide utama dari konsep *artificial intelligence* ini adalah bahwa fungsi komputer dapat berinteraksi dengan kecerdasan manusia, dalam hal penalaran pembelajaran dan pemecahan masalah.

Secara garis besar ruang lingkup *artificial intelligence* dibagi menjadi tiga yaitu; *cognitive science*, *robotics* dan *natural interface* (O`brein (2002))

Dalam lingkup *cognitive science* ini fokus pada penelitian bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana manusia berfikir dan belajar. Dan hasil dari penelitian tentang pemrosesan informasi oleh manusia ini menjadi dasar pengembangan berbagai aplikasi komputer pada *artificial intelligence* yang juga sering disebut dengan sistem yang berbasis *knowledge (knowledge-based system)*. Salah satu pengembangan sistem informasi dengan konsep *artificial intelligence* ini adalah *expert system*, yaitu suatu sistem pakar yang dioperasionalkan dalam suatu sistem informasi yang memasukkan dasar *knowledge* dan beberapa kemampuan penalaran manusia. Termasuk juga didalamnya terdapat suatu sistem yang disebut dengan *adaptive learning system* yang dapat memodifikasi tingkah laku maupun perintah (*task*) yang didasarkan pada informasi yang mereka perlukan dalam pengoperasian sistem ini.

## 2. Expert System

Sistem ini merupakan sistem informasi berdasarkan *knowledge* yang memasukkan *knowledge* sebagai komponen utamanya sebagai bahan pertimbangan atau saran yang akan disampaikan kepada *user* layaknya seperti seorang konsultan. *Expert system* menyediakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang timbul, bahkan terhadap masalah yang paling spesifik sekalipun. System ini juga dituntut untuk mampu menjelaskan alasan dan simpulan atas jawaban yang diberikan pada *user*.

Menurut Cawsey, A (1994), *expert system* didefinisikan sebagai berikut:

*“Expert systems are meant to solve real problems which normally would require a specialized human expert. . . Building an expert system therefore first involves extracting the relevant knowledge from the human expert. Such knowledge is often heuristic in nature, based on useful “rules of thumb” rather than absolute certainties. Extracting it from the expert in a way that can be used by a computer is generally a difficult task, requiring its own expertise. A knowledge engineer has the job of extracting this knowledge and building the expert system knowledge base.”<sup>7</sup>*

Sedangkan menurut Rittenberg dan Schweiger (2003) *Expert system* merupakan program komputer yang didesign menyerupai penilaian pakar akal manusia, yang didasarka pada premise bahwa tidak semua pengambil keputusan mampu menganalisis situasi dan mengambil keputusan secara baik.

Untuk menjalankan fungsinya sistem pakar ini didukung oleh beberapa komponen yang membentuk *expert system* yang terdiri dari *knowledge Base* dan *Software Module* (O`Brein; 2002). Keduanya digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dan juga sebagai penghubung atau komunikator antara pertanyaan *user* dengan jawaban yang diberikan oleh *expert system*. Berikut ini penjabaran tentang kedua komponen pembentuk *expert system* tersebut:

### ☼ *Knowledge Base*

*Knowledge base* pada sebuah *expert system* terdiri dari: (1) fakta-fakta tentang area subjek secara spesifik, (2) aturan dasar yang menjelaskan prosuder timbulnya alasan/simpulan pakar dari sebuah subjek.

### ☼ *Software resources*

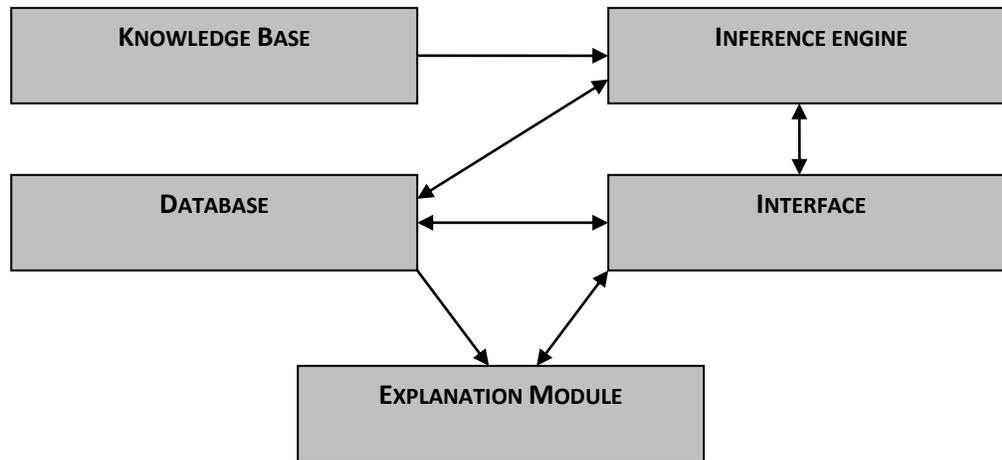
---

<sup>7</sup> Cawsey, A. 1994 Databases and artificial intelligence: Expert systems, introduction. [http://www.cee.hw.ac.uk/\\_alison/](http://www.cee.hw.ac.uk/_alison/)

Seperangkat *software expert system* terdiri dari *inference engine* dan program lainnya yang digunakan untuk meningkatkan *knowledge* dan proses komunikasi dengan para *user*. Program *inference engine* ini memproses *knowledge* yang berhubungan dengan masalah yang spesifik, kemudian membentuk suatu asosisasi dan keterhubungan simpulan atas rekomendasi yang diberikan pada penggunaan *expert system*. Proses penempatan program *knowledge* ini bukanlah bagian dari *expert system* melainkan merupakan *software tools* bagi pengembangan *knowledge-base*, layaknya seperti sebuah sel dari *expert system* yang digunakan untuk pengembangan *expert system* secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Alter (2002) *expert system* dibangun oleh lima komponen utama yaitu (1) *knowledge-base*; sekumpulan data general sebagai supply keahlian yang digunakan dalam sistem (2) *Inference engine*; tool yang akan mengolah data dan *knowledge* yang tersedia sebagai respon dari permasalahan yang disampaikan oleh *user* (3) *explantion module*, (4) *interface*; merupakan media atau methode yang digunakan untuk menghubungkan *expert system* dengan *user* dan (5) *database*; fakta atau data yang berhubungan dengan situasi spesifik yang akan dianalisis. Hubungan kelima komponen *expert system* ini digambarkan dalam bagan berikut:

**Bagan 1. Komponen *Expert System* Ideal**



Menurut alter (2002) istilah “*expert system*” sesungguhnya merupakan istilah yang kurang tepat. Karena menurutnya walaupun sistem ini memiliki sejumlah *knowledge* kepakaran manusia, namu sistem tersebut bukan keahlian yang sesungguhnya karena sistem ini memiliki kekurangan dalam logika berfikir dan tidak benar-benar memiliki pemahaman tentang data dan logika yang mendasari sistem ini.

### **3. Keuntungan dari Expert System**

Manfaat dari penggunaan *expert system* ini adalah sistem ini mampu menangkap sekumpulan keahlian atau keparan pada sebuah sistem informasi berbasis komputer. Manfaat lainnya, *expert system* dapat menjalankan fungsi keahlian manusia dalam berbagai situasi. Oleh karenanya *expert system* merupakan sistem yang berjalan lebih cepat dan lebih konsisten, memiliki *knowledge* dalam beberapa keahlian dan tidak mudah rusak atau bermasalah walaupun digunakan secara overload.

Kelebihan lain yang dimiliki oleh sistem pakar menurut Bodnar dan Hopwood (2001) adalah kemampuannya dalam menganalisis dan membangun sebuah dasar *knowledge* sehingga menghasilkan suatu model keputusan, yang dapat digunakan oleh manajer sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

*Expert system* juga dapat membantu penjagaan/ security dan penduplikatan *knowledge* atas keahlian yang dimiliki suatu sistem pakar. Dan pada akhirnya, *expert system* ini memiliki manfaat yang competitive sebagai sebuah tehnologi informasi. Penggunaan *expert system* secara efektif akan meningkatkan efisiensi proses bisnis secara signifikan, dan dapat menghasilkan product *knowledge*-base yang baru. Dalam bidang audit, *expert system* ini relatif

murah dalam proses pengembangan sistemnya sehingga sangat memungkinkan bagi auditor untuk menggunakan sistem pakar ini (Weber; 1999).

#### 4. Aplikasi dari Expert System

Penggunaan *expert system* melingkupi penggunaan komputer secara interaktif pada saat sebuah pemecahan suatu masalah dieksplorasi, dimana *expert system* berperan sebagai konsultan. Pada saat *user* mengungkapkan sebuah pertanyaan, maka *expert system* akan melakukan pencarian pada *knowledge base* yang dimilikinya, yang dilanjutkan dengan proses *reasoning* terhadap jawaban yang akan diberikan kpd *user*. Jawaban yang diberikan oleh *expert system* mengandung unsur saran (*advice*) terhadap permasalahan yang dihadapi oleh *user*

*Expert system* telah banyak digunakan dengan berbagai type aplikasi, dan pada saat ini keberagaman itu semakin meningkat, bukan hanya pada type aplikasinya tapi juga pada keberagaman bidang ilmu, diantaranya dibidang kesehatan, permesinan, ilmu-ilmu Fisika, dan juga dunia bisnis. Penerapan *expert system* dalam dunia bisnis digunakan dalam meningkatkan tahapan product cycle, dimulai dari proses mendapatkan customer hingga proses pengiriman produk yang dipesan. Menurut O`Brein (2002) terdapat beberapa penerapan *expert system* dalam dunia bisnis diantaranya;

- **Manajemen Keputusan** (*decision management*); memberikan penilaian terhadap suatu kondisi tertentu, dan memberikan pertimbangan alternatif serta merekomendasikan sesuatu dalam proses pengambilan keputusan.
- **Diagnosis/Troubleshooting**; sistem yang dapat mendiagnosis adanya masalah yang timbul.
- **Maintenance/scheduling**; sistem yang mengatur secara otomatis jadwal perawatan terhadap asset perusahaan, membuat jadwal produksi, termasuk juga mengatur jadwal rotasi pegawai serta training yang harus dijalani oleh karyawan.
- **Design/configuration**; sistem yang membantu konfigurasi komponen equipment yang paling optimal yang akan digunakan dalam sebuah proses produksi.
- **Seleksi/klasifikasi**; pada aplikasi ini *expert system* akan membantu *user* untuk melakukan pemilihan terhadap produk ataupun pemilihan proses produksi atas sejumlah alternatif pilihan yang kompleks sehingga akan menghasilkan profit yang optimum.
- **Proses monitoring dan kontrol**; sistem expert juga dapat dimanfaatkan dalam proses monitoring dan kontrol terhadap jalan proses produksi ataupun proses bisnis lainnya.

Terdapat 3 kriteria mengapa *expert system*, dianggap sebagai sistem yang tepat untuk digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam akuntansi khususnya audit (conell; 1987):

1. Keakuratan dari output berupa saran/masukan yang dihasilkan oleh sistem pakar ini dapat dikomperasikan dengan kepakaran yang dimiliki manusia.
2. kemampuan *expert system* dalam menghemat biaya bagi para penggunanya, dan tingginya ROI atas investasi yang digunakan untuk membangun sistem informasi yang berbasis *expert system* ini.
3. Mekanisme penyampaian informasi, advice ataupun alasan yang dihasilkan sistem kepada *user*, dapat diterima dengan jelas dan mudah.

Dalam bidang akuntansi Sistem pakar yang juga disebut sebagai sistem berbasis ilmu pengetahuan banyak yang dikembangkan untuk membantu proses pengembangan bidang akuntansi. *Expert system* ini telah banyak diterapkan dalam bidang akuntansi khususnya auditing, perencanaan pajak (*tax planning*), manajemen konsulting dan training (Haag et al, 2002). Begitu pula dalam bidang *finance*, sistem pakar ini digunakan untuk mengindetifikasi kemungkinan tingkat kecurangan pada departemen perkreditan pada sebuah bank.

## 5. Expert System dalam Bidang Audit

Beberapa perusahaan KAP, kelompok-kelompok internal audit dan independen vendor menggunakan sumber daya yang substansial untuk mengembangkan *expert system* yang digunakan untuk membantu kerja-kerja auditor. Pada saat ini auditor dapat menggunakan *expert system* untuk membantu mereka baik dalam kegiatan mengumpulkan bukti maupun dalam mengevaluasi bukti.

Dalam tulisannya Weber (1999; hal 688) mengungkapkan tiga alasan utama mengapa auditor melakukan pengembangan, maintenance ataupun menggunakan *expert system* sebagai alat untuk membantu pekerjaan auditnya;

1. *Expert system* memungkinkan untuk digunakan oleh auditor dengan berbagai dasar *knowledge* yang dimilikinya, dimana kepakaran merupakan sumberdaya yang langka. Pada saat kaparan digunakan di dalam *expert system* dan dapat diakses serta digunakan secara luas, maka seorang auditor tidak harus memiliki semua keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan proses audit. Konsekuensinya *expert system* harus mampu menyediakan sebuah mekanisme yang dapat mendistribusikan dan dioperasionalkan kepakarannya didalam audit domain.
2. Perkembangan tehnologi yang secara cepat, adalah sangat sulit bagi seorang auditor untuk senantiasa memperbaharui *knowledgenya* melampaui keluasan tehnologi yang digunakan dalam audit.
3. *Expert system* menyediakan suatu mekanisme untuk meningkatkan consensus dan konsistensi di dalam opini auditor. Karena *expert system* dapat digunakan sebagai panduan bagi auditor dalam menjalankan langkah-langkah pemberian opini, sistem ini dapat digunakan untuk meyakinkan auditor bahwa:

- a. informasi ataupun pernyataan yang penting tidak dihilangkan
- b. Auditor mendapatkan informasi signifikan yang dapat mempengaruhi opini mereka
- c. Auditor mendapatkan sinyal jika ada pernyataan/informasi dari klien yang tidak konsisten
- d. Terpeliharannya catatan penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Sehingga dengan digunakannya sistem pakar ini, auditor dapat meningkatkan effectivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun hal ini berbeda dengan yang hasil penelitian yang dilakukan oleh [Baldwin-Morgan \(1993\)](#) yang mengindikasikan bahwa penggunaan *expert system* dalam sebuah kerja audit akan lebih meningkatkan effectivitas audit dibandingkan peningkatan efisiensi audit.

Dalam perkembangannya *expert system audit* oleh Weber (1999) dikelompokkan menjadi 4 kategori fungsi yaitu:

1. Analisis resiko.  
Sistem pakar ini akan mengevaluasi materialitas berbagai tipe resiko yang berhubungan dengan auditee.
2. Evaluasi internal kontrol.  
Didasarkan pada evaluasi reliabilitas atas internal kontrol individual, *expert system* akan mengidentifikasi berjalannya proses internal kontrol yang terdapat dalam suatu sistem informasi akuntansi auditee.
3. Perencanaan audit program.  
Sistem pakar audit akan merekomendasikan sejumlah prosedur audit untuk dijalankan pada berbagai karakteristik dasar auditee yang kemudian diharapkan akan memberikan informasi yang akurat tentang evaluasi internal kontrol dari auditee.
4. *Technical advice*  
Dalam hal ini sistem pakar akan membantu auditor dengan cara memberikan saran/masukan terhadap berbagai masalah teknis yang sering ditemukan dalam proses audit.

Sistem pakar ini juga melakukan identifikasi terhadap lingkungan audit yang rumit, sehingga penggunaan *expert system* yang intensif dapat menghasilkan tahap-tahap audit yang terstandarisasi. ( ). Dalam artikel yang ditulis oleh Boritz and Wensley (1990) penggunaan system berbasis *knowledge* dalam bidang audit dapat melingkupi beberapa prosedur audit seperti *existence, completeness, and valuation assertions* yang berhubungan dengan *sales cycle*. Begitu pula dengan Metodologi yang digunakan pada *expert system* dapat digunakan untuk menandai *knowledge* yang dibutuhkan untuk perencanaan audit dan mengevaluasi program audit. *Expert system* juga dapat dijadikan sebagai media untuk menginvestigasi konsistensi dari *knowledge* yang mendasarinya.

Menurut Messier (2002) pemanfaatan *expert system* dalam suatu sistem informasi akuntansi akan memiliki implikasi pada audit yaitu perlunya peningkatan pengawasan oleh terhadap sistem tersebut oleh auditor. Jika keputusan penting dari organisasi dibuat berdasarkan output dari sistem pakar ini, maka auditor harus lebih fokus dan concern pada integritas dari *knowledge* yang menjadi dasar sistem tersebut, dan bagaimana sistem tersebut membuat suatu keputusan. Contohnya jika seorang klien menggunakan *expert system* untuk menilai *loan-loss reserves*, maka auditor harus mengaudit *knowledge & logic* dari program yang digunakan untuk meyakinkan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh sistem pakar tersebut adalah benar.

## 6. Keterbatasan Expert System

Keterbatasan yang paling utama dari *expert system* timbul dari keterbatasan fokus dari *knowledge*, ketidakmampuan dalam pembelajaran, masalah perawatan sistem, dan biaya pengembangan. *Expert system* akan bekerja secara baik hanya pada pemecahan masalah yang sangat spesifik dalam bidang ilmu yang sangat terbatas. Sistem ini tidak dapat memberikan advice atas masalah yang dihadapi oleh *user* dengan permasalahan yang cakupannya luas. Sistem ini hanya akan bekerja secara baik dengan type operasional yang spesifik atau dalam menjalankan tugas-tugas yang bersifat analitis tetapi tidak dapat memberikan masukan yang bersifat pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini hanya mampu memberikan masukan atau saran yang akan mensupport sebuah keputusan, misalnya memberikan rekomendasi investasi keuangan yang paling baik, tapi ia tidak dapat menganalisis faktor-faktor lain (misal politik, ekonomi dsb) yang berpengaruh terhadap keputusan investasi.

Keterbatasan lain dari *expert system* adalah sulit dan mahalnya pengembangan dan perawatan terhadap sistem. Mahalnya biaya tehnisi, pengadaan hardware dan *software* bisa jadi menghabiskan beban yang lebih banyak dibandingkan manfaat yang diperoleh dalam jangka pendek.

Untuk mengatasi keterbatasan dari *expert system* ini khususnya pada tingginya *cost* yang dibutuhkan dalam menjalankan dan menjaga sistem ini, maka dapat dilakukan kombinasi sistem dengan teknologi *artificial intelligence* lainnya seperti *fuzzy logic* dan *neural network*.

Sedangkan menurut Alter (2002) *expert system* ini memiliki kelemahan dalam menjalankan logika yang digunakan dalam sistem ini, dan didalam memahami data dan logika yang sebenarnya, sehingga hal ini sangat beresiko jika meyakini hasil keputusan dari sistem pakar ini secara indepen. Karena Sistem pakar yang dimiliki manusia diperoleh dari pembelajaran berdasarkan pengalaman, restrukturisasi *knowledge* yang mereka dapatkan, terkadang manusia harus melanggar suatu aturan dalam pengambilan keputusan, menghubungkan keputusan dengan fakta yang relevan (Davis (1984)), hal inilah yang menjadikan keputusan yang disarankan oleh sistem pakar tidak bisa sepenuhnya digunakan tanpa pertimbangan dari manusia.

## 7. Penerapan Expert System

Sebuah perusahaan manufaktur mengembangkan sebuah sistem pakar yang mereka beri nama *Merced Automated Global Information Control System* (MAGIC) yang dapat bekerja layaknya karyawan untuk melakukan penilaian kelayakan calon klien dan melakukan penilaian terhadap benefit yang mungkin didapat. Sistem ini juga memproses kalkulasi keuntungan, kompiient dari klien dan memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan. MAGIC *expert system* ini mampu bekerja dengan lebih dari 9000 aturan sistem yang melayani hampir 130 komputer yang digunakan secara bersama. Sistem ini mampu memberikan respon kepada seluruh kebutuhan klien.

Dampak yang dihasilkan dari penggunaan sistem pakar ini telah mampu meningkatkan efisiensi kerja dari perusahaan ini, tercatat hampir 100% sistem berjalan dengan baik karena 70% kinerja disuport oleh sistem pakar ini. Pelayanan terhadap klien dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 jam. Produktivitas perusahaan meningkat menjadi 114% sejak sistem ini diterapkan. Selain itu juga sistem pakar MAGIC ini mampu menekan biaya per case sebesar 55%, dan mampu menurunkan tingkat kesalahan dari 5% menjadi 2%, sehingga dengan nya mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 3 triliun pada tahun 1993.

Pada banyak perusahaan, *expert system* digunakan sebagai bagian dari sistem akuntansi, contohnya pada penilaian kredit nasabah, penilaian kerugaaian pinjaman, dan bahkan dapat digunakan untuk memprediksi kebangktutan. Sedangkan dalam bidang audit , auditor seringkali menggunakan *expert system* untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti (William; 2002).

*Expert system* dapat juga digunakan untuk melakukan pemilihan terhadap tehnik perencanaan strategis yang dirancang dengan menyediakan suport sistem bagi manajer exsekutif dalam pemilihan media atau tool perencana strategis yang didasarkan pada keterbatasan waktu, skill, keuangan , komputer, input ataupun outputnya. Dalam penggunaannya, sistem pakar ini akan merekomendasikan salah satu tool perencana strategis yang tersedia yang kemudian akan menampilkan sejumlah daftar tahapan strategic planning yang yang dapat dijalankan oleh tool perencanaan strategis dengan [sukses](#).

Dalam penelitian lain *expert system*, sebagai sebuah alat bantu, dianggap mampu meningkatkan kinerja *skill feedback* pada manager yang berpengalaman maupun yang tidak berpengalaman. Sistem pakar ini dapat membantu manager dalam meningkatkan penngetahuan mereka terhadap apa saja yang dapat dijadikan pertimabangan dalam menilai feedback dan untuk meningkatkan keahlian mereka dalam menjalan tugas sebagai seorang menajer, sehingga dapat memilih suatu keputusan yang tepat dalam pemberiaan feedback bagi masing-masing karyawan pada semua situasi dengan lebih objektif. Sistem ini dapat

menyediakan bagi manajer pengetahuan *just in time* sehingga dapat membantu manajer menjadi lebih konsisten dan lebih efektif dibandingkan [sebelumnya](#). Fleet, et al (2005)

Hal ini dipertegas oleh Abdolmohammadi (1987) bahwa penggunaan sistem pakar ini menyediakan perangkat-perangkat pengambilan keputusan pada semua level audit, dan dari hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa auditor cenderung untuk menerima saran ataupun masukan yang dihasilkan dari *expert system*.

### C. SIMPULAN

Kebutuhan pengembangan sistem dalam dunia akuntansi menuntut adanya suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat dan akurat. Salah satu sistem yang ditawarkan oleh para pengembang sistem adalah *expert system* atau sistem pakar. Sistem Pakar ini dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh akuntan dalam menghasilkan laporan, yang pada akhirnya akan dapat digunakan oleh manager dalam mengambil keputusan strategis. Sebagai sebuah sistem buatan manusia, sistem ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam kesempurnaan *knowledge* dan logika yang mendasari dibentuknya sistem pakar ini, selain itu mahalnya perawatan yang dibutuhkan sistem ini masih menjadi kendala implementasi sistem pakar ini.

Namun diatas semua keterbatasan ini, sistem pakar merupakan salah satu sistem solutif yang dapat membantu akuntan maupun auditor dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alter, Steven. *Information System; the Foundation of E-Business*, International Edition, Prentice Hall, 2002.
- Baldwin-Morgan. 1993. The Impact of Expert System Audit Tools on Auditing Firms in the Year 2001: A Delphi Investigation. *Journal of Information Systems* Vol. 7. No. I Spring 1993 pp. 16-14
- Boritz dan Anthony K, P. Wensley. 1990. Structuring the Assessment of Audit Evidence— An Expert Systems Approach Auditing: *A Journal of Practice S Theory*. Vol.9. Suppl. pp49-87
- . 1992. Evaluating Expert Systems with Complex Outputs: The Case of Audit Planning. *Auditing: A Journal of Practice S Theory* Vol. 11. No2. Fall. pp 14-29

- Cawsey, A.. 1994. *Databases and Artificial Intelligence: Expert Systems, Introduction*.  
[http://www.cee.hw.ac.uk/\\_alison/ai3notes/chapter2\\_5.html](http://www.cee.hw.ac.uk/_alison/ai3notes/chapter2_5.html).
- Connell, N.A.D. 1987. Expert System in Accountancy: A review of Some Recent Applications. *Accounting and Business Research*. Vol.17. No 67. pp 221-233.
- Davis, Randall. 1984. *Amplifying Expertise with Expert System*. In Patrick H. Winston and Karen A Prendergast, eds., *the AI business: Commercial Uses of Artificial Intelligence*. Cambridge, MA: MIT Press. pp 17-39
- Fleet, Peterson, dan Ella W. Van Fleet. 2005. Closing the Performance Feedback Gap with Expert Systems. *Academy of Management Executive*. Vol. 19. No. 3. pp 38-52
- Haag, Cummings dan Donald J.McCubbrey. 2002. *Management Information System for the Information Age*. Third edition. McGraw-Hill.
- Messier, William F, Jr. 2002. *Auditing & Assurance Services; A System Approach. Second Edition*. McGraw-Hill.
- O'Brien, James A. 2002. *Management Information Systems; Managing Information Technology in the E-Business Enterprise*. Fifth Edition. McGraw-Hill.
- Rittenberg, Scwieger. 2003. *Auditing Concepts for a Changing Environment*. Fourth Edition, Thomson, South-Wester
- Subramoniam, K.V. Krishnankutty. 2002. An Expert System for the Selection of Strategic Planning Technique. *Kybernetes*. Vol. 31. No. 3/4. pp. 550-560.

# POSITIVISME DALAM AKUNTANSI

Ratna Septiyanti<sup>8</sup>

## *ABSTRACT*

*This study observes the positivism in accounting. The objective is to explain the relationship between positive accounting theory and positivism philosophy mainstream. Accounting is a logical positivism philosophy mainstream. A lot of critics given to the term "positive" that is used in positive accounting theory, but positive accounting theory has positive implication in the development of accounting. This goes along with the August Comte positivism which shows that positivism philosophy has the strength to develop the community.*

*Keywords: positivism, mainstream, accounting theory*

## A. PENDAHULUAN

Teori akuntansi pada awalnya menganut aliran normatif. Teori akuntansi yang diajarkan di dalam kuliah adalah pelajaran yang bersifat normatif, artinya mahasiswa hanya mempelajari hal-hal yang bagaimana praktik akuntansi itu seharusnya. Akuntansi hanya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tugas klerikal. Ilmu akuntansi menjadi sulit untuk berkembang.

Jensen (1976) dan Watts dan Zimmerman (1978 dan 1979) mengajukan teori akuntansi positif karena menganggap bahwa teori akuntansi tidak ilmiah sebab bersifat normatif. Teori akuntansi yang beraliran positif ini membawa banyak kemajuan terutama dalam penelitian-penelitian di bidang akuntansi. Teori akuntansi positif ini juga mendapat banyak kritik dalam hal metodologinya, namun mengingat besarnya implikasi yang ditimbulkan dari aliran positif ini bagi ilmu akuntansi maka teori akuntansi positif ini tetap digunakan.

Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengenai teori akuntansi positif dalam hubungannya dengan aliran filsafat positivisme. Teori akuntansi positif membawa banyak kemajuan bagi bidang ilmu akuntansi. Oleh karena itu, tulisan mengenai positivisme dalam akuntansi ini dirasakan sangat perlu. Penulis termotivasi untuk mengangkat masalah ini karena teori

---

<sup>8</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

akuntansi positif yang banyak mendapat kritik ini ternyata memberikan dampak positif bagi ilmu akuntansi.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Filsafat Ilmu Akuntansi

Chua (1986) menjelaskan bahwa ada dua macam asumsi yang digunakan dalam mengklasifikasi literatur akuntansi, yaitu asumsi tentang ilmu sosial dan asumsi tentang masyarakat. Asumsi ilmu sosial mencakup:

1. Asumsi tentang ontologi dunia sosial yaitu realisme dan nominalisme.
2. Epistemologi dunia sosial yaitu positivisme dan anti positivisme.
3. Sifat manusia (*human nature*) yaitu determinisme dan voluntarisme, dan metodologi yaitu nomotetis dan ideografi.

Asumsi tentang masyarakat mengkarakteristikan literatur akuntansi sebagai teratur atau subjek konflik fundamental.

Kedua asumsi tersebut diklasifikasi oleh Burrell dan Morgan (1979) ke dalam empat paradigma, yaitu *functionalist*, *interpretive*, *radical humanist*, dan *radical structuralist*. Rerangka Burrell dan Morgan ini memiliki beberapa masalah yang berasal dari: (1) penggunaan dikotomi *mutually exclusive* terhadap determinisme dan voluntarisme, (2) kekeliruan dalam membaca Kuhn yang dianggap mendukung pilihan paradigma yang tidak rasional, (3) relativisme laten atas kebenaran dan alasan yang mendukung rerangka mereka, dan (4) sifat keragu-raguan tentang perbedaan antara paradigma *radical structuralist* dan *radical humanist*.

Chua (1986) mengklasifikasi asumsi yang dapat digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan perspektif alternatif dalam akuntansi, sebagai berikut:

1. Keyakinan tentang pengetahuan, terdiri dari 2 asumsi:
  - a. Asumsi epistemologis yang memutuskan apa saja yang dimasukkan sebagai kebenaran yang dapat diterima dengan menspesifikasi kriteria dan proses penilaian klaim terhadap kebenaran itu. Asumsi ini menyatakan bahwa suatu teori dianggap benar jika tidak dapat dinyatakan salah secara berulang oleh kejadian-kejadian empiris.
  - b. Asumsi metodologis yang mengindikasikan metode penelitian yang diharapkan sesuai bagi pengumpulan bukti yang valid.

Kedua asumsi ini saling berhubungan secara erat karena metode penelitian yang benar akan bergantung pada bagaimana kebenaran didefinisikan.

2. Keyakinan tentang realitas fisik dan sosial, terdiri dari 3 asumsi:
  - a. Asumsi ontologis yang berada sebelum asumsi epistemologis dan metodologis serta asumsi ontologis ini mengatur kedua asumsi tersebut.
  - b. Asumsi rencana manusia (*human intention*) dan rasionalitas. Asumsi ini penting karena semua pengetahuan dimaksudkan untuk bertujuan dan dihubungkan dengan kebutuhan dan tujuan hidup manusia.

c. Asumsi keteraturan atau konflik sosial. Asumsi ini tentang bagaimana manusia saling berhubungan dengan manusia lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Asumsi ini penting karena setiap teori sosial, menurut Burrell dan Morgan (1979), membuat asumsi tentang sifat masyarakat manusia.

## **2. Hubungan antara teori dan praktik. Asumsi ini tentang hubungan antara pengetahuan dan dunia empiris.**

Chua (1986) membedakan *mainstream* pemikiran akuntansi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, sebagai berikut:

### 1. *Mainstream* berdasarkan keyakinan tentang realitas fisik dan sosial.

*Mainstream* penelitian akuntansi secara ontologis didominasi oleh keyakinan dalam realisme fisik, yaitu adanya klaim bahwa ada dunia tentang realitas objektif yang ada secara independen dari manusia dan yang telah menentukan sifat dan esensi yang dapat diketahui. Realisme sangat berhubungan dengan pemisahan antara subjek dan objek. Segala sesuatu yang ada di luar sana (objek) dianggap independen dari orang yang mengetahui (subjek). Objek tidak secara simultan sebagai subjek. Pengetahuan diperoleh ketika subjek secara benar mencerminkan dan menemukan realitas objektif ini.

### 2. *Mainstream* berdasarkan keyakinan tentang pengetahuan

Asumsi ini mengarah pada pemisahan antara observasi dan konstruk teoritis yang digunakan untuk menyajikan realitas empiris. Asumsi ini menyatakan bahwa ada dunia observasi yang terpisah dari teori. Teori yang terbentuk dapat digunakan untuk menilai validitas ilmiah teori sebelumnya. Ada dua cara dalam filsafat untuk mengekspresikan keyakinan dalam kemampuan pengujian empiris ini: (a) keyakinan para positivist bahwa ada teori yang independen terhadap pernyataan observasi yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi kebenaran suatu teori (Hempel, 1966), dan (b) argumen para Popperian bahwa oleh karena pernyataan observasi merupakan teori dependen dan dapat dinyatakan salah, maka teori ilmiah tidak dapat dibuktikan tetapi dapat dinyatakan salah (Popper, 1972).

Adanya perbedaan pandangan tentang kemampuan pengujian empiris dalam penelitian akuntansi disebabkan oleh kurangnya klarifikasi mengenai apakah teori dapat diverifikasi atau dapat dinyatakan salah. Hempel (1965) menggunakan *hypothetico-deductive* untuk menyebut suatu penjelasan ilmiah. Hempel berargumen bahwa ada tiga komponen yang dapat menyebabkan suatu penjelasan dianggap ilmiah, yaitu: (1) penjelasan tersebut harus menggabungkan satu atau lebih prinsip umum atau hukum, (2) harus ada beberapa kondisi sebelumnya yang biasanya merupakan pernyataan observasi, dan (3) harus ada pernyataan yang menggambarkan apapun yang akan dijelaskan. Penjelasan menunjukkan bahwa suatu kejadian yang dijelaskan mengikuti prinsip umum, dengan kondisi tertentu sebelumnya juga harus dipegang.

Ada dua konsekuensi dari penggunaan *hypothetico-deductive* dalam merumuskan penjelasan ilmiah, yaitu: (1) hal ini mengarah pada pencarian hukum atau prinsip umum untuk

penurunan hipotesis tingkat bawah atau dengan kata lain penjelasan suatu kejadian dengan cara menyajikan hukum universal, (2) ada hubungan yang kuat antara penjelasan, prediksi, dan pengendalian teknis.

Penggunaan model *hypothetico-deductive* atas penjelasan ilmiah merupakan karakteristik penelitian akuntansi yang paling konsisten. Hal ini disebut sebagai metode ilmiah oleh Abdel-Khalik dan Ajinkya (1979) dan Mautz dan Sharaf (1961). Peasnell (1981) menggunakan istilah *hypotetico-positive*.

3. *Mainstream* berdasarkan keyakinan tentang dunia sosial.

Ada dua asumsi penting tentang dunia sosial, yaitu:

- a. Perilaku manusia diasumsikan bertujuan (*purposive behavior*), sehingga meskipun manusia memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*), mereka tetap selalu dapat mencapai tujuan rasional yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan pilihan dan implementasi strategi tindakan (Simon, 1976; Chambers, 1966; Fama dan Jensen, 1982). Manusia juga dikarakteristikan memiliki tujuan superordinat tunggal yaitu memaksimalkan utilitas (Chua, 1986). Teori principal-agen mengasumsikan bahwa agen akan selalu lebih menyukai bekerja lebih sedikit dibandingkan bekerja lebih banyak (Baiman, 1982), sedangkan teori keuangan mengasumsikan bahwa pemegang saham atau pemegang obligasi akan mengharapkan maksimisasi return harapan yang disesuaikan dengan risiko dari investasi. Asumsi tentang perilaku bertujuan ini penting karena informasi akuntansi telah sejak lama dianggap sebagai teknik rasional yaitu provisi tentang informasi keuangan yang berguna dan relevan untuk pembuatan keputusan ekonomis, dan kebergunaan itu mengasumsikan beberapa kebutuhan atau tujuan terlebih dahulu (FASB, 1978; Chua, 1986).
- b. Asumsi implisit tentang keteraturan sosial yang dapat dikendalikan (*controllable social order*). Meskipun terdapat konflik yang diakui antara principal dan agen dan antar departemen, konflik tersebut secara konseptual dapat dikelola. Konflik biasanya dianggap sebagai disfungsi dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan yang lebih besar. Beberapa peneliti dalam *mainstream* ini mengimplikasikan bahwa organisasi dan pasar bebas memiliki tendensi inheren untuk mencapai keteraturan sosial (Chua, 1986).

4. *Mainstream* berdasarkan teori dan praktik

*Mainstream* ini terdiri atas dikotomi *means-end* yaitu akuntan seharusnya berhubungan dengan observasi terhadap alat yang paling efektif dan efisien tentang pemenuhan kebutuhan informasional para pembuat keputusan tetapi seharusnya tidak melibatkan diri mereka sendiri dengan pertimbangan moral tentang kebutuhan atau tujuan para pembuat keputusan. Akuntan seolah-olah bebas nilai dalam menyajikan pilihan tentang posisi moral yang sangat penuh nilai ini, namun hal ini seringkali tidak diakui. Akuntan hanya memperlihatkan netralitas. Chambers (1966) berargumen bahwa akuntan hanya dapat menyediakan informasi tentang alat keuangan yang tersedia untuk kepuasan akhir yang telah ditentukan. Oleh karena informasi tersebut independen terhadap berbagai tujuan tertentu dan nilai yang doletakkan atas tujuan itu, maka akuntansi harus dianggap sebagai informasi yang netral dan bebas nilai.

Chua (1986) membuat ringkasan tentang asumsi dominan atas *mainstream* akuntansi sebagai berikut:

a. Keyakinan tentang pengetahuan

- Teori terpisah dari observasi yang dapat digunakan untuk memverifikasi atau menyatakan salah suatu teori. penggunaan *hypothetico-deductive* atas penjelasan ilmiah dapat diterima.
- Metode kuantitatif atas analisis dan pengumpulan data untuk menghasilkan generalisasi lebih diinginkan.

b. Keyakinan tentang realitas fisik dan sosial

- Realitas empiris merupakan tujuan dan eksternal terhadap subjek. Manusia juga dikarakteristikan sebagai objek pasif, bukan dipandang sebagai pembuat realitas sosial.
- Tujuan tunggal tentang maksimisasi utilitas diasumsikan bagi individu dan perusahaan. Rasionalitas *means-end* juga diasumsikan.
- Masyarakat dan organisasi stabil secara esensial; konflik disfungsional dapat dikelola melalui desain pengendalian akuntansi yang sesuai.

c. Hubungan antara teori dan praktik

- Akuntansi menspesifikasi alat, bukan akhir. Ada penerimaan tentang keluasan struktur institusional.

### 3. Teori Akuntansi Positif

#### a. Awal Pembentukan Teori Akuntansi Positif

Ide tentang teori akuntansi positif dimulai oleh Jensen (1976). Artikel Watts dan Zimmerman yang dimuat dalam *The Accounting Review* pada 1978 yang berjudul *Toward a positive theory of the determination of accounting standards* dan artikel mereka pada 1979 yang berjudul *The demand for and supply of accounting theory: The market for excuses* mengawali terbentuknya teori akuntansi positif. Kedua artikel ini mendapat penghargaan dari AICPA sebagai kontribusi yang berharga (*notable contribution*) bagi literatur akuntansi pada tahun publikasinya.

Ide tentang teori akuntansi positif ini kemudian dibukukan oleh Watts dan Zimmerman pada 1986. Buku ini berisi pendekatan yang digunakan dalam penelitian akuntansi berdasarkan teori akuntansi positif. Pada intinya, teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Oleh karena itu, penelitian akuntansi dalam teori akuntansi positif ditujukan untuk memprediksi dan menjelaskan praktik akuntansi dengan didasarkan pada pasar modal. Teori akuntansi positif juga mengusulkan penggunaan hipotesis pasar efisien (*efficient market hypothesis*) dan *Capital Asset Pricing Model* (CAPM).

#### b. Pengertian Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi kejadian ekonomis terutama yang berhubungan dengan akuntansi. Kata “positif” mengacu pada teori yang mencoba untuk membuat prediksi yang baik atas kejadian dunia nyata. Scott (2000) mendefinisikan teori akuntansi positif sebagai teori yang berkaitan dengan prediksi tindakan untuk memilih kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan merespon terhadap standar akuntansi baru yang diajukan.

Pada teori akuntansi positif, perusahaan dianggap sebagai kumpulan kontrak (*nexus of contracts*), yaitu organisasi dapat sangat tergambar oleh satu set kontrak yang dimasukinya, misalnya kontrak dengan karyawan (termasuk manajer), pemasok, penyedia modal, yang merupakan sentral bagi operasi perusahaan. Perusahaan akan meminimalkan berbagai biaya kontrak (*contracting costs*) yang berhubungan dengan kontrak-kontrak ini, seperti biaya negosiasi, pemantauan kinerja kontrak, negosiasi ulang yang mungkin, dan biaya *expected* atas kebangkrutan atau kegagalan lain.

Teori akuntansi positif berasumsi manajer itu rasional (seperti investor) dan akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya sendiri jika ia dapat melakukannya. Perilaku oportunistik akan diantisipasi ketika kontrak renumerasi manajer dinegosiasi dan perusahaan akan *price-protect* diri dengan merendahkan renumerasi formal manajer dengan jumlah oportunistik yang diharapkan. Artinya, pada kompetisi pasar tenaga kerja bagi manajer maka manajer akan mau bekerja dengan kompensasi yang lebih rendah jika mereka dapat memperpanjang utilitas melalui perilaku oportunistik. Akibatnya, pada kontrak renumerasi, manajer mempunyai insentif untuk berperilaku secara oportunistik sejauh mereka mempunyai kemampuan untuk memilih kebijakan akuntansi.

Teori akuntansi positif menekankan kebutuhan investigasi empiris untuk menentukan kebijakan akuntansi apa dan bagaimana kebijakan itu bervariasi antar perusahaan bergantung pada struktur organisasional. Tujuan teori ini untuk memahami dan memprediksi kebijakan akuntansi antar perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, teori ini tidak berusaha untuk memberitahu individu atau konstituensi apa yang seharusnya dilakukan (bukan normatif). Teori normatif mempunyai kemampuan prediktif tetapi bukan merupakan kriteria utama yang dipertimbangkan seperti dalam teori positif. Pertimbangan teori normatif berdasarkan konsistensi logis dengan asumsi yang mendasari bagaimana individu rasional seharusnya bertindak. Kedua pendekatan teoritis ini diuji Boland dan Gordon (1992) dan Demski (1988). Kedua pendekatan ini bernilai dalam pengembangan dan pengujian teori. Teori positif membantu prediksi normatif tetap di tempat yang benar, sehingga keduanya komplementer.

### **c. Hipotesis Teori Akuntansi Positif**

Watt dan Zimmerman (1986) merumuskan 3 hipotesis yang diprediksi oleh teori akuntansi positif yang disebut hipotesis pasar efisien (*efficient market hypothesis*):

1. Hipotesis program bonus (*bonus plan hypothesis*). Semua hal dianggap sama, manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser *earnings* dari periode masa depan ke periode sekarang.  
Hipotesis ini rasional karena manajer tentu menyukai renumerasi yang tinggi. Jika renumerasi bergantung pada bonus yang dihubungkan dengan laba bersih maka bonus dapat ditingkatkan dengan melaporkan laba bersih setinggi mungkin dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan *earnings* saat ini. Hal ini akan cenderung menurunkan *earnings* masa depan dan bonus, hal lain dianggap sama, akibat proses akrual.
2. Hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*). Hal lain dianggap sama, semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang berdasarkan akuntansi, semakin cenderung manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser *earnings* yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode sekarang.  
Alasannya adalah peningkatan laba bersih akan mengurangi kemungkinan kesalahan teknis. Sebagian besar perjanjian utang berisi persyaratan yang harus dipenuhi selama jangka waktu perjanjian, seperti rasio *debt-to-equity*, penutupan bunga, modal kerja, dan/atau ekuitas pemegang saham. Jika persyaratan itu dilanggar maka perjanjian utang akan memberikan pinalti seperti pembatasan dividen atau pinjaman tambahan. Oleh karena itu, prospek pelanggaran perjanjian membatasi tindakan manajemen dalam menjalankan perusahaan. Hal ini dapat dicegah, atau ditunda, dengan mengadopsi kebijakan akuntansi yang meningkatkan *earnings* sekarang. Menurut hipotesis ini, semakin perusahaan mendekati kegagalan atau jika telah gagal, maka cenderung melakukan hal ini.
3. Hipotesis biaya politis (*political cost hypothesis*). Semua hal dianggap sama, semakin besar biaya politis yang dihadapi suatu perusahaan, semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang menanggungkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa depan.  
Hipotesis ini memperkenalkan dimensi politis ke dalam pilihan kebijakan akuntansi. Misalnya, biaya politis muncul akibat profitabilitas yang tinggi yang menarik perhatian media dan konsumen sehingga politisi akan merespon dengan pajak atau peraturan baru lainnya. *Sheer size* juga sering mengarah ke biaya politis. Perusahaan besar mempunyai standar kinerja yang lebih tinggi, misalnya untuk masalah lingkungan, hanya karena dianggap besar dan berkuasa. Selain itu, biaya politis dapat muncul karena perbedaan waktu. Kompetisi luar negeri dapat mengarah pada profitabilitas yang berkurang kecuali perusahaan yang terpengaruh dapat dapat mempengaruhi proses politik untuk bantuan proteksi impor. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah mengadopsi kebijakan

akuntansi yang menurunkan laba untuk meyakinkan pemerintah bahwa laba kurang memadai.

Ketiga hipotesis ini merupakan komponen penting teori akuntansi positif dan semuanya mengarah pada prediksi yang dapat diuji secara empiris. Asumsi hipotesis pasar efisien ini sangat penting bagi sebagian besar studi empiris dalam bidang akuntansi. Asumsi ini benar hanya jika harga disamakan dengan menggunakan nilai (Whittington, 1987). Hipotesis pasar efisien ini menilai bahwa pasar merupakan permainan wajar yang efisien, artinya harga pasar merefleksikan, secara rata-rata, estimasi yang benar tentang return masa depan (terutama yang diuji dalam horizon waktu yang pendek), dimana return diukur sebagai perubahan dalam harga pasar ditambah dividen. Hipotesis pasar efisien ini sebenarnya menilai hubungan antara harga saat ini dan harga masa depan, bukan nilai.

Ada 2 bentuk pernyataan hipotesis teori akuntansi positif:

1. Bentuk oportunistik, dengan mengasumsikan manajer memilih kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas harapan pribadi relatif terhadap renumerasi, perjanjian utang, dan biaya politis.
2. Bentuk efisiensi, dengan asumsi sistem pengendalian internal, termasuk pemantauan oleh dewan direktur, membatasi oportunisme dan memotivasi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan biaya kontrak. Kedua bentuk teori akuntansi positif ini seringkali membuat prediksi yang sama. Studi tentang kedua versi teori akuntansi positif ini dilakukan oleh Christie dan Zimmerman (1984), Dechow (1994), dan Subramanyam (1996).

#### **d. Penelitian-Penelitian Empiris Dalam Teori Akuntansi Positif**

Ada beberapa penelitian empiris akuntansi yang akan diuraikan di sini, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Lev (1979) tentang bagaimana investor benar-benar bereaksi terhadap prospek perusahaan minyak dan gas dengan metode akuntansi *full costing* (FC) yang harus berganti menjadi *successful effort* (SE). Studi ini merupakan studi teori akuntansi positif karena membantu memahami mengapa perusahaan yang berbeda memilih kebijakan akuntansi yang berbeda, mengapa sebagian manajer keberatan terhadap perubahan kebijakan ini, dan mengapa investor bereaksi terhadap dampak potensial perubahan kebijakan akuntansi pada laba bersih. Lev menggunakan hipotesis rencana bonus dan perjanjian utang sebagai bagi reaksi pasar yang tidak menguntungkan terhadap prospek perusahaan FC yang harus berpindah ke SE. Pasar sekuritas diharapkan bereaksi secara negatif terhadap seberapa jauh (a) kontrak perusahaan menjadi kurang efisien dan (b) manajer akan bertindak secara oportunistik untuk mempertahankan bonus dan menghindari pelanggaran perjanjian utang.

- b. Healy (1985) menguji hipotesis rencana bonus dan menemukan bukti bahwa manajer dengan rencana bonus yang didasarkan pada laba bersih secara sistematis mengadopsi kebijakan akrual untuk memaksimalkan bonus harapan.
- c. Sweeney (1984) menguji hipotesis perjanjian utang dengan menggunakan sampel 130 perusahaan manufaktur yang merupakan pelanggar perjanjian utang pertama kali selama periode 1980-1989 dengan 130 perusahaan *control* berdasarkan size dan industri yang serupa yang tidak melanggar perjanjian utang. Sweeney menemukan bahwa sebagian besar pelanggaran utang berhubungan dengan pemeliharaan modal kerja dan ekuitas pemegang saham, sedangkan rasio *debt-to-equity* dan penutupan bunga secara relatif jarang dilanggar. Sweeney menemukan bukti bahwa pada periode 8 tahun, 5 tahun pertama sebelum tahun pelanggaran, perusahaan yang melanggar rata-rata secara signifikan mengubah kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba dengan sukarela, dan dampak kumulatif rata-rata pada laba bersih atas perubahan ini secara signifikan lebih besar. Sweeney juga menemukan bahwa perusahaan yang melanggar cenderung mengadopsi lebih awal *mandatory* standar yang meningkatkan laba dan menunda adopsi standar yang menurunkan laba.
- d. Jones (1991) mempelajari tindakan perusahaan untuk merendahkan laba bersih selama investigasi *relief* import. Cara efektif untuk mengurangi laba yang sulit dideteksi adalah memanipulasi kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan akrual, yang disebut *discretionary accruals*. Jones menguji apakah perusahaan menggunakan *discretionary accruals* untuk merendahkan *earnings*. Sampel yang digunakan 23 perusahaan dari 5 industri yang terlibat dalam 6 investigasi relief impor oleh ITC selama periode 1980-1985 inklusif. Total akrual untuk tahun tertentu ditentukan dengan pendekatan perbedaan antara arus kas operasi dan laba bersih. Pemisahan komponen akrual ke dalam *discretionary* dan *non discretionary* sangat menantang karena akrual *non discretionary* berkorelasi dengan level aktivitas bisnis yang merupakan akrual negatif tetapi sulit dihubungkan sebagai *discretionary*. Jones menemukan bukti perilaku yang diprediksi. Hampir semua perusahaan sampel memiliki akrual *discretionary* yang secara signifikan negatif pada tahun investigasi ITC, namun tidak ditemukan dalam tahun sebelum dan setelah investigasi. Hasil ini menduga bahwa perusahaan yang terpengaruh secara sistematis memilih kebijakan akrual untuk memperbaiki proteksi impor, konsisten dengan hipotesis biaya politis.

## e. Anomali Dalam Teori Akuntansi Positif

Asumsi pasar sekuritas efisien yang digunakan dalam teori akuntansi positif tidak selalu sesuai dengan prediksi teori itu sendiri. Hal ini disebut anomali. Anomali pasar sekuritas efisien adalah perilaku yang terlihat bertentangan dengan teori pasar sekuritas efisien yang memprediksi bahwa harga sekuritas bereaksi secara cepat dan dalam bentuk yang tidak bias terhadap informasi baru.. Ada 3 macam anomali dalam pasar sekuritas efisien (Scott, 2000), sebagai berikut:

### 1. Prospek teori dan perilaku keuangan.

Prospek teori dari Kahneman dan Tversky (1979) menyatakan bahwa investor menganggap investasi yang berisiko ("prospek") akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Utilitas investor untuk keuntungan diasumsikan seperti *risk averse* berbentuk *concave*, sedangkan utilitas untuk kerugian diasumsikan berbentuk *convex* yang menunjukkan perilaku *risk taking*. Teori prospek juga mengasumsikan bahwa ketika menghitung nilai ekspektasi suatu prospek, investor membobot nilai probabilitas *payoff*. Probabilitas *payoff* yang rendah berarti dibobot tinggi (*overweighted*) dan probabilitas yang lebih tinggi dibobot rendah (*underweighted*). Kombinasi dari evaluasi terpisah atas keuntungan dan kerugian dan pembobotan probabilitas dapat mengarah pada variasi luas perilaku yang tidak rasional. Pada teori prospek, perilaku investor dalam cara yang kompleks bergantung pada level probabilitas *payoff*, *risk aversion* dalam kaitannya dengan keuntungan, dan *risk taking* dalam hubungannya dengan kerugian. Jika cukup banyak investor yang berperilaku demikian, maka pasar modal dapat menunjukkan perilaku anomali relatif terhadap apa yang diprediksi oleh teori pasar sekuritas efisien. Secara khusus, return sekuritas abnormal dapat tidak bergerak (*persist*) beberapa saat menyusul kejadian informasi. Studi dan dokumentasi terhadap perilaku anomali disebut *behavioural finance*.

### 2. Pergeseran setelah pengumuman (*post-announcement drift*)

Isi informasi tentang *earnings* saat ini seharusnya secara cepat digali oleh investor dan digabungkan dengan harga pasar efisien, namun yang terjadi tidak demikian. Perusahaan yang melaporkan *good news* pada *earnings* kuartalan, return abnormalnya cenderung bergeser ke atas setidaknya selama 60 hari setelah pengumuman. Perusahaan yang melaporkan *bad news* pada *earnings* cenderung memiliki return abnormal yang bergeser ke bawah selama periode yang sama. Fenomena ini disebut *post-announcement drift*. Foster, Olsen, dan Shevlin (1984) melakukan studi tentang hal ini dan mengemukakan beberapa penjelasan yang mungkin. Hasilnya menduga bahwa munculnya *post-announcement drift* merupakan artifak dari model ekspektasi *earnings* yang digunakan peneliti dengan penggunaan proksi untuk *earnings* yang tidak diharapkan atas dasar pasar hanya akan merespon sebagian pengumuman *earnings* saat ini. Ketika peneliti memproksikan *earnings* yang tidak diharapkan dengan perubahan *earnings* dari kuartal yang sama tahun lalu maka ditemukan bukti yang kuat atas *post-announcement drift*. Jika digunakan proksi lain maka tidak akan ada *post-announcement drift*. *Post-announcement drift* yang signifikan akan menyebabkan investor memperoleh laba arbitrase dengan melakukan *short selling*. Isu ini diuji lebih lanjut oleh

Bernard dan Thomas (1989). Penjelasanannya adalah investor terlihat kurang mengestimasi (*underestimate*) implikasi *earnings* saat ini untuk *earnings* masa depan.

### 3. Efisiensi pasar sehubungan dengan rasio keuangan

Beberapa hasil studi menduga bahwa pasar tidak merespon secara penuh terhadap informasi tertentu dari neraca, tetapi menunggu sampai informasi tersebut muncul dalam *earnings* atau arus kas. Hal ini akan menimbulkan strategi investasi yang menggunakan informasi neraca untuk mengalahkan pasar (*beat the market*). Bukti tentang hal ini diberikan oleh Ou Penman (1989) (OP). OP menurunkan 68 rasio keuangan dari sampel besar perusahaan dengan menghitung masing-masing rasio untuk setiap tahun dari 1965-1972. Lalu, OP mengambil 16 rasio yang dianggap terbaik sebagai variabel independen untuk estimat model regresi multivariate untuk memprediksi perubahan laba bersih tahun berikutnya. Prediksi ini digunakan sebagai dasar untuk strategi investasi selanjutnya. Strategi ini dapat diimplementasikan karena berdasarkan informasi yang secara aktual tersedia bagi investor pada saat itu. Dalam teori, strategi ini juga tidak memerlukan berbagai investasi modal karena hasil dari *short sales* dapat digunakan untuk membayar saham yang dibeli. Penalarannya adalah jika dengan menggunakan informasi rasio dari tahun sebelumnya dapat memprediksi lebih awal perusahaan mana yang akan melaporkan *good news* dan *bad news* maka prediksi ini dapat digunakan untuk strategi investasi. Untuk melihat apakah strategi ini mengalahkan pasar, OP menghitung laba dan rugi masing-masing transaksi yang kemudian dikonversi ke dalam tingkat return. Dengan kesempatan untuk terjadi yang hampir nol, strategi investasi ini terlihat secara sukses mengalahkan pasar. Hasil ini mengejutkan karena dalam teori pasar sekuritas efisien, strategi investasi hanya didasarkan pada informasi yang tersedia bagi semua investor, yaitu informasi rasio keuangan perusahaan yang akan secara cepat dan secara efisien digabungkan dalam harga pasar. Kenyataan bahwa OP memperoleh *excess return* menduga bahwa pasar tidak menggali secara penuh semua informasi yang terdapat dalam rasio keuangan.

### 4. Respon pasar terhadap akrual.

Sloan (1996) memisahkan laba bersih yang dilaporkan ke dalam arus kas operasi dan komponen akrual. Sloan menunjukkan bahwa pasar efisien seharusnya bereaksi lebih kuat dolar *good news* dalam laba bersih jika dolar tersebut berasal dari arus kas operasi daripada dari akrual. Alasannya adalah *accrual reverse*. Dengan kata lain, arus kas lebih *persistent*. Sloan menemukan bahwa arus kas operasi memiliki persistensi yang lebih besar daripada akrual, yaitu konsisten dengan argumen *accrual reverse* bahwa laba yang dilaporkan tahun berikutnya berasosiasi secara lebih tinggi dengan arus kas operasi komponen laba tahun berjalan daripada dengan komponen akrual.

## 4. Tinjauan Terhadap Positivisme Dalam Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif, pada awal perkembangannya, banyak mendapat kritikan. Kritik yang diajukan biasanya menyoroti masalah istilah positif yang digunakan dalam teori akuntansi positif. Istilah positif tersebut ditinjau secara filsafat dan dihubungkan dengan positivisme dalam filsafat ilmu. Bab ini akan membahas mengenai beberapa kritik yang ditujukan pada

teori akuntansi positif dan pembahasan juga akan dilakukan mengenai positivisme secara filsafat itu sendiri.

Christenson (1983) mengkritik teori akuntansi positif dengan menyatakan bahwa harus dibedakan antara konsep teori positif dari ilmu positif. Konsep teori positif dalam teori akuntansi positif ini secara filsafat dipertanyakan karena merefleksikan keyakinan yang tidak akurat bahwa teori ilmiah menemukan pengetahuan sistematis yang berhubungan dengan 'apa'. Teori tidaklah demikian karena ilmu merupakan ilmu teoritis yang tidak hanya berhubungan dengan 'apa' tetapi juga dengan apa yang mungkin. Oleh karena itu, konsep ilmu positif dan teori positif menyesatkan dan harus dihilangkan. Istilah yang lebih tepat digunakan adalah empiris.

Christenson (1983) juga berargumen bahwa ilmu empiris dapat dipandang sebagai produk (Keynes) maupun sebagai proses (Popper). Popper menyatakan bahwa untuk dapat memahami berbagai proses harus mempelajari produknya. Jika empiris maka harus dimulai dengan produk aktual dan mencari penjelasan tentang proses produksinya. Jika normatif maka dimulai dengan produk ideal dan mencari disain proses produksinya. Popper menyimpulkan bahwa kemampuan memutuskan satu sisi, falsifiabilitas, mungkin dilakukan tetapi hanya jika ilmuwan mengikuti norma metodologi tertentu. Karakter ilmu empiris sebagai badan pe-ngetahuan merupakan norma, bukan bentuk logis dari proposisinya. Proporsisi dinyatakan salah bukan oleh pengalaman, tetapi hanya dengan penerimaan proposisi lain dengan logika yang tidak konsisten.

Falsifikasi harus dibedakan dari falsifiabilitas (Christenson, 1983). Proposisi dapat dinyatakan salah hanya dan hanya jika setidaknya ada satu proposisi observasional yang tidak konsisten secara logika. Falsifikasi melibatkan tidak hanya elemen logika, ketidakkonsistenan dari dua proposisi, tetapi juga elemen nonlogika, keputusan untuk menerima proposisi observasional yang dinyatakan salah. Bentuk logis dari proposisi teoritis atau hukum merupakan proposisi eksistensial negatif yang sangat umum.

Logika empiris dapat digunakan sebagai panduan tindakan dalam dua cara yang berhubungan dengan penalaran prediktif dan penjelas. Popper menyebut prediksi yang dihasilkan dari penalaran prediktif *prophecies* dan menunjukkan bahwa prediksi dari jenis yang sangat berbeda, yang disebut prediksi teknologis, dapat diturunkan dari proses yang analog dengan penalaran penjelas. Penurunan prediksi teknologis disebut penalaran normatif (Christenson, 1983). Oleh karena itu, Christenson berpendapat seharusnya teori akuntansi tetap berada dalam penalaran normatif. Menurut Christenson teori akuntansi positif secara metodologis berada dalam domain yang salah.

Ada dua interpretasi metodologis tentang tentang penjelasan merupakan kebalikan dari prediksi, yaitu:

1. Instrumentalisme, penjelasan memang merupakan kebalikan dari prediksi atau teori memang merupakan alat untuk prediksi. Realitas hanya terdiri dari keterjadian peristiwa.
2. Realisme, penjelasan merupakan kebalikan dari prediksi dan karenanya, teori yang menjelaskan dapat juga digunakan sebagai alat untuk prediksi. Beberapa teori memang

merupakan alat untuk prediksi. Teori dianggap sebagai penjelas sehingga harus lebih dari sekedar alat untuk prediksi. Teori juga harus dapat diinterpretasikan sebagai deskripsi dari realitas yang lebih dalam yang mendasari realitas permukaan domain keterjadian fenomenal.

Christenson (1983) berpendapat bahwa instrumentalisme merupakan filsafat ilmu yang salah digunakan dalam teori akuntansi positif ini, dengan alasan:

- a. Hukum empiris merupakan bentuk kondisional umum dengan aturan inferensi logis yang mungkin valid atau tidak valid, sedangkan hukum empiris adalah benar atau salah.
- b. Instrumentalisme memiliki efek melindungi beberapa proposisi sistem teoritis dari falsifikasi.
- c. Instrumentalisme tidak memadai bagi metode analisis karena dalam metode analisis, kita menentukan penalaran terbalik hanya ketika menemukan premis yang memadai untuk memprediksi keterjadian amatan dan telah diketahui atau diakui benar atau setidaknya tidak diketahui salah.

Teori akuntansi positif banyak mendapatkan kritik diakibatkan oleh penggunaan istilah positif. Pengertian positif menurut August Comte dalam karyanya *Discours sur lesprit positif* (1844) sebagai berikut (Wibisono, 1996):

1. Positif merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang bersifat khayal. Oleh karena itu, positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata. Hal ini sesuai dengan ajaran August Comte bahwa filsafat positivisme dalam menyelidiki objek sasarannya didasarkan pada kemampuan akal, sehingga hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal tidak akan dijadikan sasaran penyelidikan.
2. Positif merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan ajaran August Comte bahwa dalam filsafat positivisme segala sesuatu harus diarahkan pada pencapaian kemajuan. Filsafat tidak hanya sampai pada pemenuhan keinginan manusia untuk memperoleh pengetahuan atau pengertian mengenai sesuatu saja, tetapi juga harus dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sehingga dapat dikatakan bermanfaat.
3. Positif merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang meragukan. Oleh karena itu, positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti. Hal ini sesuai dengan ajaran August Comte bahwa filsafat harus sampai pada suatu keseimbangan yang logis yang membawa kebaikan bagi setiap individu dan masyarakat.
4. Positif merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang kabur. Oleh karena itu, positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang jelas atau tepat. Hal ini sesuai dengan ajaran August Comte bahwa dalam pemikiran filsafati kita harus dapat memberikan pengertian yang jelas atau tepat, baik mengenai gejala-gejala yang nampak maupun mengenai apa yang sebenarnya kita butuhkan. Alasannya adalah cara filsafat yang lama hanya memberikan pedoman yang tidak jelas dan hanya mempertahankan disiplin yang diperlukan dengan mendasarkan diri dengan kekuatan adikodrati.

5. Positif merupakan lawan atau kebalikan dari sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, positif diartikan sebagai sarana untuk menunjukkan sifat-sifat pandangan filsafat August Comte yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban.

Filsafat positivisme August Comte ini sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Istilah positivisme juga kembali muncul pada abad 20 yaitu aliran filsafat positivisme logis (*logical positivim*) yang merupakan kelanjutan dari filsafat *Aufklarung* di abad ke 18 (Wibisono, 1996). Akuntansi menganut aliran filsafat positivisme logis (Ryan, Capens, dan Theobald, 1992).

Positivisme logis memperkenalkan dan menggunakan prinsip verifikasi. Kesulitan dalam positivisme ini (Ryan, Capens, dan Theobald, 1992) terutama disebabkan oleh:

1. Sifat hukum. Hukum dalam ilmu selau mengarah pada generalisasi universal. Teori ilmiah seringkali tidak menguji semua kemungkinan dalam operasi hukum tertentu sehingga kebenarannya tidak dapat didefinisikan dengan tepat. Selain itu, hukum juga tidak dapat diekstrapolasi dengan kepastian dari berbagai jumlah observasi tunggal.
2. Istilah teoritis. Kata 'nilai' didefinisikan secara observasional rendah atau tinggi yang membuat ketidakmungkinan reduksi suatu arah istilah ke dalam bahasa observasional. Nilai diyakini sangat berarti sehubungan dengan aktiva tertentu meskipun tidak ada observasi langsung terhadap nilai aktiva yang dibuat. Hal ini berarti arti istilah nilai didefinisikan rendah secara observasional. Tingkatan lain istilah nilai terdiri atas berbagai sistem pengukuran yang berbeda. Pemberian nilai pada suatu aktiva harus memasukkan beberapa definisi prinsip dan dasar penilaian lain seperti *historical cost*, *replacement cost*, *reliable value*, *current cost*, dan *amortisasi*. Dalam hal ini, istilah nilai didefinisikan lebih tinggi secara observasional.

### C. SIMPULAN

Teori akuntansi menganut aliran filsafat positivisme logis sejak teori akuntansi positif diusulkan oleh Watts dan Zimmerman pada 1986 dalam bukunya yang berjudul *Positive Accounting Theory*. Teori akuntansi positif ini mendapat banyak kritik terutama berkaitan dengan metodologi yang digunakan. Istilah 'positif' yang digunakan dalam teori ini menimbulkan banyak reaksi atau kritik. Teori akuntansi positif ini didasarkan pada gagasan yang menganggap akuntansi sebagai barang ekonomis.

Terlepas dari segala kritik yang ada, teori akuntansi positif banyak memberikan kemajuan bagi perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri dengan menyebabkan banyaknya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan praktik akuntansi dari sudut pasar modal. Hal ini sesuai dengan makna filsafat positivisme August Comte bahwa filsafat positivisme itu memiliki kekuatan untuk membawa kemajuan bagi masyarakat karena sangat menekankan pada segi rasional-ilmiah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Khalik, A. R dan B. B. Ajinkya. 1979. *Empirical Research in Accounting: A Methodological Viewpoint*. American Accounting Association.
- Baiman, S. 1982. Agency Research in Managerial Accounting: A Survey. *Journal of Accounting Literature*. Spring. 154-210.
- Bernard, V. L. dan J. Thomas. 1989. Post-Earnings Announcement Drift: Delayed Price Reaction or Risk Premium? *Journal of Accounting Research*. Supplement. 1-36.
- Boland, L. A. dan I. M. Gordon. 1992. Critizing Positive Accounting Theory. *Contemporary Accounting Research*. Fall. 147-170.
- Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Elements of Sociology of Corporate Life*. Hainemann Educational Books. Ltd.
- Chambers, R. J. 1966. *Accounting, evaluation, and economic behavior*. Scholar Book Company.
- Christenson, C. 1983. The Metodology of Positive Accounting. *The Accounting Review*. Jan. 1-22.
- Christie, A. A. dan J. Zimmerman. 1984. Efficient and Opportunistic Choice of Accounting Procedures: Corporate Control Contests. *The Accounting Review*. Okt. 539-566.
- Chua, W. F. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*. Okt. 601-632.
- Dechow, P. M. 1994. Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals. *Journal of Accounting and Economics*. Juli. 3-42.
- Demski, J. 1988. *Positive Accounting Theory: A Review*. Accounting, organization, and Society. Okt. 623-629.
- Fama, E.F dan M. C. Jensen. 1982. Agency Problems and the Survival of Organization. *Working paper*. University of Chicago.
- FASB. 1978. *Objective of Financial Reporting by Business Enterprises*. SFAC no. 1.
- Foster, G., C. Olsen, dan T. Shevlin. 1984. Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Return. *The Accounting Review*. Jan. 574-603.

- Healy, P. M. 1985. The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*. April. 85-107.
- Hempel, C. G. 1965. *Aspects of Scientific Explanation*. The Free Press.
- . 1966. *The Philosophy of Natural Science*. Prentice-Hall.
- Jensen, M. C. 1976. *Reflection on the State of Accounting Research and the Regulation of Accounting*. Graduate School of Business. Stanford University.
- Jones, J. 1991. Earnings Management during Import Relief Investigation. *Journal of Accounting Research*. Autumn. 193-228.
- Kahneman, D. dan A. Tversky. 1979. *Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk*. *Econometrica*. March. 263-291.
- Lev, B. 1979. The Impact of Accounting Regulation on the Stock Market: The Case of Oil and Gas Companies. *The Accounting Review*. July. 485-503.
- Mautz, R. K dan H. A. Sharaf. 1961. *The philosophy of Auditing*. American Accounting Association.

- Ou, J. A. dan S. H. Penman. 1989. Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns. *Journal of Accounting and Economics*. Nov. 295-329.
- Peasnell, K. V. 1981. *Empirical Research in Financial Accounting*. (dalam Chua, 1986).
- Popper, K. R. 1972. *Conjectures and Refutation*. 3<sup>rd</sup> edition. Routledge & Kegan Paul.
- Ryan, Capens, dan Theobald. 1992. *The Philosophy of Financial Research*.
- Scott, W. R. 2000. *Financial Accounting Theory*. 2<sup>nd</sup> edition. Prentice-Hall.
- Simon, H. A. 1976. *Administrative Behavior: A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization*. 3<sup>rd</sup> edition. The Free Press.
- Sloan, R. G. 1996. Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings? *The Accounting Review*. Juli. 289-315.
- Subramanyam, K. R. 1996. The Pricing of Discretionary Accruals. *Journal of Accounting and Economics*. Acs-Des. 249-281.
- Sweeney, A. P. 1984. Debt-Covenant Violations and Managers' Accounting Response. *Journal of Accounting And Economics*. May. 281-308.
- Watts, R. L. dan J. L. Zimmerman. 1978. Toward a Positive Theory of Determinant of Accounting Standards. *The Accounting Review*. Jan. 112-134.
- , 1979. The Demand for and Supply of Accounting Theory: The Market for Excuses. *The Accounting Review*. April. 273-305.
- , 1986. *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall.
- Whittington, G. 1987. Positive Accounting: A Review Article. *Accounting and Business Research*. 17 (68). 327-336.
- Wibisono, K. 1996. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme August Comte*. Gadjah Mada University Press.

**THE POSITIVES AND NEGATIVES THE AUDIT COMMITTEE  
IN USA**

## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk memberikan paparan tentang awal pembentukan komite audit di Amerika Serikat dari tahun 1939 ketika pembentukan komite audit belum diatur sampai dengan adanya kewajiban untuk membentuk komite audit. Selain itu dibahas juga dampak positif dan negatif dari adanya komite audit tersebut dan pengaruh kasus Enron dan Sarbanes-Oxley Act of 2002 terhadap standar dan peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator.*

*Key words: audit committee, the history, negatives, and positives impact*

### **A. INTRODUCTION**

A basic assumption underlying the growth of the audit committees is that the contemporary growth and diversity of most business organizations and the complexity of accounting problems have made it more difficult for outside directors to observe, evaluate, and provide the creditable assistance in the activities of the complex concern. Board meetings do not provide sufficient time to obtain and digest data on the continuing activities of business. The advantage of having an audit committee is that it helps directors discharge their responsibility for approving annual financial statements before they are presented to the shareholders. When the board establishes an audit committee, it should establish minimum statutory requirements the committee should possess. The audit committee should ask management to develop a code of business conduct providing direction regarding acceptable and unacceptable practices. Committee members should be aware that there are no set of all inclusive rules to assure all legalities are followed, but the code will help. The audit committee can serve as a formal mechanism or an informal forum for dialogue between directors and company management. Without such a workable forum there is significant potential for dysfunctional conflict between management and directors.

The auditors have been hired, fired, and compensated by the board of the companies they audit. Some fear that this created a loyalty to the board that made it difficult to challenge a management that engaged in aggressive or even fraudulent financial reporting. By making auditors accountable directly to the audit committee (which is composed of independent directors) it is hoped that management's ability to influence auditors is lessened.

---

<sup>9</sup> Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Achieving and sustaining a true balance among auditors, management, the internal audit function, and the board is a delicate and difficult task. And yet, this is what good corporate governance increasingly requires and assumes. The board is responsible for setting corporate strategy and management designs internal systems and control processes to implement that strategy. Internal auditors are charged with assessing how well these wide-ranging processes function. Good corporate governance principles state that the internal audit function must have a stronger reporting relationship to the board than to management. The purpose of this paper is to assess descriptively the effectiveness of the audited committee for reviewing the audit, reporting financial information, and the voluntary disclosure.

## **B. THE HISTORY OF THE AUDIT COMMITTEE**

### **1. Audit Committee 1939-1999**

Although the use of the audit committees dates to nineteenth century, the concept received its first significant endorsement in the 1939 from the New York Stock Exchange. Shortly thereafter in 1940, the Securities and Exchange Commissions gave support for the audit committee concept in its report in the Mckesson-Robin debacle. Following these endorsements, there was gradual increase in the use of this relatively new concept, but rapid growth did not occur until 1960. A particularly important stimulus was a 1967 report of the Executive Committee of the America Institute of Certified Public Accountants, which urged the establishment of the audit committee. Furthermore in 1971 and again 1973 the SEC emphasized its support of the audit committee (Klock, 1976).

A seminal study in 1969 by Mautz and Newman found that audit committee adoption, while lower than anticipated less, (than 30 percent of a random sample of corporate report), was on the increase. They concluded that the existence of an audit committee was usually effective in improving the audit function of the board, and each committee were seldom discontinued (Klein, 2000).

A 1973 report by the Conference Board indicated a continuing growth of audit committee. A 1967 survey of a board sample of industrial and manufacturing firms revealed a 19 percent adoption rate. A repeat survey in 1972 found a 45 percent adoption rate. This was a large increase of any board committee in during five years (COSO, 2004).

A 1974 report by the accounting firm of Coopers and Lybrand (CL) provides conclusive evidence of a rapid adoption rate for audit committees. CL founded that 67 percent respondents to a survey of diverse companies had instituted working audit committee. They

concluded that the audit committee is fast approaching the status of an institution (COSO, 2004).

In part, growth may be attributed to unrelenting and endlessly repeated exhortations of leaders of the accounting profession and of auditors, both external and internal, who sought to expand the committees' existence and role. As noted, the efforts were founded in the hope that the audit committee would improve the balance of power in auditor-management disputes.

Given the wide interest in audit committees, it is surprising that no one in either the profession, or in government, actually mandated the establishment of the committees; that step was left to the stock exchanges and to the over-the-counter trading authority. In any event, audit committees have spread geographically and by constituency, i.e. beyond private sector corporations to non-profit organizations and government agencies.

It is well known that the mere act of audit committee creation is likely to have little or no effect. Nevertheless, no organization has mandated specific committee duties, responsibilities, or activities. In contrast to Securities and Exchange Commission (SEC) and professional studies showing in years 1981-1986 that 85-90 percent of public companies had audit committees, in only 69 percent of the cases against public companies, was an audit committee maintained. This percentage excludes 39 cases where the staff could not determine whether the company had an audit committee. The 69 percent appears generous because it is likely the percentage would drop if the 39 unknown cases were determined since these companies were not listed on the New York Stock Exchange (NYSE), filed no proxy material with the SEC, and many were involved in an initial public offering. (COSO, 2004)

However, in 1987, the National Commission on Fraudulent Financial Reporting (The Treadway Commission) issued a paper on recommended audit committee activities which has become standard for many audit committees (Harrison and Lanier, 1995). The Treadway list represents a good starting point however there has been numerous it requires development through addition of requirements that arose subsequent to the issuance of the Treadway report. Moreover, numerous committees, as well as individuals, have published normative prescriptions, amounting to virtual job descriptions for audit committees. The urge to authorship was not emulated by the committees themselves, which, by and large, failed to define their responsibilities. Indeed, many corporations did not take the trouble to draft a charter, i.e. a formal statement of the charge, or to acknowledge the existence of the audit committee in the corporate bylaws. In the 229 largest publicly held corporations other than banks, the specific functions assigned to the audit committee by the full board varied

widely (Verschoor, 1993). In addition to the committees' responsibilities, the preferred quality of committee members' independence has remained uncertain. Even the prescribed number of independent directors has varied on the basis of a corporation's listing status.

Also, there were concerns (not fully addressed until very recently) as to what constituted independence on the part of an audit committee member. For example, it was not certain whether any of the following should be considered independent: former executives, now retired; lawyers, associated with outside counsel and performing services for a fee; brokers likely to have served, or to serve in the future, as underwriters. In a recent General Accounting Office (GAO) survey of banking audit committee chairpersons, 7.3 per cent of the largest corporations publicly disclosed that their audit committee chairperson had other business relationships that potentially impaired his/her independence (Verschoor, 1993).

In the past, the SEC and the stock exchanges have allowed flexibility in determining who would be considered independent; this flexibility is likely to be challenged in response to public demands (McMullen, 1994). A further decision needs to be made as to whether emphasis should be placed on independence in fact rather than on independence in appearance. In other words, is a particular director likely to exercise independent judgment? The profession, as well as regulators, should develop additional guidance to solve the independence issue; hopefully such guidance will seek a practical accommodation between independence, on the one hand, and the market of available and qualified audit committee members, on the other. (Pomeranz, 1997).

The Independence Standards Board (ISB) has issued Independence Standard No. 1, Independence Discussions with Audit Committees. It is effective for audits of financial statements of public companies with fiscal years ending after July 15, 1999, but earlier application is encouraged. It applies to any auditor intending to be considered an independent accountant within the meaning of the securities acts administered by the SEC, so it would apply to engagements for both reviews of quarterly financial information and audits of annual financial statements.

ISBS No. 1 requires the auditor to provide the audit committee (or the full board if there is no audit committee) a written description of all relationships between the auditor (and its related entities) and the company (and its related entities) that in the auditor's professional judgment may reasonably be thought to bear on independence. The written description also has to confirm that the auditor believes he/she is independent within the meaning of the securities acts. The auditor must also discuss the his/her independence with the audit committee. Both written and oral communications are required at least annually. The ISB

observes that ideally the communication would occur before any substantive audit procedures have begun, but ISBS No. 1 does not require that timing (Kelson, 2002).

In 1998, the NYSE and the National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ) sponsored a committee to study the effectiveness of audit committees. This committee became known as the Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees (the "Blue Ribbon Committee"). In its 1999 report, the Blue Ribbon Committee recognized the importance of audit committees and issued ten recommendations to improve their effectiveness. In response to these recommendations, the NYSE and the NASDAQ, among others, revised their listing standards relating to audit committees, and adopted new rules requiring disclosure relating to the functioning, governance and independence of corporate audit committees. Beginning in 2003, at the Commission's request, the NYSE and the NASD again reviewed their corporate governance standards, including their audit committee rules, in light of several high-profile corporate failures, and have proposed changes to their rules to provide more demanding standards for audit committees.

In December 1999, the NYSE and NASDAQ modified their requirements for audit committees. Under the new standards, firms must maintain audit committees with at least three directors, "all of whom have no relationship to the company that may interfere with the exercise of their independence from management and the company" (NYSE Listing Guide, Section 303.01(B)(2)(a)). These new requirements respond to the SEC's call for improving the effectiveness of corporate audit committees in overseeing the financial reporting process (Kelson, 2002).

## **2. Sarbanes-Oxley Act of 2002.**

The regulatory response to restore public confidence that was lost because of the Enron Scandal established with new rules the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Sarbanes-Oxley Act)' and the proposed NYSE and NASDAQ listing standards contain provisions that will impact greatly the manner in which audit committees of boards of directors oversee the audit function. The Sarbanes Oxley Act seeks to federalize the rules governing audit committees by establishing new standards for such committees and by directing the SEC to require market regulators to adopt new rules regarding audit committees. This represents a significant departure from the traditional regulation of audit committees by state corporate law and market regulatory authorities. Passage of the Sarbanes-Oxley Act and implementation of its provisions highlight the extent to which Congress seeks to prevent accounting impropriety and improve disclosure in light of accounting scandals that have shaken investor confidence in public company financial reporting.

### **3. Audit Committee Charter**

Under the proposed standards, an audit committee charter must include a statement of the committee's purpose, which at a minimum must include the preparation of the SEC mandated audit committee report in the company's annual proxy statement. In addition, the statement of purpose must state that the committee assists the board in its oversight of:

- (1) the integrity of the company's financial statements;
- (2) the company's compliance with legal and regulatory requirements;
- (3) the independent auditor's qualifications and independence; and
- (4) the performance of the company's internal audit function and independent auditors (SEC, 2003).

Additionally, an audit committee charter must include provisions requiring that the audit committee (SEC, 2002):

- Obtain and review a report from the company's independent audit firm describing the firm's internal quality-control procedures, any material quality-control issues raised in the past five years, and all relationships between the independent auditors and the company;
- Discuss the company's annual audited financial statements and quarterly financial statements with management and the outside auditors, including the disclosure in Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations;
- Discuss earnings press releases, as well as financial information and earnings guidance provided to analysts and rating agencies;
- Obtain appropriate advice and assistance from outside legal, accounting, and other advisors;
- Meet separately with management, internal auditors, and external auditors;
- Review with the independent auditors any audit problems, along with management's response thereto;
- Set clear hiring policies for employees or former employees of the independent auditors;
- Report regularly to the board of directors; and
- Conduct an annual performance review of the audit committee.

### **4. Composition of Audit Committee Members**

The audit committee, composed of members of the board of directors, plays a critical role in providing oversight over and serving as a check and balance on a company's financial reporting system. The audit committee provides independent review and oversight of a

company's financial reporting processes, internal controls and independent auditors. It provides a forum separate from management in which auditors and other interested parties can candidly discuss concerns. By effectively carrying out its functions and responsibilities, the audit committee helps to ensure that management properly develops and adheres to a sound system of internal controls, that procedures are in place to objectively assess management's practices and internal controls, and that the outside auditors, through their own review, objectively assess the company's financial reporting practices. The boards of a growing number of publicly held companies have appointed audit committees to assist them in assuring shareholders and the financial community of accurate and fair financial reporting.

## **5. Independence of Audit Committee Members**

The media has reported that a number of Enron directors-including some members of the audit committee-had personal or financial connections to the company's management. Some of these relationships did not require disclosure under current SEC requirements, which focus on employment, family, and business relationships between directors and management.

Section 301 of the Sarbanes-Oxley Act requires each audit committee member to be an independent director, meaning that, except in such director's capacity as a member of the audit committee, the board of directors, or any other committee of the board of directors, such person may not receive any consulting, advisory, or other compensatory fee from the issuer or otherwise be affiliated with the issuer or any subsidiary of the issuer. Each of the NYSE and NASDAQ listing standards currently has a slightly different definition of "independence," and each imposes requirements that go beyond those contained in the Sarbanes-Oxley Act. (SEC, 2003)

## **6. The Standards Relating to Listed Company Audit Committees**

As directed by the Sarbanes-Oxley Act of 2002, the SEC are adopted a new rule to direct the national securities exchanges and national securities associations to prohibit the listing of any security of an issuer that is not in compliance with the audit committee requirements mandated by the Act. These requirements relate to: the independence of audit committee members; the audit committee's responsibility to select and oversee the issuer's independent accountant; procedures for handling complaints regarding the issuer's accounting practices; the authority of the audit committee to engage advisors; and funding for the independent auditor and any outside advisors engaged by the audit committee. The rule implements the requirements of Section 10A(m)(1) of the Securities Exchange Act of 1934, as added by Section 301 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. Under the rule, listed issuers must be in

compliance with the new listing rules by the earlier of their first annual shareholders meeting after January 15, 2004, or October 31, 2004. Foreign private issuers and small business issuers will have additional time to comply. In addition, the SEC is adopting amendments to make several changes to the current disclosure requirements regarding audit committees.

## **7. New Proxy Disclosure Requirements.**

The changes in the markets and the increasing pressures on companies to maintain positive earnings trends have highlighted the importance of strong and effective audit committees. Effective oversight of the financial reporting process is fundamental to preserving the integrity of the markets. Audit committees play a critical role in the financial reporting system by overseeing and monitoring both management's and the independent auditor participation in the financial reporting process. Audit committees can, and should, be the corporate participant best able to perform that oversight function. The Securities and Exchange Commission is adopting new rules and amendments to its current rules to require that companies' independent auditors review the companies' financial information prior to the companies filing their Quarterly Reports on Form 10-Q or Form 10-QSB with the Commission, and to require that companies include in their proxy statements certain disclosures about their audit committees and reports from their audit committees containing certain disclosures. The rules are designed to improve disclosure related to the functioning of corporate audit committees and to enhance the reliability and credibility of financial statements of public companies (SEC, 2003).

### **C. THE POSITIVE IMPACT OF AUDIT COMMITTEE IN USA**

The audit committee is a very flexible device for any board of directors. As will become evident in this paper, its use and effectiveness vary considerably depending on the skills of the member directors, opportunities for committee inquiry, support facilities provided, and corporation of the chief executive officer (CEO). The five potential purposes of an audit committee are (Klock, 1976):

1. There is the obvious benefit of a careful review of all financial report and procedures by directors who have expertise in the analysis of accounting statements.
2. The audit committee can serve as a formal mechanism for a continued dialog between management and outside directors at a time when the outside directors can no longer assume a passive role.
3. The audit committee can satisfy the directors need to establish lines of communication with external users of the financial statements.
4. The audit committee may serve as an early warning system.

5. The audit committee may provide a catalyst for long term changes in the financial and the accounting areas.

The fifth function emphasizes positive innovations that may generate funds or reduce the cash outflow over long periods of time, unlike the fourth function which emphasizes the avoidance of disasters. The audit committee provides the board with another tool for representing the interest of the stockholders by the systematic and formalized review of the financial reporting process.

### **1. The Influence of Audit Committee Oversight on Corporate Disclosure**

One of the critical issues at Enron was the use of off-balance sheet financing arrangements. Although off-balance sheet funding may not be significant for many companies, audit committees should pay attention to any off-balance sheet financing arrangements to the extent that they are material to the company's financial statements. Where information about off-balance sheet transactions sometimes is necessary to understand how significant aspects of the company's business are conducted, the audit committee should consider whether the company's disclosure of such information in financial statements and published reports is sufficiently transparent to the reader.

On October 22, 2002, the Securities and Exchange Commission proposed additional rules to implement Sections 404, 406 and 407 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002. The proposed Section 404 rules require an issuer to file, as part of its annual report required by Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, an annual internal control report of the issuer's management. The proposed Section 406 rules require an issuer to disclose in its annual report filed with the SEC whether the issuer has adopted a code of ethics for the issuer's principal executive officers and senior financial officers, and if it has not, the reasons why. The proposed rules under Section 407 would require an issuer to disclose in its annual report:

1. the number and names of members of its audit committee determined to be "financial experts,"
2. whether the financial experts are "independent" from management, and if not, an explanation of why they are not.

The SEC believe that additional disclosures about a company's audit committee and its interaction with the company's auditors and management will promote investor confidence in the integrity of the financial reporting process. In addition, increasing the level of scrutiny by independent auditors of companies' quarterly financial statements should lead

to fewer year-end adjustments, and, therefore, more reliable financial information about companies throughout the reporting year (SEC, 2003).

## **2. The Influence of Audit Committee on the Quality of Mandated Financial Reporting.**

Financial reporting and oversight must evolve to reflect the realities of this new age. Information from the financial reporting system need to offer investors a high level of confidence in the ability of companies to manage change and complexity, that assures the reliability of financial reporting an addition the supplement must provide information a company's continued ability to generate cash, sustain earnings and be viable in a very dynamic and often unpredictable global marketplace.

Audit committees, composed of outside directors that oversee corporate financial reporting, are becoming more crucial to corporations in light of requirements of the Foreign Corrupt Practices Act and a New York Stock Exchange ruling requiring such committees in certain instances. Yet, the committee's role is not clearly defined, thus causing much confusion. General principles need to be formulated to guide the audit committees. Their members must not only be outside independent directors but should have knowledge of the industry. The role of internal auditors should be one of increasing independence from management, supported by audit committees. However, internal auditors should not by-pass management in their reporting. External auditors must still evaluate internal controls and report their findings to the committee. Management, the committee, and the board should define their jurisdictions to avoid conflicts, and the committee should not involve it in making operational or management decisions.

### **D. THE NEGATIVE IMPACT OF AUDIT COMMITTEE IN USA**

The aftermath of the Enron scandal; has seen a negative impact in the capital markets, the loss of public confidence in the corporate governance, and in the external auditor, in the corporate disclosure system. Although audit committees no doubt will face greater scrutiny in the post-Enron environment, the relevant standards of director care and liability have not changed. Similar to other directors; audit committee members have two basic duties: care and loyalty. The duty of loyalty is implicated when a director enters into a transaction with, or has a conflict of interest with, the company he or she serves. Because audit committee members for NYSE and NASDAQ listed companies must meet high standards of independence, the duty of loyalty is rarely implicated in audit committee work for these companies. Nevertheless, the audit committee should examine more broadly any relationships that exist between the committee members and the company, even if the relationships technically would not create independence issues under applicable definitions. These relationships should be disclosed to the board members, who should consider

whether the relationships potentially could impair independence or create the appearance of impairing independence.

### **1. The Relationship of The Financial Distress and The Audit Committee**

When a firm's business deteriorates to the point where it cannot meet its financial obligations, the firm is said to have entered the state of financial stress (Eloumi, 2001). Regulators often view independent auditors as public watch dogs over corporate America (Levitt, 1998; in Carcello, 2000). The BRC and the National Association of Corporate Directors (NACD, 1999) both suggest that audit committees are likely to be more effective protecting the credibility financial reporting if committee members are independent of management. For companies experiencing financial distress Carcello research, found; expect that the greater proportion of the audit committee comprised of affiliated directors, the less the committee supported the auditors in negotiation over the type of audit report to issue. This result supports regulators concern about financial

reporting quality and recent call for a more independent audit committee.

## **2. Overlapping Board Relationships**

Boards of directors were dominated by insiders and "gray" directors with significant equity ownership and apparently little experience serving as directors of other companies. Approximately 60 percent of the directors were insiders or "gray" directors (i.e., outsiders with special ties to the company or management). Collectively, the directors and officers owned nearly one-third of the companies' stock, with the CEO/president personally owning about 17 percent. Nearly 40 percent of the boards had at least one director who served as an outside or gray director on another company's board. (COSO, 2002)

## **3. Audit Failure**

A study conducted on reports between 1987-1997 identified implications that audit failure was more prevalent audit committees met only once a year or the company had no audit committee. Twenty-five percent of the companies did not have an audit committee. Most audit committee members (65 percent) did not appear to be certified in accounting or have current or prior work experience in key accounting or finance positions (COSO, 2002)

The concentration of fraud among companies with under \$50 million in revenues and with generally weak audit committees highlights the importance of rigorous audit committee practices, even for smaller organizations. In particular, the number of audit committee meetings per year and the financial expertise of the audit committee members may deserve closer attention.

The experience of MiniScribe Corp. (Longmont, Colorado) provides an example of materially fraudulent financial reporting. In May 1989, the firm announced that its previously released financial statements for fiscal years 1986 and 1987 and for the first 3 quarters of 1988 should not be relied upon. The firm at mid-1989 had a very substantial negative net worth. MiniScribe was characterized by an unusual management style, a highly decentralized organizational structure, frequent changes in organization, and lack of corporate control of accounting policies and practices. The audit committee failed to insist that the company establish and maintain an effective internal auditing function, a crucial indicator of its failure to oversee the matters of financial reporting, auditing, and internal control. Fraudulent accounting practices included recording fictitious sales and improper recognition of shipments as sales. The audit committee also did not effectively discharge the responsibility it assumed to properly evaluate the scope of the annual independent auditor's examination. (Verschoor, 1990)

The focus of the Treadway Commission, whose report was issued in October 1987, was to identify the factors that can lead to fraudulent financial reporting and to recommend steps to reduce their incidence. A sample of audit committee members was surveyed to: assess the degree of implementation that already exists with regard to the recommendations in the report, and determine audit committee opinions about the importance and necessity of the Treadway Report's recommendations that are not yet implemented.

In 2000, Enron paid Arthur Andersen \$25 million for auditing services and \$27 million for non-auditing services, according to the last proxy statement Enron filed before the scandal erupted. Many commentators concluded from this that Arthur Andersen's would have luck as non audit work that created some conflict of interest and damaged Andersen's ability to remain independent from Enron for auditing purposes. The Enron scandal has spotlighted the role of audit committees in preventing abuses in financial reporting and disclosure, although to function properly, the audit committee should focus on its own company rather than worry excessively about Enron-specific problems. (The COSO, 2002)

The Sarbanes-Oxley Act of 2002 attempt to prevent this situation by prohibiting a company's auditors from performing eight specified non-audit services for the company. Section 201 permits auditors to perform permitted non-audit services, such as tax services, only "if the activity is approved in advance by the audit committee of the issuer" in accordance with the procedures in Section 202 (Graham, 2004).

## **E. CONCLUSION**

1. Audit committees have been around for many years (since 1939), and have aroused high expectations. Interestingly, although audit committees are unregulated and there is no master list of audit committee responsibilities, and the degree of independence required of an audit committee member is unclear. The positive function is that the audit committee may generate funds or reduce the cash outflow over long run from the avoidance of disasters audit failure.

2. The committee's primary purpose should be the maintenance of continuing communication between the board and independent auditors, internal auditors, and financial management members. Its other responsibilities should include recommending the nomination and termination of independent auditors, reviewing the scope and status of audits, and reviewing audit results and change implementation.

3. The audit committee provides the board with another tool for representing the interest of the stockholders by the systematic and formalized review of the financial reporting process.

The audit committee members have two basic duties: care and loyalty. The duty of loyalty is implicated when a director enters into a transaction with, or has a conflict of interest with, the company he or she serves. Because audit committee members for NYSE and NASDAQ listed companies must meet high standards of independence, the duty of loyalty is rarely implicated in audit committee work for these companies.

4. The Enron scandal has spotlighted the role of audit committees in preventing abuses in financial reporting and disclosure, although to function properly, the audit committee should focus on its own company rather than worry excessively about Enron-specific problems.

5. The audit committee in for many years before The Sarbanes-Oxley Act of 2002, regulated had many positive functions than negative functions, however COSO found in 1987-1997 periods that audit failure was prevalent when the audit committees met only once a year or the company had no audit committee.

## REFERENCES

- The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO). 2002. *Fraudulent Financial Reporting 1987-1997. An Analysis of US Public Companies*. March. 2002.
- Graham, J Joscelyne. 2004. *The Internal Auditor; Balancing Relationship*. Altamonte Springs; February 2004. Vol. 61 pp 35-36.
- Hammond, James, Trautman, Lawrence.1979. *The Corporate Audit Committee: It's Emerging Role*. Mortgage Banker. Washington: April 1979.Vol.39. Iss. 7; pg. 54.
- Kelson, Mark, David Allen. 2002. *Insight; the Corporate and Securities Law Advisor*. Englewood Cliffs: October 2002. Vol. 16. pp 8-16.
- Klock, David R, Bellas, Carl J. 1976. Director Liability and the Audit Committee. *California Management Review*. 19:2. Winter.
- Liu, Carol. 2004. *The Influence of Audit Committee Oversight on Corporate Disclosure*. Department Accounting & Law. School of Management. State University of New York at Buffalo.
- Mark, S Beasley, Joseph V. Carcello, Dana R. Hermanson. 2000. *The CPA Journal*. New York. Vol. 70 Iss. 12 pp. 14-20.
- McDaniel, Linda, Roger D. Martin and Laureen A. Maines. 2002. Evaluating Financial Reporting Quality: The Effect of Financial Expertise vs. Financial Literacy. *The Accounting Review*. Supplement 2002. pp 139-167.

- Nest, Richard A. 1969. Audit Committee; Status and Prospects. *Journal of Accounting*. May 1969. 127.000005. ABI/INFORM Global.
- Olson, John F., Ronal O Mueller, Stephanie Tsacoumis, Amy L. Goodman. After Enron: Issues for Boards and Audit Committee to Consider. *Insights; the Corporate & Securities Law Advisor*. Englewood Cliffs: Apr 2002. Vol. 16. Iss. 4; pg. 2. 7 pgs.
- Pomeranz, Felix. 1997. Audit Committees; Where Do We Go from Here?. *Managerial Auditing Journal*. Bradford. Vol. 12. Iss. 6; pg. 281.
- Securities and Exchange Commission. 2003. *Standards Relating To Listed Company Audit Committees*.
- Tiras, [Samuel L.](#) 2004. *Audit Committee Best Practices and Earnings*. *Commercial Lending Review*. New York: Jul 2004. Vol.19. Iss. 4; pg. 7
- Tilghman, [Richard C., Jr.](#) 2002. <http://www.piperrudnick.com>. *New SEC Rules Regarding Audit Committees*.
- Verschoor, Curtis C. 2000. SEC Hopes New Rules Will Stop Financial Fraud. *Internal Auditing*. Boston; Jan/Feb. 2000. Vo2000. l. 15. pg. 38.
- Wickersham [Cadwalader & Taft](#). 2002. <http://www.cwt.com>. *SEC Adopts New Audit Committee Disclosure Rules*.

## **PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENDETEKSI ADANYA *FRAUD***

### **PASCA SARBANES OXLEY ACT 2002**

**Einde Evana<sup>10</sup>**

#### ***ABSTRACT***

*This research issue is how the role of audit committee after Sarbanes Oxley Act 2002 to detect fraud. The SOX Act requires every party to preserve and protect company from fraudulent so find that the management*

---

<sup>10</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Lampung

*and the accountant have to make declaration letter to guarantee the internal control application which its purpose is to avoid fraud can be carried out well (SOX Act section 404). The roles of audit committee include accounting policy review applied by company, internal control appraisal. Review of external reporting system and rules adherence. During its role implementation, the committee supplies the formal communication between board of director, management, and also external and internal auditor (Bradbury et al. 2004). The formal communication between the boards, management and both external and internal auditor will guarantee both the internal and external audit process carried out well. A good internal and external audit process will increase the financial statement accuracy and then increase the degree of trust to the financial statement (Anderson et al. 2003).*

*Keyword: audit committee, Sarbanes Oxley act 2002, fraud*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kasus Enron, Waste, Xerox, merupakan salah satu skandal terbesar kecurangan dalam laporan keuangan di akhir abad ke 20. Salah satu penyebab dari kecurangan (*Fraud*) tersebut adalah adanya insentif atau tekanan, adanya kesempatan karena pengendalian internal yang lemah dan adanya attitude untuk melakukan kecurangan. *Fraud* terhadap laporan keuangan memberikan pengaruh besar terhadap keuangan perusahaan dan dalam jangka panjang mengakibatkan citra buruk bagi kegiatan usaha.

Kasus Enron., Waste, Xerox merupakan indikasi awal yang berakibat dari terbentuknya Sarbanes Oxley Act (*SOX Act*) yang disahkan oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli 2002 yang mewajibkan semua pihak untuk menjaga dan melindungi perusahaan dari praktik kecurangan. sehingga baik manajemen dan akuntan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menjamin agar penerapan pengendalian intern yang dapat menghindari kecurangan itu dapat berlangsung dengan memadai (*SOX Act section 404*), menetapkan tanggung jawab baru terhadap komite audit dan pejabat perusahaan.

Untuk pihak komite audit, perubahan baru tersebut adalah adanya interaksi dengan auditor, yang menyatakan komite audit bertanggung jawab secara langsung mengenai penunjukkan, persetujuan terlebih dahulu, kompensasi, dan pengawasan akuntan publik termasuk penyelesaian perselisihan antara manajemen dan auditor sehubungan dengan pelaporan keuangan. Hal lain yang diatur adalah independensi yang salah satu contohnya adalah seorang komite audit tidak boleh menerima konsultasi atau kompensasi dari perusahaan. melebihi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan anggota komite audit, atau berafiliasi/anak perusahaan. Sedangkan untuk keahlian audit komite disyaratkan bahwa komite audit harus mengungkapkan apakah di dalam komite audit terdapat sedikitnya satu anggota yang ahli keuangan.

Komite audit juga bertugas sebagai pihak penengah apabila terjadi selisih pendapat antara manajemen dan auditor mengenai interpretasi dan penerapan Prinsip akuntansi yang berlaku umum (Dye 1988, Atle dan Nalebuff, 1991) untuk mencapai keseimbangan akhir, sehingga laporan lebih akurat (Klien, 2002). Komite audit yang beranggotakan pihak independen dan memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan akuntansi cenderung mendukung pendapat auditor (Carcello dan Neal, 2000).

Sebagai bagian dari perangkat regulasi yang terkait dengan penegakkan GCG khususnya dalam mendeteksi *fraud* komite audit berperan agar perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat melaksanakan usahanya dengan beretika, dengan melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan. Berdasarkan hal ini, isu yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana peran komite audit pasca *Sarbanes Oxley Act* 2002 dalam mendeteksi *fraud* karena *SOX Act* tersebut juga mengatur keharusan dari komite audit untuk menyusun prosedur untuk menerima, menyimpan dan menindaklanjuti keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi, pengendalian intern dan audit. Selain hal di atas komite audit diharuskan untuk menerima kritik yang disampaikan secara rahasia dan tanpa nama oleh karyawan perusahaan sehubungan dengan akuntansi dan audit yang dipertanyakan.

## **B. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **1. Komite Audit**

Di Indonesia komite audit pada awal pelaksanaannya masih bersifat *voluntary* bagi perusahaan mempublik berbeda dengan BUMN yang keberadaan komite audit sudah diatur dan bersifat

mandatory sesuai dengan SK MENEG BUMN No. 133/1999 pasal 3 ayat 2, yang menyebutkan bahwa dewan komisaris hendaknya membentuk komite audit yang dipimpin oleh anggota dewan komisaris dari tokoh non pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bursa Efek Jakarta (BEJ) mengeluarkan peraturan tanggal 1 Juli 2001 yang mengatur tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit. Peraturan mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan minimal tiga orang independen, salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit

Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (Teoh dan Wong 1993) sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan.

Bagi perusahaan manfaat yang dapat diperoleh dengan dibentuknya komite audit adalah:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.
5. Memungkinkan non direktur untuk berkontribusi pendapat independent dan memerankan peran positif.
6. Menambah kepercayaan publik dalam kredibilitas dan tujuan laporan keuangan. (Iksan dkk, 2003)

## **2. *Fraud***

*Fraud* merupakan suatu kejahatan sekaligus pelanggaran terhadap hukum perdata. Menurut *Black's Law Dictionary fraud* adalah berbagai sarana yang dapat direncanakan oleh manusia yang menggunakan kecerdasannya untuk mengambil keuntungan dari pihak lainnya dengan memberi saran yang menyesatkan atau menutupi kebenaran. International Standards on Auditing seksi 240 mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal (Sahari, 2007). Menurut SPAP *fraud* diterjemahkan sebagai

kecurangan, dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan auditor berkepentingan untuk menguji apakah suatu tindakan yang mengandung fraud mengakibatkan salah saji (*mistatement*) dalam pelaporan keuangan (IAI, 2001).

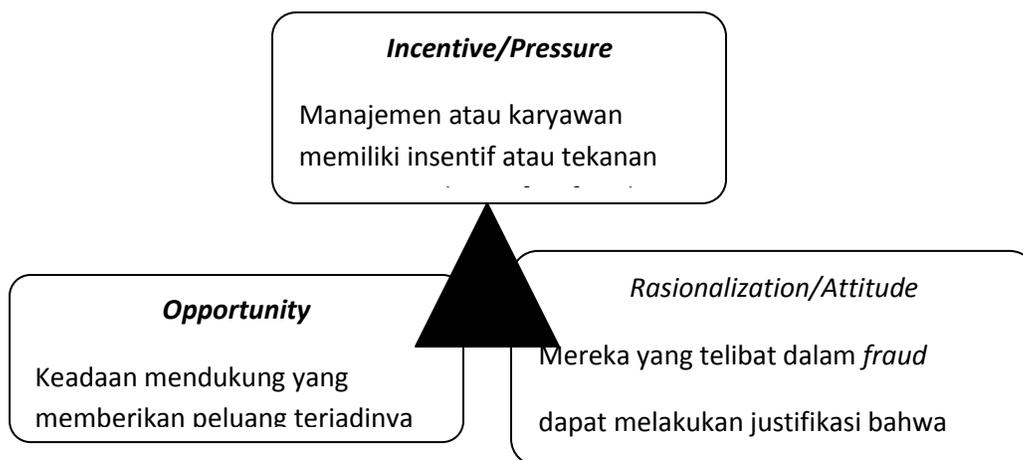
Berdasarkan sifatnya fraud dapat dikategorikan menjadi:

- a. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan (*fraudulent financial reporting*), yang timbul dari pengakuan pendapatan yang tidak tepat, lebih saji (*overstatement*) aktiva, atau kurang saji (*understatement*) kewajiban.
- b. Penyelewengan aktiva (*misappropriation of assets*), termasuk penggelapan, *fraud* dalam penggajian, pencurian pihak eksternal, *fraud* dalam pengadaan (*procurement*), pemalsuan atau pengalihan produk.
- c. Pengeluaran atau timbulnya kewajiban yang tidak pada tempatnya misalnya penyuaipan.
- d. Kecurangan perolehan pendapatan atau aktiva (*fraudulent acquisition of revenue or assets*), seperti *over billing* atau substitusi produk dengan pihak ketiga.
- e. Kecurangan melalui penghindaran beban, misalnya *fraud* dalam pajak, mengatur pendapatan untuk menghindari pajak.
- f. Penyimpangan keuangan oleh manajemen.

*Fraudulent financial reporting* dan *misappropriation of assets* merupakan fraud yang umumnya ditemui pada perusahaan publik yang menjadi fokus auditor internal (Sahari, 2007). Pada umumnya *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.
- b. Peluang untuk melakukan *fraud*
- c. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud.

Ketiga faktor yang terjadi secara bersamaan di atas dapat digambarkan dalam *fraud triangle* berikut ini:



Gambar 1. *Fraud Triangle*

### 3. Pengendalian Intern

Pada tahun 2001 istilah sistem pengendalian intern yang dipergunakan IAI berubah menjadi pengendalian intern. Standar Pekerjaan Lapangan yang kedua menyebutkan (IAI, 2001) ”Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan”. Definisi Pengendalian intern menurut IAI 2001 adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: a) Keandalan pelaporan keuangan, b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Sawyer (2003), *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) telah memberikan definisi pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi dan dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi dan mendorong ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan. *AICPA professional standards* mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern yaitu (Agoes, 2004):

- a) Lingkungan pengendalian (*Control Enviroment*), menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasarsemua komponen pengendalian intern yang lain.
- b) Penilaian dan penetapan tingkat risiko (*risk Assesment*), risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan manajemen dalam laporan keuangan.
- c) Informasi dan komunikasi (*information dan communication*), sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.
- d) Aktivitas pengendalian (*control activities*), kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dapat dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas, sudah dilaksanakan

- e) Pemantauan (*monitoring*), proses penentuan mutu kerja pengendalian intren secara berkesinambungan. Pemantauan ini mencakup pemantauan rancangan, dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung terus-menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan kombinasi keduanya.

### C. PEMBAHASAN

Beberapa penelitian tidak dapat membuktikan perbedaan antara perusahaan yang membentuk dan tidak membentuk komite audit. Crowford (1987) di dalam McMullen (1996) tidak dapat membuktikan hipotesis, terdapat perbedaan antara perusahaan yang mempunyai dan tidak mempunyai komite audit dalam hal perubahan penerapan prinsip akuntansi, opini audit tidak wajar, perubahan auditor eksternal, pelanggaran terkait dengan pelaporan keuangan, Beasley (1996) dalam Bradbury et al. (2004) tidak menemukan hubungan statistik antara keberadaan komite audit dan kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Kalbers (1996) membuktikan pelaksanaan komite audit tidak efektif, sehingga merekomendasikan perlunya peningkatan komite audit. Auditor sering menilai komite audit lebih rendah pada tanggung jawab, atribut dan keefektifan komite.

McMullen (1996) menemukan komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham karena kecurangan, lebih sedikit pelaporan kembali laba kuartalan, lebih sedikit tindakan ilegal, lebih sedikit pergantian auditor ketika terdapat selisih pendapat antara klien dan auditor. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kesalahan pelaporan, pelanggaran dan indikator lain dari pelaporan keuangan yang tidak andal cenderung tidak memiliki komite audit.

Komite audit mempunyai kemampuan untuk mengaitkan berbagai pihak yang ikut serta dalam proses pelaporan keuangan dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan pembuatan laporan keuangan. Sebagai tindak lanjut dari prosedur pengauditan laporan keuangan apabila auditor ekstern menemukan defisiensi dalam pengendalian intern maka auditor eksternal tersebut harus mengkomunikasikan hasil tersebut ke pihak manajemen, komite audit, dewan direksi dan kemudian secara bersamaan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al., 2004). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Didalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan

komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Bradbury et al., 2004). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al., 2003).

Penelitian selanjutnya diarahkan untuk meneliti pengaruh karakteristik komite audit yaitu independensi dan keahlian yang dimiliki anggota komite audit. Klien (2002) menguji apakah komite audit dan karakteristik dewan komisaris berhubungan dengan manajemen laba. Temuan membuktikan terdapat hubungan negatif antara komite audit independen dan akrual tidak normal. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur dewan yang independen terhadap CEO efektif dalam memonitor proses pelaporan akuntansi keuangan perusahaan.

Klien menjelaskan bahwa komite audit bertugas sebagai penengah dua pihak untuk menimbang dan sebagai penghubung pandangan yang berbeda antara manajemen dan auditor untuk mencapai keseimbangan akhir, sehingga laporan lebih akurat. Raghunandan (1996) melaporkan variasi yang diobservasi antara perusahaan yang mempunyai masalah pelaporan keuangan dan tidak. Masalah lebih kecil ditemukan pada perusahaan yang memiliki komite audit yang seluruh anggotanya independen, paling tidak satu anggotanya bersertifikasi akuntan publik atau memiliki pengetahuan akuntansi dan keuangan, dan melakukan pertemuan tiga kali atau lebih dalam setahun.

Carcello dan Neal (2000) menemukan pada perusahaan yang proporsi anggotanya sebagian besar adalah komisaris afiliasi dalam keadaan perusahaan tertekan, cenderung tidak mendukung auditor untuk mengeluarkan pendapat *going-concern*. Raghunandan et al. (2001) meneliti hubungan antara komposisi komite dan interaksi komite terhadap auditor internal. Hasil penelitian adalah komite yang beranggotakan hanya komisaris independen dan salah satu memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi cenderung untuk (1) lebih sering bertemu dengan auditor internal, (2) mempunyai akses pribadi dengan auditor internal, (3) mereview proposal internal audit dan hasil dari internal audit.

Pengendalian intern dianggap merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja sehingga direksi umumnya menyerahkan pengembangannya kepada direktur keuangan tanpa dukungan penuh dari direksi lain (Mulyadi, 2001). Tuanakotta (2007) menyatakan bahwa untuk mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian intern. Kalau pengendalian intern dirancang dan dilaksanakan dengan baik jika pegawai melakukan tugasnya dengan baik maka pengendalian intern dapat diandalkan untuk melindungi laporan keuangan dari *fraud*.

Manajemen puncak seringkali mempunyai persepsi yang keliru mengenai pengendalian intern.

Regulasi *SOX Act* mewajibkan semua pihak untuk menjaga dan melindungi perusahaan dari praktik kecurangan, sehingga baik manajemen dan akuntan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menjamin agar penerapan pengendalian intern yang dapat menghindari kecurangan itu dapat berlangsung dengan memadai (*SOX Act section 404*), menetapkan tanggung jawab baru terhadap komite audit dan pejabat perusahaan.

*SOX Act* merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kembali peran auditor internal dan interaksinya dengan komite audit dengan mewajibkan perusahaan untuk menilai pengendalian intern setiap tahun dan melaporkannya, selain itu dengan regulasi terhadap peran komunikatif dari komite audit dan auditor intern diharapkan dapat menghindari adanya *fraud* pada laporan keuangan, yang salah satu indikasi utama penyebabnya adalah lemahnya pengendalian intern.

## **Peran Komite Audit di Indonesia**

Pada tanggal 29 Juli 2003 lima organisasi profesi auditor internal Indonesia mengeluarkan *Position Paper 1/2003* yaitu: "Rekomendasi mengenai peran Internal Auditor dalam meningkatkan *Corporate Governance* pada perusahaan di Indonesia". Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Gubernur Bank Indonesia, Menteri BUMN, dan Ketua Bada Pengawas Pasar Modal yang isinya antara lain:

- Direksi dan komisaris pada Bank, BUMN dan Perusahaan Publik agar diwajibkan melaporkan hasil penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada organisasinya termasuk kepatuhan yang berlaku dalam laporan tahunan perusahaan.
- Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar membentuk komite audit untuk membina dan mendukung internal auditor dalam melakukan penilaian atas proses *Corporate Governance*, pengelolaan risiko dan pengendalian Intern (Tugiman, 2006)

Hal ini direspon secara positif oleh regulator yang terwujud dengan dikeluarkannya beberapa regulasi mengenai kewajiban pembentukan Komite Audit antara lain UU No. 19/2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN dan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-

41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

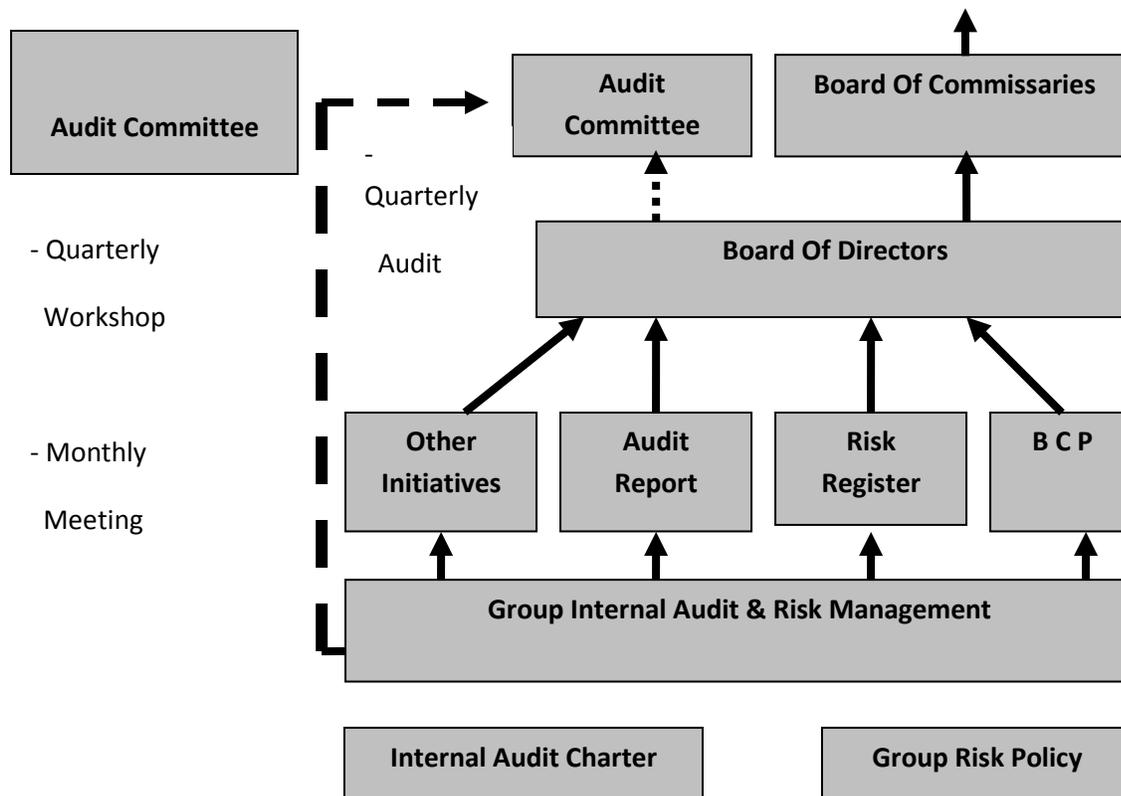
International Astra Group salah satu perusahaan yang telah memberdayakan komite audit yang bersifat *independent* dan *professional* serta memiliki akses langsung kepada internal audit dan risk management akan memberi jaminan bahwa semua indikasi *fraud* akan dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan eskalasi permasalahan yang ada. Untuk lebih memfokuskan program kerja IAG agar mencakup area yang memiliki resiko tertinggi yaitu penerapan risk based audit plan, yang mengatur fokus dan arah kegiatan internal audit dikembangkan setelah konsultasi yang ekstensif dengan manajemen, dewan direksi dan komite audit. Setelah itu, kegiatan audit diperbaiki yang menyertakan monitor agar sesuai dengan perencanaan dan bila perlu, dilakukan beberapa perbaikan yang menyertakan beberapa perubahan dalam profil risiko.

#### **Astra Group GCG Reporting Flow**

Audit Committee – BOC

**BAPEPAM**

Monthly Meeting



**Gambar 2. Astra Group GCG Reporting Flow**

Dalam menilai dan mengukur efektifitas pengawasan intern. Astra menggunakan sistem penilaian tiga tingkat efektif, memerlukan perbaikan dan lemah. Bidang yang memerlukan perbaikan diidentifikasi dan ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah dijalankan. Diskusi yang ekstensif diadakan sepanjang tahun dimana berbagai tingkatan manajemen membahas masalah-masalah audit dan jalan keluarnya. Saat ini sudah tersedia proses pelaporan resmi kuartalan terkait masalah audit di Group Astra. Permasalahan penting dilaporkan dan dibicarakan dengan Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

#### **D. SIMPULAN**

Isu yang hendak diangkat dalam paper ini adalah bagaimana peran komite audit pasca *Sarbanes Oxley Act 2002* dalam mendeteksi *fraud* karena *SOX Act* tersebut mengatur keharusan dari komite audit untuk menyusun prosedur untuk menerima, menyimpan dan

menindaklanjuti keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi, pengendalian intern dan audit.

Regulasi *SOX Act* mewajibkan semua pihak untuk menjaga dan melindungi perusahaan dari praktik kecurangan, sehingga baik manajemen dan akuntan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menjamin agar penerapan pengendalian intern yang dapat menghindari kecurangan itu dapat berlangsung dengan memadai (*SOX Act section 404*), menetapkan tanggung jawab baru terhadap komite audit dan pejabat perusahaan.

*SOX Act* merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kembali peran auditor internal dan interaksinya dengan komite audit dengan mewajibkan perusahaan untuk menilai pengendalian intern setiap tahun dan melaporkannya, selain itu dengan regulasi terhadap peran komunikatif dari komite audit dan auditor intern diharapkan dapat menghindari adanya *fraud* pada laporan keuangan, yang salah satu indikasi utama penyebabnya adalah lemahnya pengendalian intern.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al., 2004). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Didalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Bradbury et al., 2004). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al., 2003).

## DAFTAR PUSTAKA

Sukrisno, Agoes. 2006. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)*. Kantor Akuntan Publik. FE-UI.

\_\_\_\_\_. 2005. Peranan Internal Audit-Development. Enterprises Risk Management. dan Good Corporate Governance terhadap Fraud dan Implikasinya. *Majalah Auditor No. 22 Tahun 2005*. PT. Auditor Media Citra Pariwara. Jakarta.

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2003. *Auditing and Assurance Service-An Integrated Approach*. 9<sup>th</sup> Edition. Prentice Hall. New Jersey.
- Beasley, M. S. 1996. An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* 71.
- Beasley, M. S. dan Salterio, S. E. 2001. Relation between Board Characteristics and Voluntary Improvements in Audit Committee Composition and Experience. *Contemporary Accounting Research*. Vol. 18 No. 4 (Winter 2001).
- Boynton, William C., Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. 2001. *Modern Auditing*. 7<sup>th</sup> edition. Jhon Wiley & Sons. Inc.
- Bradbury, M. E., Mak. Y. T, dan Tan. S. M. 2004. Board Characteristics. Audit Committee Characteristics and Abnormal Accruals. *Working Paper*. Unitec New Zealand dan National University of Singapore.
- Bryan, D., Liu M. H. C. dan Tiras. S. L. 2001. The Influence of Independent and Effective Audit Committees on Earnings Quality. *Working Papers*. January 2004. Bursa Efek Jakarta. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Kep-339/BEJ/07-2001
- Chamber, A.E. dan S.H. Penman. 1984. Timeliness of the Australian Annual Report. *Journal of Accounting Research*.
- Carcello, J. V. dan Neal T. L. 2000. Audit Committee Composition and Auditor Reporting. *The Accounting Review*. Vol. 75. No. 4. Oktober.
- Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari*. Penerbit Salemba Empat.
- Sahari, Haryanto, Dudi M. Kurniawan. 2007. *Peran Akuntan dalam Mendeteksi dan Fraud*. Ebar. Januari.
- Siregar, Yosafat. 2007. *Komitmen Bersama dalam Perusahaan untuk Mencegah dan Mendeteksi Fraud di PT. Astra International*. Tbk. Ebar. Januari.
- Raghunandan, Kannan, William J. Read and Darastha V. Rama. 2001. Audit Committee Composition. Gray Director. and Interactions With Internal Auditing. *Horizons*. Volume 15.
- Teoh, S.H., Welch. I., dan Wong. T.J. 1998. Earnings Management and of Seasoned Equity Offerings. *Journal of Financial Economics* 50.

Tuannakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Seri Departemen Akuntansi FEUI.

[www.internalaudit.wayne.edu](http://www.internalaudit.wayne.edu)









